



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2023

**Pemerintah
Kabupaten Kudus**



www.kuduskab.go.id



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Kudus Akhir Tahun Anggaran 2023 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Sidang Paripurna DPRD.

Penyusunan LKPJ dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LKPJ sendiri merupakan laporan dengan substansi pokok adalah hasil evaluasi dan refleksi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kudus selama satu tahun anggaran, dengan tolok ukur kinerja berdasarkan pencapaian target pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023. Muatan dalam LKPJ disamping hasil penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga di dalamnya termuat hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi.

Pada kesempatan yang baik ini, diucapkan terima kasih kepada pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Kudus atas kerjasama yang telah terbina selama ini. Disampaikan juga apresiasi untuk jajaran Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kudus.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus, 20 Maret 2024
PA BURATI KUDUS

Dr. M. HASAN CHABIBIE, S.T., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 DASAR HUKUM	1
1.2 VISI DAN MISI BUPATI KUDUS.....	3
1.3 DATA UMUM DAERAH	13
1. Data Geografis Wilayah.....	13
2. Jumlah Penduduk	15
3. Pertumbuhan Penduduk.....	18
4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil	19
5. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan	21
6. Realisasi belanja menurut Jenis Belanja	23
7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.....	24
BAB II	
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	26
2.1 KEBIJAKAN UMUM	26
2.2 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	27
2.3 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN.....	27
2.4 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).....	28
2.5 PENDAPATAN TRANSFER.....	33
2.6 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.....	34
2.7 ANGGARAN DAN REALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PER URUSAN	35
2.8 PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENGELOLAAN KEUANGAN.....	37
BAB III	
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	38
3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	38
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	40
3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	78
3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan	122
3.1.4 Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan.....	138
3.1.5 Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157
3.1.6 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	270
3.1.7 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	279
3.1.8 Unsur Kewilayahan	282
3.1.9 Unsur Pemerintahan Umum	323
3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	328
3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA.....	342

BAB IV	
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	378
4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN	378
4.2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN.....	379
BAB V.....	
PENUTUP	381

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Rapat Paripurna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Kudus Tahun 2023, yang juga merupakan implementasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 untuk proyeksi tahun kelima ini, merupakan wujud pemenuhan kewajiban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mekanisme yang diatur sesuai dengan pedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Obyek laporan berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005–2025, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023 serta Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023.

1.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah No 249);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 27).

1.2 VISI DAN MISI BUPATI KUDUS

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera

Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan yakni sebagai berikut :

Bangkit. Bangkit merupakan suatu tindakan semangat dari masyarakat untuk bangun menggugah dan memajukan daerah. Tindakan semangat yang ditimbulkan dapat memperkuat dan mengembangkan potensi daerah untuk bersaing dengan daerah lain. Daerah yang bangkit mampu memperbaiki permasalahan daerah dan menyejahterakan masyarakat.

Modern. Modern merupakan suatu sikap, cara berpikir, dan cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Kabupaten modern adalah kabupaten yang memiliki daya saing dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta dapat menyelaraskan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan teknologi yang dikembangkan. Penggunaan teknologi sebagai pendukung perkembangan suatu daerah dapat menjadikannya selalu *up to date* dalam segala informasi. Kabupaten modern dapat menciptakan kabupaten yang nyaman, terdepan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Religius. Religius merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang taat/ patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama. Karakter religius sangat penting dalam kehidupan masyarakat, menjadi sikap hidup yang mengacu pada tatanan dan larangan dan tatanan sikap yang telah diatur dalam aturan agamanya. Sikap religius pada setiap individu akan menciptakan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan masyarakat.

Cerdas. Cerdas berarti mempunyai kebiasaan atau tradisi, sikap dan kemampuan untuk selalu belajar guna meningkatkan pengetahuan, intelektual, emosional dan spiritual.

Sejahtera. Sejahtera berarti aman sentosa dan makmur dengan suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Keadaan Sejahtera memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Kudus tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

1. *Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.*

Dengan program prioritas mewujudkan industri kerakyatan, pendidikan, kesehatan, gender, pemuda dan olahraga serta kesejahteraan sosial. Penggunaan dan penguasaan teknologi dan multimedia di era globalisasi menjadi basis dalam perkembangan daerah. Dengan adanya pemanfaatan yang baik dari adanya teknologi dan multimedia diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif. Berkualitas berarti adanya kemampuan dan kapasitas yang dimiliki, sedangkan kreatif dan inovatif merupakan kemampuan untuk menciptakan serta memperkenalkan atau mengembangkan hal – hal baru. Terbentuknya masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif diharapkan mampu mewujudkan perubahan – perubahan sebagai langkah awal perkembangan daerah yang lebih baik. Misi ini dilaksanakan dengan sasaran pendidikan dan pelatihan teknologi dan multimedia bagi masyarakat terutama bagi generasi – generasi muda daerah. Hal ini perlu didukung dengan pengembangan penelitian, pengkajian serta inovasi secara terarah melalui Peta jalan Sistem Inovasi Daerah (*roadmap* SIDA), untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif.

2. *Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.*

Dengan program prioritas menyangkut transparansi anggaran, akuntabilitas, manajemen pemerintahan yang modern dan pelayanan publik. Upaya peningkatan pelayanan publik dimaksudkan guna memberikan pelayanan publik yang bermutu untuk seluruh masyarakat. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud termasuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan perundangundangan yang berlaku dibutuhkan pemerintahan yang semakin handal. Keberhasilan mewujudkan pemerintah yang handal tergantung kepada sumber daya manusia yang tersedia. Misi ini dilaksanakan dengan sasaran peningkatan kinerja SDM. Peningkatan kinerja SDM dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan dengan harapan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. untuk melayani kepentingan masyarakat.

3. *Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.*

Dengan program prioritas pendidikan karakter, berbagi sesama dan saling menghormati. Upaya mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif dilaksanakan guna menciptakan daerah tanpa terjadi adanya kekerasan. Perwujudan kehidupan yang toleran dan kondusif dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan seperti adanya toleransi antaragama dengan kebebasan beragama, toleransi terhadap perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Hubungan baik, saling menghargai dan menghormati dalam bermasyarakat merupakan beberapa sasaran yang dapat dilakukan. Disamping itu, juga diupayakan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjalin toleransi serta harmonisasi sekaligus perlu adanya perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia.

4. *Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.*

Dengan program prioritas akselerasi daya saing, pemberdayaan ekonomi lokal dan program produksi yang kreatif dengan membentuk sentra industri kecil. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui keunggulan lokal dan pembangunan iklim usaha yang berdaya saing menjadi prioritas mengingat peran yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang dilakukan dengan peningkatan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan terkait SDM, permodalan dan investasi serta akses terhadap produk yang akan dipasarkan dengan perbaikan prasarana dan sarana pendukung. Dengan memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal maka perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang. Berbagai permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya penguasaan teknologi dan informasi bagi masyarakat. Dengan demikian perlu adanya optimalisasi pemerintah sebagai penyedia (*provider*) menjadi regulator, fasilitator, motivator dan katalisator berbagai kegiatan ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata.

Misi Bupati terpilih memperlihatkan pilar penting yang perlu diprioritaskan dalam proses pembangunan di Kabupaten Kudus, yang dikenal dengan 9 (sembilan) Program Unggulan yaitu :

1. Tunjangan 1 juta per bulan untuk semua guru non PNS di PAUD/TK/Madin/RA/TPQ/SD/SMP/SMA/Madrasah
2. Bantuan sosial santunan bagi warga yang sakit di rumah sakit kelas 3 dan santunan anak yatim piatu serta santunan kematian cair dalam satu hari lewat desa
3. Pelatihan dan pendampingan 500 wirausahawan baru setiap tahun
4. Bantuan per bulan untuk khotib dan imam masjid/mushola serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah
5. Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta penguatan pemasaran hasil panen
6. Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran bantuan usaha
7. Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumberdaya manusia
8. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga melalui pelatihan khusus kewirausahaan
9. Pemberdayaan buruh melalui forum komunikasi Pimpinan Unit Kerja (PUK)/Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB), perusahaan dan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas maka ditetapkan tujuan pokok pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018 – 2023, adapun tujuannya adalah :

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif;
3. Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan;
4. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah.

Sedangkan sasaran-sasaran pokok pembangunannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat;
4. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi;
5. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama;
6. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
7. Meningkatnya daya saing investasi daerah;
8. Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah;
9. Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kudus tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun sampai dengan Tahun 2023.

Selanjutnya strategi dan arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

Table 1.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga pendidik
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
			Pemberian BOS dan beasiswa
			Pemberian tambahan penghasilan guru non PNS
			Peningkatan pengelolaan perpustakaan
			Peningkatan jumlah koleksi perpustakaan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi ibu dan bayi
			Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap penyakit menular dan tidak menular
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras Kesehatan
			Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
			Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
			Peningkatan pembinaan kepemudaan
			Penerapan pola hidup sehat dan pemassalan olahraga
Peningkatan penggunaan kontrasepsi jangka panjang			

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	Peningkatan kemandirian ekonomi kerakyatan Peningkatan produksi dan produktivitas pangan Peningkatan pola konsumsi masyarakat Peningkatan perlindungan sosial Pemberian tambahan penghasilan tenaga pendidik keagamaan non PNS
Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Penataan manajemen perubahan Penataan perundang-undangan Penataan dan penguatan organisasi Penataan ketatalaksanaan Penataan sistem manajemen SDM aparatur Penguatan pengawasan Optimalisasi pembangunan Zona Integritas Peningkatan peran APIP dalam penjaminan mutu dan konsultasi Penguatan akuntabilitas kinerja Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan verifikasi dan validasi data kependudukan Integrasi perencanaan dan penganggaran Optimalisasi monitoring dan evaluasi Optimalisasi rasio kemandirian keuangan daerah Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah Peningkatan kedisiplinan aparatur Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur Optimalisasi penerapan hasil inovasi Optimalisasi jejaring penelitian dan pengembangan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Peningkatan penyelenggaraan persandian Peningkatan jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Penguatan kebijakan internal SPBE Penguatan tata kelola SPBE Penguatan layanan SPBE Peningkatan diseminasi informasi
Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	Peningkatan penegakan Perda Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi Pembinaan mental dan peningkatan implementasi aktivitas ibadah Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran Peningkatan komunikasi kelompok masyarakat dan toleransi umat beragama Peningkatan kondusifitas melalui pemerataan CSR dan pemanfaatan zakat, infak dan sodaqoh Peningkatan aktualisasi budaya dan adat istiadat Peningkatan pengelolaan bangunan bersejarah dan cagar budaya
Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan Pembangunan taman hutan raya

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Peningkatan produksi dan produktivitas koperasi, usaha kecil dan menengah Peningkatan informasi dan akses pasar tenaga kerja Peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengembangan wirausaha baru Peningkatan diseminasi ketenagakerjaan Peningkatan pembinaan industri kecil dan menengah Peningkatan fasilitasi transmigrasi Peningkatan perlindungan konsumen Peningkatan pemasaran hasil produk lokal secara konvensional maupun online Peningkatan pengelolaan pasar Peningkatan pengendalian manajemen bahan pokok penting dan strategis Peningkatan ekonomi domestik dan fasilitasi tata kelola ekspor impor Peningkatan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana Peningkatan pemberdayaan perempuan kepala keluarga Peningkatan pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Peningkatan akses dan kualitas perlindungan anak
		Meningkatnya daya saing investasi daerah	Peningkatan nilai realisasi investasi Peningkatan pelayanan perijinan satu pintu Peningkatan pengelolaan pariwisata Peningkatan manajemen pertanahan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan drainase
			Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum
			Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sanitasi
			Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman
			Penurunan luasan kawasan kumuh
			Peningkatan pemberdayaan masyarakat, organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa
			Pembangunan kawasan perdesaan
			Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintahan desa
			Peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas
			Peningkatan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan
		Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	Peningkatan daya dukung dan daya tampung LH
			Peningkatan pencegahan pencemaran dan pengawasan lingkungan hidup
			Peningkatan pengelolaan persampahan
			Peningkatan ruang terbuka hijau
Fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral			
Peningkatan jasa ekosistem			

1.3 DATA UMUM DAERAH

1. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten terkecil di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dengan total seluas 42.516 Ha atau sekitar 1,31% luas Provinsi Jawa Tengah. Wilayah administratif berbatasan dengan wilayah kabupaten di sekitar sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1:

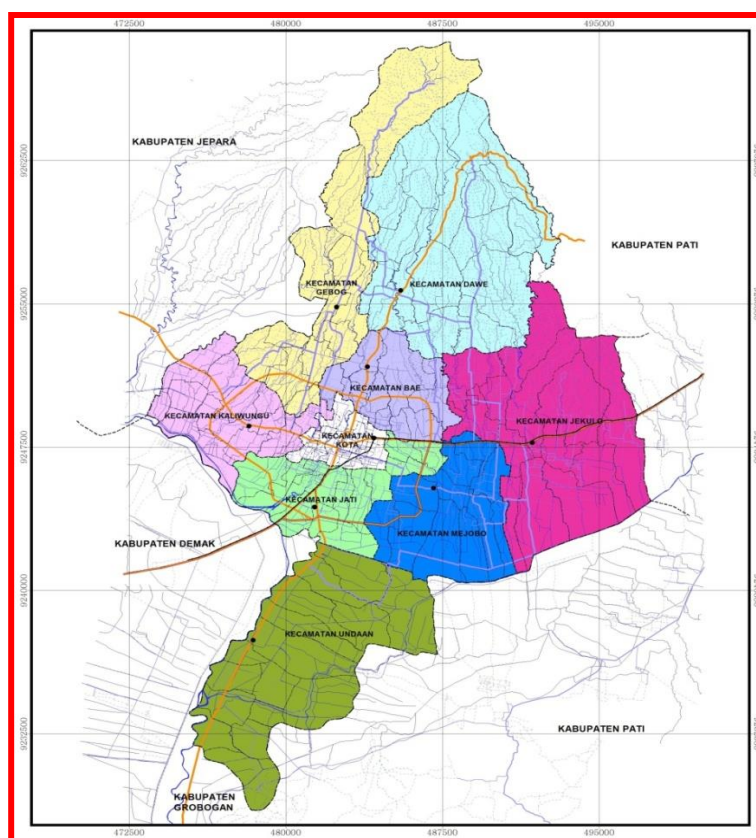
Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati

Sebelah Timur : Kabupaten Pati

Sebelah Selatan : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan

Sebelah Barat : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak

Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak pada $06^{\circ}51'$ - $07^{\circ}16'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}36'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Posisi Kabupaten Kudus juga terletak pada jalur perekonomian nasional yaitu dilewati jalan nasional pantura sehingga sangat strategis. Kondisi wilayah Kabupaten Kudus merupakan daerah yang berdekatan dengan pesisir Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati serta sebagian di bagian Utara merupakan pegunungan Muria dan Pati Ayam.



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Kudus Berdasar Wilayah Kecamatan
Sumber : RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032

Adapun data luas wilayah dan pembagian administrasi wilayah Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Kabupaten Kudus 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jml Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Dukuh	Jml RW	Jml RT
1	Kaliwungu	3.271,3	15	0	48	67	444
2	Kota	1.047,3	16	9	34	110	498
3	Jati	2.629,8	14	0	52	79	388
4	Undaan	7.177,0	16	0	33	63	357
5	Mejobo	3.676,6	11	0	33	69	341
6	Jekulo	8.291,7	12	0	45	85	445
7	Bae	2.332,3	10	0	38	51	287
8	Gebog	5.506,0	11	0	80	82	435
9	Dawe	8.583,7	18	0	71	110	583
Jumlah		42.515,7	123	9	434	716	3.778

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (diolah)

Sebagaimana tertera pada Tabel 1.2, wilayah Kabupaten Kudus terdiri atas 9 kecamatan, yang terbagi dalam 9 kelurahan dan 123 desa, 434 dukuh, 716 RW dan 3.778 RT.

Sedangkan untuk kerentanan tanah di Kabupaten Kudus yang dilihat dari kemiringannya, wilayah Kabupaten Kudus memiliki beragam kemiringan, mulai dari 0 sampai 40°. Kecamatan yang memiliki wilayah pada kemiringan yang beragam adalah Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. Seluas 6139,51 Ha wilayah Kecamatan Jekulo berada pada kemiringan (0-2)°, 1115,1 Ha luas berada pada kemiringan (3-15)°, kemudian 176,35 Ha berada pada kemiringan (16-40)° serta 860,72 Ha yang berada pada tingkat kemiringan yang sangat curam. Sedangkan untuk Kecamatan Kaliwungu, Kota Kudus, Jati, serta Mejobo terletak pada kemiringan datar atau (0-2)°.

Kabupaten Kudus dapat dibagi menjadi 4 zona kerentanan gerakan tanah, sebagai berikut :

a) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah

Terdapat pada daerah datar sampai sedikit landai dengan kemiringan lereng 0-5% sampai dengan <15%, wilayahnya meliputi Kecamatan Undaan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo. Batuan terdiri dari endapan alluvial dan sebagian tuf, tuf pasiran dari Formasi Tuf Muria. Lahan umumnya digunakan sebagai permukiman, sawah, pasar, tambak dan perkantoran.

- b) **Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah**
Terdapat pada daerah datar sampai terjal, lereng umumnya berkisar antara 5% sampai dengan 15%, di lembah sungai bagian atas kadar lereng sampai >50%, wilayahnya meliputi sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Mejobo. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasir kadang dari Formasi Tuf Muria. Lahan umumnya digunakan sebagai hutan sejenis, sawah, tegalan dan permukiman.
- c) **Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah**
Terdapat pada daerah bergelombang sampai terjal, lereng umumnya berkisar antara 30-50% sampai dengan >70%, di lembah sungai, wilayahnya meliputi daerah Gunung Pati Ayam sebelah utara dan Kecamatan Gebog. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasir, breksi andesit dari Formasi Tuf Muria, lava dari Formasi Lava Muria dan Batupasir-Gamping dari Formasi Patiayam. Lahan umumnya digunakan sebagai hutan sejenis, hutan heterogen dan pemukiman.
- d) **Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi**
Terdapat pada daerah bergelombang sampai terjal, lereng umumnya berkisar antar 50-70% sampai dengan >70%, di lembah sungai, wilayahnya meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan puncak Muria bagian selatan. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasir, breksi andesit dan lava dari Formasi Lava Muria, batupasir dari Formasi Pati Ayam. Lahan umumnya digunakan sebagai tegalan, hutan heterogen.

2. Jumlah Penduduk

Komposisi penduduk laki-laki di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebanyak 433.802 orang atau 49,97% dan perempuan sebanyak 434.277 atau sekitar 50,03%. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah penduduk sebanyak 873.431 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 436.585 orang atau sekitar 49,99% dan perempuan sebanyak 436.846 orang atau 50,01%. Kondisi ini menunjukkan perkembangan jumlah penduduk perempuan meningkat lebih banyak dibanding laki-laki. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2023

Tahun	Laki – laki		Perempuan		Total
	Orang	%	Orang	%	
2019	428.161	49.78	431.894	50,22	860.055
2020	432.754	49.97	433.215	50.03	865.969
2021	433.374	49,97	433.831	50,03	867.205
2022	433.802	49,97	434.277	50,03	868.079
2023	436.585	49,99	436.846	50,01	873.431

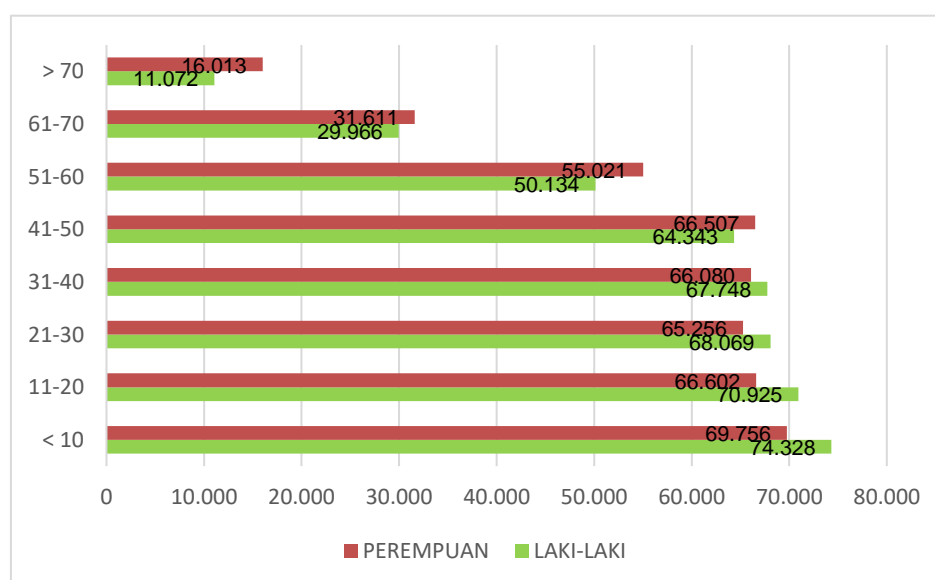
Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2023 (Dinas Dukcapil)

Sedangkan komposisi penduduk menurut kelompok usia di Kabupaten Kudus pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada usia yang lebih muda lebih besar daripada kelompok usia lebih tua, hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk masih positif, dan menjadi bonus demografi bagi ketersediaan tenaga kerja. Dalam bentuk piramida, kondisi tersebut masih normal, sedangkan bentuk piramida terbalik mengindikasikan terjadinya pola Aging Population pada suatu daerah yang dapat berdampak pada Dependency Ratio (Angka Ketergantungan). Di Kabupaten Kudus pola piramida masih normal sehingga Angka Ketergantungan masih cukup baik dan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Kudus. Data komposisi penduduk dapat dilihat sesuai tabel-tabel berikut ini :

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2023

Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
≤ 10	74.328	69.756	144.084
11-20	70.925	66.602	137.527
21-30	68.069	65.256	133.325
31-40	67.748	66.080	133.828
41-50	64.343	66.507	130.850
51-60	50.134	55.021	105.155
61-70	29.966	31.611	61.577
> 70	11.072	16.013	27.085
Jumlah	436.585	436.846	873.431

Diolah dari : DKB Semester 2 Tahun 2023 (Dinas Dukcapil)



Pada grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada kelompok usia <10 tahun masih lebih besar dari kelompok usia yang lain dengan Jumlah penduduk sebesar 144.084 jiwa terdiri perempuan 69.756 dan laki-laki 74.328 sedangkan kelompok usia tertinggi kedua ada pada rentang usia 11-20 tahun sebesar 137.527 jiwa terdiri dari perempuan 66.602 dan laki-laki 70.925.

Table 1.5 Komposisi Penduduk menurut *Dependensi Rasio* di Kabupaten Kudus Tahun 2023

Tahun	≤14	15-64	>65	Jumlah	Rasio Ketergantungan
2019	190.002	620.486	62.181	860.055	40,65
2020	201.581	613.933	50.455	865.969	41,05
2021	201.884	613.489	51.832	867.205	41,36
2022	189.271	618.301	60.507	868.079	40,40
2023	201.713	614.458	57.260	873.431	42,15

Diolah dari : DKB semester 2 tahun 2023 (Dinas Dukcapil)

Pembagian penduduk menurut kelompok umur merupakan potret struktur penduduk setempat yang menggambarkan potensi penduduk produktif dan rasio ketergantungan (dependency ratio). Rasio ketergantungan merupakan rasio antara kelompok penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk kelompok penduduk usia produktif (usia 15-65 tahun). Rasio Ketergantungan Kabupaten Kudus pada tahun 2023 sebesar 42,15.

Sedangkan untuk menggambarkan distribusi tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Kudus dapat dilihat dari jumlah penduduk sesuai jenjang pendidikan berdasarkan catatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus. Keberhasilan pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir dan budaya masyarakat terhadap minat dan apresiasi pendidikan. Animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi yang makin luas, sebagaimana terlihat pada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tertera dalam rincian tabel 1.6.

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023

Tingkat pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
Tidak/Belum Sekolah	207.199	215.520	225.946	235.344	242.423
Tidak/Belum Tamat SD	63.716	64.338	62.373	59.661	57.637
Tamat SD/sederajat	245.652	236.051	229.125	219.953	214.236
Tamat SLTP/sederajat	144.957	146.140	144.005	140.876	139.680

Tingkat pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
Tamat SLTA/ sederajat	154.220	157.367	157.921	161.995	167.016
Akademi / Sarjana	44.311	46.553	47.835	50.250	52.439
Jumlah Penduduk	860.055	865.969	867.205	868.079	873.431

Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2023 (Dinas Dukcapil)

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa jenjang pendidikan yang paling banyak di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 adalah pada jenjang Tidak/Belum Sekolah yaitu 242.423 penduduk. Jumlah penduduk yang lulus SLTA/Sederajat lebih banyak daripada penduduk yang lulus SLTP/ Sederajat, Diploma maupun Strata. Banyaknya jumlah lulusan SLTA/Sederajat tersebut menggambarkan berhasilnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2023 jumlah penduduk yang berpendidikan Akademi/ Sarjana mengalami peningkatan 2.189 orang atau naik 4,36 % dibandingkan tahun 2022.

3. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam kurun waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk dinyatakan dalam bentuk persentase dari jumlah penduduk dasar tahun sebelumnya.

Di Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tampak pertumbuhan penduduk berada di kisaran 0,10 % sampai dengan 1,17 %, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.8 di bawah ini.

Tabel 1.8

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah	Laju Pertumbuhan
2019	860.055	1,01
2020	865.969	0,69
2021	867.205	0,14
2022	868.079	0,10
2023	873.431	0,61

Diolah dari : DKB semester 2 tahun 2022 (Dinas Dukcapil)

Terlihat pada tabel di atas bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun terus bertambah.

4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil per 31 Desember 2023 pada Pemerintah Kabupaten sebanyak 6.484, menurun dibandingkan keadaan pada akhir Tahun 2022 sebesar 6.486 orang Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian rasio antara jumlah pegawai dan jumlah penduduk pada Tahun 2023 sebesar 0,74 persen.

Kondisi ini belum ideal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mengingat sebagaimana pernah diungkapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sedikitnya rasio Pegawai Negeri Sipil di daerah dan jumlah penduduk adalah 1,5%

Adapun penyebaran Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus tergambar pada tabel 1.9 di bawah ini yang menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil di setiap Perangkat Daerah Kerja.

Tabel 1.9
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

NO	OPD / UNIT KERJA	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	6
2	Bagian Hukum	11
3	Bagian Perekonomian	9
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	9
5	Bagian Organisasi	11
6	Bagian Umum	29
7	Sekretariat DPRD	26
8	Badan Perenc. Pemb. Penelitian & Pengemb. daerah	30
9	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	67
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	44
11	Inspektorat	43
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	32
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	135
14	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	41
15	Dinas Pertanian dan Pangan	86
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23
18	Dinas Perdagangan	111
19	Satuan Polisi Pamong Praja	47
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24
22	Dinas Perhubungan	74

NO	OPD / UNIT KERJA	JUMLAH
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	23
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	40
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	25
26	Kecamatan Kota Kudus	20
27	Kelurahan Purwosari	8
28	Kelurahan Sunggingan	8
29	Kelurahan Panjunan	9
30	Kelurahan Wergu Wetan	11
31	Kelurahan Wergu Kulon	8
32	Kelurahan Mlati Kidul	8
33	Kelurahan Mlatinorowito	8
34	Kelurahan Kerjasan	8
35	Kelurahan Kajeksan	7
36	Kecamatan Jekulo	18
37	Kecamatan Gebog	19
38	Kecamatan Dawe	22
39	Kecamatan Kaliwungu	16
40	Kecamatan Jati	16
41	Kecamatan Undaan	16
42	Kecamatan Mejobo	20
43	Kecamatan Bae	16
44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20
46	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	29
47	Bagian Administrasi Pembangunan	7
48	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	8
49	Bagian Pemerintahan	8
50	Dinas Kesehatan	79
51	UPTD Puskesmas Bae	29
52	UPTD Puskesmas Dawe	48
53	UPTD Puskesmas Dersalam	27
54	UPTD Puskesmas Gondosari	28
55	UPTD Puskesmas Gribig	41
56	UPTD Puskesmas Jati	37
57	UPTD Puskesmas Jekulo	47
58	UPTD Puskesmas Jepang	36
59	UPTD Puskesmas Kaliwungu	45
60	UPTD Puskesmas Mejobo	43
61	UPTD Puskesmas Ngembal Kulon	30
62	UPTD Puskesmas Ngemplak	28
63	UPTD Puskesmas Purwosari	33
64	UPTD Puskesmas Rejosari	45
65	UPTD Puskesmas Rendeng	28
66	UPTD Puskesmas Sidorekso	30
67	UPTD Puskesmas Tanjungrejo	40
68	UPTD Puskesmas Undaan	44
69	UPTD Puskesmas Wergu Wetan	30

NO	OPD / UNIT KERJA	JUMLAH
70	RSUD Dr. LOEKMONO HADI	474
71	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	186
72	SMP 1 Kudus	36
73	SMP 2 Kudus	40
74	SMP 3 Kudus	34
75	SMP 4 Kudus	34
76	SMP 5 Kudus	42
77	SMP 1 Bae	34
78	SMP 2 Bae	33
79	SMP 3 Bae	30
80	SMP 4 Bae	28
81	SMP 1 Dawe	25
82	SMP 2 Dawe	32
83	SMP 3 Dawe	7
84	SMP 1 Gebog	37
85	SMP 2 Gebog	38
86	SMP 1 Jati	44
87	SMP 2 Jati	34
88	SMP 1 Jekulo	32
89	SMP 2 Jekulo	37
90	SMP 3 Jekulo	31
91	SMP 1 Kaliwungu	35
92	SMP 2 Kaliwungu	35
93	SMP 1 Mejobo	38
94	SMP 2 Mejobo	39
95	SMP 1 Undaan	26
96	SMP 2 Undaan	33
97	Korwil Kecamatan Bae	245
98	Korwil Kecamatan Dawe	412
99	Korwil Kecamatan Gebog	355
100	Korwil Kecamatan Jati	286
101	Korwil Kecamatan Jekulo	416
102	Korwil Kecamatan Kaliwungu	297
103	Korwil Kecamatan Kota	268
104	Korwil Kecamatan Mejobo	313
105	Korwil Kecamatan Undaan	251
	Jumlah	6.484

Sumber: BKPP Kabupaten Kudus Tahun 2023

5. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah yang baik adalah pengelolaan pendapatan yang dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah yang berkelanjutan guna mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan kepada masyarakat. Kebijakan pengelolaan pendapatan

daerah tahun 2023 diarahkan pada optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendukung penguatan daya saing ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi. Strategi kebijakan pendapatan daerah tahun 2023 merupakan bauran kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan untuk membangun basis pendapatan yang kuat menuju keuangan daerah yang mandiri.

Kebijakan optimalisasi pendapatan daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing komponen pendapatan. Untuk kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan upaya-upaya perbaikan layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2023, kegiatan optimalisasi juga dilakukan melalui penyusunan peraturan daerah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP PDRD) dengan mengkaji ulang pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) di Kabupaten Kudus. Sebagai hasilnya, ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda PDRD). Secara rinci, kebijakan optimalisasi PAD dilaksanakan melalui beberapa langkah antara lain:

- 1) perluasan cakupan wilayah penegakan pemungutan pajak daerah untuk memenuhi harapan atas rasa keadilan wajib pajak;
- 2) penetapan harga yang wajar atas objek pajak;
- 3) pemberian insentif dan apresiasi kepada wajib pajak;
- 4) penggunaan teknologi informasi dan perluasan penerapan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah;
- 5) penguatan kapasitas pengelolaan pajak daerah; dan
- 6) perbaikan penyediaan layanan publik secara berkesinambungan kepada masyarakat.

Sedangkan kebijakan optimalisasi Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan atas kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan daerah sesuai peraturan perundangan-perundangan. Kedua, meningkatkan koordinasi dan menjaga kelancaran arus data dan komunikasi antara pusat dan daerah. Ketiga, melakukan rekonsiliasi data transfer untuk memastikan ketepatan alokasi dan penyaluran.

Realisasi total pendapatan daerah tahun 2023 (berdasarkan data SIMDA sebelum audit BPK) mencapai Rp. 2.276.162.193.662,00 atau sebesar 101,75% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.236.981.707.370,00. Pendapatan tersebut paling besar bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar Rp1.772.596.008.194,00, selanjutnya

PAD sebesar Rp.502.330.185.468,00 dan terakhir Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp1.236.000.000,00. Realisasi tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Kudus terhadap Pendapatan Transfer dengan proporsi sebesar 77,88% dari total pendapatan. Selanjutnya, kontribusi PAD adalah sebesar 22,07% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 0,05% Secara rinci, pendapatan daerah kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 1.10.

Tabel 1.10
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus TA 2023

JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	2.236.981.707.370	2.276.162.193.662	101,75
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	473.691.698.000	502.330.185.468	106,05
Pajak Daerah	174.288.764.000	183.825.346.945	105,47
Retribusi Daerah	31.303.382.000	28.747.093.038	91,83
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.971.340.000	9.971.341.235	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	258.128.212.000	279.786.404.250	108,39
Pendapatan Transfer	1.760.590.009.370	1.772.596.008.194	100,68
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.555.772.702.570	1.584.707.611.484	101,86
Dana Bagi Hasil (DBH)	322.139.145.847	344.830.065.539	107,04
Dana Alokasi Umum (DAU)	773.667.161.000	783.691.043.815	101,30
Dana Alokasi Khusus (DAK)	309.953.161.723	306.173.268.130	98,78
Dana Insentif Daerah (DID)	13.267.148.000	13.267.148.000	100,00
Dana Desa	136.746.086.000	136.746.086.000	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	204.817.306.800	187.888.396.710	91,73
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	192.414.306.800	175.714.575.710	91,32
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	12.403.000.000	12.173.821.000	98,15
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.700.000.000	1.236.000.000	45,78
Pendapatan Hibah	2.700.000.000	1.236.000.000	45,78
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.700.000.000	1.236.000.000	45,78

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data SIMDA per 24 Januari 2024)

6. Realisasi belanja menurut jenis belanja

Kebijakan Belanja diprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Kebijakan pelaksanaan belanja oleh Pemerintah Kabupaten Kudus disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Adapun target dan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.2.625.194.437.466, dan pada akhir tahun anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp.2.384.900.384.445 atau mencapai 90,85%. Adapun komposisi realisasi belanja dapat dilihat pada Tabel 1.11. berikut :

Tabel 1.11
Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1.	Belanja Operasi	1.902.446.306.036	1.683.683.519.535	88,50
2.	Belanja Modal	437.274.666.807	418.666.691.470	95,74
3.	Belanja Tak Terduga	5.233.453.623	2.366.476.700	45,22
4.	Belanja Transfer	280.240.011.000	280.183.696.740	99,98
Jumlah		2.625.194.437.466	2.384.900.384.445	90,85

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 24 Januari 2024)

Tampak dari perbandingan antara rencana Anggaran dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kudus dengan kemampuan pendapatan sebesar Rp. 2.276.162.193.662 dengan kewajiban untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp. 2.384.900.384.445, maka terjadi kondisi defisit anggaran yang mencapai Rp.(240.294.053.021). Keadaan defisit tersebut selanjutnya ditutup dari pembiayaan Pemerintah.

7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Yang pada intinya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Struktur Pembiayaan

Sedangkan dilihat dari strukturnya, sisi pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, mencakup:

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
- b. Pengeluaran Pembiayaan
 - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Adapun Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.12 di bawah ini:

Tabel 1.12
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2023

No	Uraian Pendapatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PEMBIAYAAN DAERAH			
1	Penerimaan Pembiayaan	390.912.730.096	390.912.730.096	100
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	390.912.730.096	390.912.730.096	100
2	Pengeluaran Pembiayaan	2.700.000.000	1.236.000.000	45,78
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.700.000.000	1.236.000.000	45,78
	Pembiayaan Netto	388.212.730.096	389.676.730.096	100,38

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 24 Januari 2024)

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran APBD. Pada tanggal 28 Desember 2022, ditetapkan Perda Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Menindaklanjuti Perda tersebut, pada tanggal 29 Desember 2022 ditetapkan Perbup Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Setelah Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik disetujui, pada tanggal 01 Februari 2023 Perbup Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus No 59 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang juga menampung Bantuan Keuangan dari Provinsi, DAK Fisik dan Non Fisik Pertanian, Dak Fisik Pendidikan Bidang SD, Pergeseran antar belanja (Cukai). Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan.

1. Peraturan Bupati Kudus pada tanggal 28 Maret 2023 Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus No 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang juga Menampung Hibah Pilkada, Pergeseran BTT ke Dinas PUPR dan Kecamatan Dawe, Anggaran BOS (Reguler), Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (Reguler) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Reguler);
2. Peraturan Daerah tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 02 Tahun 2023 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Bupati Kudus tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Bupati Kudus pada tanggal 21 November 2023 Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus No 66 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 yang juga menampung Perubahan Bantuan Keuangan provinsi dan Tambahan Dana Desa (PMK No 98 Tahun 2023).

2.2 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dilakukan untuk mendukung ketersediaan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan tersebut ditujukan agar kebutuhan dana pembangunan dapat terpenuhi secara mandiri. Dengan kata lain, Pemda dapat mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan PAD dan tidak tergantung kepada pendapatan transfer dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (kemandirian fiskal daerah). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah daerah perlu menjamin adanya sumber-sumber pendapatan yang cukup dan tumbuh berkelanjutan (sustainable revenue growth) dalam rangka mendanai berbagai kebutuhan daerah.

2.3 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN

UU HKPD memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah. Hal ini karena salah satu tujuan UU HKPD adalah meningkatkan kemandirian fiskal daerah yang diwujudkan dalam kebijakan opsen pajak yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah. Selain itu, Pemda lebih leluasa dalam hal pemungutan atas PDRD yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Sebaliknya, Pemda dilarang melakukan pungutan di luar yang ditetapkan dalam UU tersebut.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, Pemda melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan. Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif, tetapi belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang sudah tercatat atau terdaftar serta hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

Pada tahun 2023, Pemkab Kudus melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Hal-hal yang telah dilakukan tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pajak daerah antara lain:

1. Sosialisasi dan edukasi PDRD;
2. Penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB-P2 secara selektif agar lebih mendekati harga pasar;
3. Penyesuaian harga dasar dan nilai perolehan untuk Pajak Air Tanah;
4. Penyusunan kajian optimalisasi pendapatan asli daerah;
5. Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah;

6. Penagihan dan penertiban pajak daerah;
7. Pengelolaan piutang pajak daerah;
8. Pemutakhiran dan pemeliharaan sistem informasi pajak daerah; dan
9. Optimalisasi pemanfaatan alat pemantau transaksi pajak secara elektronik.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan terkait optimalisasi retribusi daerah adalah:

1. Memberikan pelayanan publik sesuai SPM;
2. Sosialisasi, pembinaan, pendampingan, dan pemantauan atas kegiatan pemungutan retribusi;
3. Menyusun kajian potensi bekerja sama dengan instansi lain;
4. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal;
5. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada;
6. Melakukan penagihan piutang;
7. Melakukan penertiban dan penegakan hukum;
8. Perbaikan dan pemutakhiran pengelolaan basis data; dan
9. Penerapan metode pembayaran nontunai, termasuk implementasi pembayaran QRIS pada beberapa titik parkir.

Optimalisasi pendapatan yang bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dilakukan melalui kebijakan antara lain pembinaan pengelolaan BUMD, pengawasan kinerja manajemen BUMD, dan penambahan penyertaan modal pada BUMD. Sedangkan untuk akun lain-lain PAD yang sah, beberapa langkah yang dilakukan antara lain optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Langkah-langkah optimalisasi untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan dengan cara koordinasi, perbaikan dan rekonsiliasi data. Hal ini dilakukan antara lain dengan cara pemenuhan persyaratan penggunaan dana dan pelaporan secara tepat waktu. Selain itu, dilakukan juga konsultansi dan audiensi terkait kebijakan dana transfer ke daerah (TKD) untuk memastikan kepatuhan atas peraturan yang telah ditentukan.

2.4 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Tabel 2.1 diketahui bahwa target PAD ditetapkan sebesar Rp473.691.698.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp502.330.185.468,00 atau 106,05 %. Secara umum, penerimaan PAD dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan untuk semua jenis pendapatan. Komponen lain-lain PAD

yang sah memiliki capaian tertinggi sebesar 108,39%, disusul kemudian pajak daerah (105,47%), hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (100,00%), dan terakhir retribusi daerah (91,83%).

Adapun berdasarkan kontribusi masing-masing jenis PAD sebagaimana pada Tabel 2.2 di bawah ini, struktur PAD Kabupaten Kudus TA 2023 didominasi oleh lain-lain PAD yang sah (55,70%) disusul pajak daerah sebesar 36,59%, retribusi daerah sebesar 5,72%, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 1,99%.

Tabel 2.1
Kontribusi Masing-Masing Jenis PAD Kab Kudus TA 2023

JENIS PENERIMAAN	REALISASI	%
Pajak Daerah	183.825.346.945	36,59
Retribusi Daerah	28.747.093.038	5,72
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.971.341.235	1,99
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	279.786.404.250	55,70
Jumlah PAD	502.330.185.468	100,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data SIMDA per 24 Januari 2024) diolah

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah dalam APBD TA 2023 ditetapkan sebesar Rp174.288.764.000,00. Realisasi pendapatan pajak daerah adalah sebesar Rp183.825.346.945,00 atau melampaui target dengan capaian sebesar 105,47%. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain peningkatan NJOP PBB P2 secara selektif, pemutakhiran sistem informasi pajak daerah, pemantauan transaksi pajak secara elektronik, penyesuaian harga dasar air tanah, sosialisasi, pemeriksaan, dan penagihan.

Selain upaya ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan, capaian realisasi pajak daerah juga didukung pertumbuhan ekonomi lokal dan secara khusus perkembangan bisnis kuliner. Berkembangnya berbagai outlet merek restoran global dan nasional menyumbang kenaikan yang signifikan pada pajak restoran. Begitu juga pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan meningkatnya mobilitas sosial masyarakat mendukung pertumbuhan pajak daerah yang berbasis konsumsi sebagaimana terjadi pada pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak air tanah. Tingginya transaksi jual beli tanah juga menyumbang kenaikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) termasuk Kebijakan pembebasan denda PBB-P2 juga turut mendukung tercapainya target tahun 2023.

Table 2.2
Capaian Pendapatan Pajak Daerah Kab Kudus TA 2023

JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pajak Hotel	3.568.838.000	3.875.729.018	108,60
Pajak Restoran	15.527.742.000	16.511.971.209	106,34
Pajak Hiburan	833.549.000	741.998.813	89,02
Pajak Reklame	3.600.360.000	3.703.554.532	102,87
Pajak Penerangan Jalan	60.418.882.000	64.438.786.686	106,65
Pajak Parkir	499.456.000	602.126.671	120,56
Pajak Air Tanah	4.229.251.000	4.344.721.258	102,73
Pajak Sarang Burung Walet	4.361.000	9.797.500	224,66
PBB-P2	43.000.000.000	45.231.592.104	105,19
BPHTB	42.606.325.000	44.365.069.154	104,13
JUMLAH	174.288.764.000	183.825.346.945	105,47

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data SIMDA per 24 Januari 2024) diolah

b. Retribusi Daerah

Dari target sebesar Rp31.303.382.000,00 retribusi daerah tahun 2023 terealisasi sebesar Rp28.747.093.038,00 atau 91,83%. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Tabel 2.3
Capaian Hasil Retribusi Daerah Kab. Kudus TA 2023

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Retribusi Jasa Umum	11.319.847.615	9.771.722.465	86,32
Retribusi Jasa Usaha	17.189.282.885	14.461.289.253	84,13
Retribusi Perizinan Tertentu	2.794.251.500	4.514.081.320	161,55
TOTAL	31.303.382.000	28.747.093.038	91,83

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data SIMDA per 24 Januari 2024) diolah

Retribusi jasa umum dari target Rp11.319.847.615,00 dapat terealisasi sebesar Rp9.771.722.465,00 atau sebesar 86,32% dari target. Dari 8 (delapan) jenis retribusi jasa umum terdapat 3 (tiga) jenis retribusi yang mencapai target, yaitu pelayanan pasar (105,46%), pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran (109,94%), dan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi (130,63%). Adapun 5 (lima) jenis yang tidak mencapai target, yaitu pelayanan persampahan/kebersihan (75,35%), pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat (0%), pelayanan parkir di tepi jalan umum (65,81%), pengujian kendaraan bermotor (57,50%), pelayanan tera/tera ulang (96,08%). Beberapa jenis penerimaan retribusi tidak memenuhi target disebabkan masa transisi diberlakukannya UU HKPD, sehingga retribusi tersebut tidak boleh dipungut lagi pada tahun 2024.

Tabel 2.4
Capaian Hasil Retribusi Jasa Umum Kabupaten Kudus TA 2023

JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.846.175.311	2.898.210.819	75,35
Pelayanan Pemakaman	1.000.000	-	-
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.466.750.000	965.195.000	65,81
Pelayanan Pasar	4.641.690.804	4.895.279.896	105,46
Pengujian Kendaraan Bermotor	954.478.000	548.780.000	57,50
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	50.097.500	55.075.250	109,94
Pelayanan Tera/Tera Ulang	175.500.000	168.621.500	96,08
Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	184.156.000	240.560.000	130,63
JUMLAH	11.319.847.615	9.771.722.465	86,32

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data SIMDA per 24 Januari 2024) diolah

Untuk retribusi jasa usaha dari target sebesar Rp17.189.282.885,00 dapat terealisasi sebesar Rp14.461.289.253,00 atau sebesar 84,13%. Terdapat 4 (empat) jenis yang mencapai target adalah pelayanan terminal (100,08), pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa (127,69%), pelayanan rumah potong hewan (100,36%), dan pelayanan tempat rekreasi dan olah raga (125,03%). Adapun 3 (tiga) jenis retribusi jasa usaha yang tidak memenuhi target, yaitu pelayanan pemakaian kekayaan daerah (74,31%), pelayanan tempat khusus parkir (99,97%), dan penjualan produksi usaha daerah (86,76%). Hasil retribusi jasa usaha yang terinci sebagaimana Tabel 2.5.

Table 2.5
Capaian Hasil Retribusi Jasa Usaha Kab. Kudus TA 2023

JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah	12.990.547.600	9.653.448.502	74,31
Pelayanan Terminal	150.849.000	150.963.600	100,08
Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.526.660.285	1.526.260.000	99,97
Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	210.770.000	269.125.000	127,69
Pelayanan Rumah Potong Hewan	51.860.000	52.047.000	100,36
Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.220.902.000	2.776.742.651	125,03
Pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah	37.694.000	32.702.500	86,76
JUMLAH	17.189.282.885	14.461.289.253	84,13

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data SIMDA per 24 Januari 2024) diolah

Retribusi perizinan tertentu ditargetkan sebesar Rp2.794.251.500,00 dapat terealisasi sebesar Rp4.514.081.320,00 atau sebesar 161,55% dari target yang telah ditetapkan. Tingginya capaian retribusi perizinan tertentu disebabkan adanya transisi sebelum diterapkannya Persetujuan Bangunan Gedung pada tahun 2024. Hasil retribusi perizinan tertentu yang terinci sebagaimana Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Capaian Hasil Retribusi Perizinan Tertentu Kab. Kudus TA 2023

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.789.251.500	4.506.281.320	161,56
Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	5.000.000	7.800.000	156,00
TOTAL	2.794.251.500	4.514.081.320	161,55

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data SIMDA per 24 Januari 2024) diolah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp9.971.340.000,00 dari target sebesar Rp9.971.340.000,00 atau sebesar 100,00% dari target yang telah ditetapkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta yang terinci sebagaimana Tabel 2.7.

Table 2.7
Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Kabupaten Kudus TA 2023

JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PT. BPR BKK Kudus (Perseroda)	714.419.000	714.419.099	100,00
PT. Bank Jateng	6.850.258.000	6.850.258.466	100,00
Perumda Tirta Muria	2.348.166.000	2.348.166.377	100,00
PD Percetakan	58.497.000	58.497.293	100,00
JUMLAH	9.971.340.000	9.971.341.235	100,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data SIMDA per 24 Januari 2024) diolah

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD Yang Sah terealisasi sebesar Rp.215.690.965.878,00 dari target sebesar Rp.208.432.915.000,00 atau sebesar 103,48% dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Capaian Lain-Lain PAD Yang Sah Kab Kudus TA 2023

JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	738.000.000	863.459.646	117,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	75.000.000	n.a
Hasil Penjualan Aset Lainnya	26.360.000	95.311.999	361,58
Hasil Kerja Sama BMD	120.000.000	161.334.600	134,45
Jasa Giro pada Kas Daerah	2.106.649.000	1.743.539.093	82,76
Pendapatan Bunga	14.710.358.000	13.258.689.974	90,13
Pendapatan Denda atas Keterlambatan	43.477.000	60.238.746	138,55
Pendapatan Denda Pajak Daerah	161.183.000	398.296.911	247,11
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	5.000.000	37.777.887	755,56
Pendapatan dari Pengembalian	1.013.922.000	486.228.175	47,96
Pendapatan BLUD	239.203.263.000	261.992.335.503	109,53
Lain-lain PAD Yang Sah Lain	-	614.191.716	n.a
JUMLAH	258.128.212.000	279.786.404.250	108,39

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data SIMDA per 24 Januari 2024) diolah

Realisasi lain-lain PAD yang sah 2023 menyumbang kontribusi terbanyak atas kenaikan PAD. Komponen terbesar Lain-lain PAD yang sah dari Pendapatan BLUD, terbesar dari RSUD Dr. Loekmonohadi. Tingginya pendapatan BLUD merupakan dampak dihapusnya mekanisme rujukan berjenjang dalam BPJS Kesehatan. Pendapatan BLUD mencapai Rp261.992.335.503,00 atau sebesar 109,53%.

2.5 PENDAPATAN TRANSFER

Pada tahun 2023 target pendapatan transfer ditetapkan sebesar Rp1.760.590.009.370,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.772.596.008.194,00 atau sebesar 100,68%. Target penerimaan ini terdiri pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat yang ditargetkan sebesar Rp1.555.772.702.570,00 terealisasi sebesar Rp1.584.707.611.484,00 atau sebesar 101,86%. Tingginya realisasi ini disumbang oleh tingginya realisasi dana bagi hasil yang mencapai 107,04%. Realisasi pendapatan transfer yang melebihi target khususnya pada akun dana bagi hasil sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama juga dialami pendapatan transfer antar daerah yang terealisasi 91,73% atau sebesar Rp187.888.396.710,00 dari target sebesar Rp204.817.306.800,00. Rendahnya realisasi pendapatan transfer antar daerah bersumber baik dari pendapatan bagi hasil pajak provinsi dan bantuan keuangan yang tidak mencapai target.

Tabel 2.9 3
Capaian Pendapatan Transfer Kab Kudus TA 2023

JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.555.772.702.570	1.584.707.611.484	101,86
Dana Bagi Hasil (DBH)	322.139.145.847	344.830.065.539	107,04
DAU	773.667.161.000	783.691.043.815	101,30
Dana Alokasi Khusus	309.953.161.723	306.173.268.130	98,78
DID	13.267.148.000	13.267.148.000	100,00
Dana Desa	136.746.086.000	136.746.086.000	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	204.817.306.800	187.888.396.710	91,73
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	192.414.306.800	175.714.575.710	91,32
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	12.403.000.000	12.173.821.000	98,15
JUMLAH	1.760.590.009.370	1.772.596.008.194	100,68

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data SIMDA per 24 Januari 2024) diolah

2.6 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebesar Rp1.236.000.000,00 dari target sebesar Rp2.700.000.000,00 atau sebesar 45,78% dari target yang ditetapkan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah. Pendapatan Hibah ini merupakan skema hibah sesuai PP 2/2012 yang diperoleh sebagai bagian dari penguatan PDAM melalui insentif pemasangan sambungan rumah (SR) untuk masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR). Pendapatan ini selanjutnya diteruskan sebagai penanaman modal pemerintah daerah kepada PDAM. Tidak tercapainya target penerimaan ini karena pemasangan SR yang masih di bawah target yang ditetapkan dalam perjanjian hibah daerah.

Tabel 2.10
Capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Kudus TA 2023

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
Pendapatan Hibah	2.700.000.000	1.236.000.000	45,78
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.700.000.000	1.236.000.000	45,78
TOTAL	2.700.000.000	1.236.000.000	45,78

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data SIMDA per 24 Januari 2024) diolah

2.7 ANGGARAN DAN REALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PER URUSAN

Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka dianggarkan alokasi belanja bagi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis masing-masing urusan pemerintahan.

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk belanja dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun 2023 sebesar Rp.2.625.194.437.466,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 2.384.900.384.445,00 atau mencapai 90,85%.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2023 tersebut tersebar untuk membiayai pelaksanaan 32 (Tiga Puluh Dua) Urusan ditambah Fungsi Penunjang Urusan, terbagi menjadi 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar, 18 (Delapan Belas) Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dan 8 (Delapan) Urusan Pilihan serta Fungsi Penunjang Urusan. Adapun komposisi realisasi belanja per urusan dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut ini:

Tabel 2.11
Anggaran Dan Realisasi Belanja Per Urusan TA 2023

NO	URUSAN	ANGGARAN DAN REALISASI		
		Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	%
A	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.608.699.164.847	1.444.860.757.037	89,82
1.	Pendidikan	582.373.331.659	593.880.776.019	86,55
2.	Kesehatan	557.276.606.575	546.077.477.334	82,17
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	184.045.921.265	96.908.401.244	94,75
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25.189.875.096	60.184.902.690	94,97
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	18.705.979.107	13.792.607.961	90,53
6.	Sosial	77.269.043.335	97.526.879.302	95,88
B	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	220.768.214.050	209.048.935.091	94,69
7.	Tenaga Kerja	17.618.772.643	14.947.991.289	66,44
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	657.104.477	500.920.109	77,03
9.	Pangan	452.495.246	424.321.770	99,37
10.	Pertanahan	549.998.650	342.478.300	65,04
11.	Lingkungan Hidup	14.545.405.216	14.191.210.437	95,39
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.340.245.568	8.860.086.720	93,33
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.326.806.114	15.423.408.521	85

NO	URUSAN		ANGGARAN DAN REALISASI		
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	%
	14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.939.173.940	6.751.875.650	38,77
	15.	Perhubungan	65.212.684.254	62.629.292.667	93,99
	16.	Komunikasi & Informatika	35.471.295.739	34.291.621.804	96,18
	17.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	3.832.471.112	3.614.842.056	82,26
	18.	Penanaman Modal	5.203.173.652	4.754.560.889	85,67
	19.	Kepemudaan dan Olahraga	18.841.125.169	18.773.435.642	98,16
	20.	Statistik	136.036.000	97.469.310	85,02
	21.	Persandian	52.033.010	32.829.667	41,78
	22.	Kebudayaan	18.890.556.254	17.998.445.173	94,39
	23.	Perpustakaan	5.367.149.666	5.100.168.730	99,61
	24.	Kearsipan	331.687.340	313.976.357	91,72
C	Urusan Pilihan		90.193.544.604	81.471.010.531	90,33
	25.	Kelautan dan Perikanan	194.999.080	178.952.639	96,62
	26.	Pariwisata	5.400.360.800	5.187.173.179	91,79
	27.	Pertanian	29.765.769.220	28.443.591.704	93,79
	28.	Kehutanan	15.000.000	15.000.000	96
	29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1.950.000	1.480.000	100
	30.	Perdagangan	26.524.128.269	23.085.157.462	77,71
	31.	Perindustrian	28.288.338.235	24.556.656.547	14,82
	32.	Transmigrasi	2.999.000	2.999.000	100
D	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		705.533.513.965	649.519.681.786	92,06
	33.	Administrasi Pemerintahan	155.480.618.953	134.910.197.036	94,44
	34.	Pengawasan	10.112.047.715	9.278.158.579	92,54
	35.	Perencanaan	11.759.447.635	10.191.689.035	92,5
	36.	Keuangan	316.872.862.372	309.838.598.646	95,45
	37.	Kepegawaian	15.659.612.856	13.635.713.485	87,8
	38.	Pendidikan dan Pelatihan	1.690.717.000	1.469.518.805	68,51
	39.	Penelitian dan Pengembangan	831.600.000	494.075.113	95,72
	40.	Sekretariat DPRD	95.182.188.176	75.935.587.850	77,69
	41.	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	69.198.188.411	65.718.408.073	95,59
	42.	Kesatuan Bangsa dan Politik	28.746.230.847	28.047.735.164	95,13
	JUMLAH BELANJA		2.625.194.437.466	2.384.900.384.445	90,85

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 24 Januari 2024)

2.8 PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENGELOLAAN KEUANGAN

Permasalahan

Terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah TA 2023 di Kabupaten Kudus yang dapat diidentifikasi antara lain:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya;
- 2) Tingginya selisih NJOP PBB-P2 dibandingkan dengan harga pasar;
- 3) Rendahnya tingkat literasi digital dalam pengelolaan PDRD;
- 4) Pengelolaan data dan sistem informasi PDRD yang kurang memadai;
- 5) Pengendalian dan pengawasan pengelolaan PDRD kurang memadai;
- 6) Pengelolaan BUMD yang kurang optimal;
- 7) Pemanfaatan aset daerah kurang optimal;
- 8) Pengelolaan pendapatan transfer kurang optimal; dan
- 9) Kapasitas sumber daya yang terbatas.

Alternatif Solusi

Dari rumusan masalah yang teridentifikasi, terdapat beberapa alternatif solusi yang diupayakan dalam rangka menyikapi permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Mengadakan penyuluhan, sosialisasi, edukasi, layanan konsultasi, dan pembinaan secara berkesinambungan dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar PDRD;
- 2) Melakukan penyesuaian NJOP PBB-P2 lebih mendekati harga pasar;
- 3) Memperluas cakupan digitalisasi pendapatan daerah;
- 4) Melakukan pemutakhiran data dan mengembangkan sistem informasi sebagai bagian sistem pendukung keputusan;
- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam meningkatkan pengendalian dan pengawasan transaksi perpajakan daerah;
- 6) Memperkuat pembinaan dan pengawasan BUMD;
- 7) Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- 8) Melakukan koordinasi yang lebih baik terkait dana-dana transfer dan mengidentifikasi variabel-variabel penghitungan alokasi untuk memproyeksikan pendapatan transfer ke depan; dan
- 9) Mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya secara berkelanjutan.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensi sebuah negara kesatuan, diperlukan adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah diselenggarakan diantaranya melalui asas desentralisasi. Sedangkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan umum dapat didistribusikan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Dalam rangka desentralisasi, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 9 ayat (4) yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Lebih jauh dijabarkan pada Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren pada pasal 11 ayat (1) bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Selanjutnya pembagian kewenangan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ditindaklanjuti dengan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib sejumlah 24 Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 6 (Enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 18 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selain urusan wajib sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten juga memiliki opsi untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan sebanyak 8 Urusan Pemerintahan Pilihan. Adapun pelaksanaan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan adalah sebagai berikut:

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Penjabaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Kudus tertuang dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus. Selanjutnya capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana di bawah ini, yang antara lain memuat:

- Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan Pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung Pemerintahan sesuai target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.
- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

RINGKASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Wajib yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus meliputi 24 Jenis Urusan yang terdiri dari 6 (enam) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta 18 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Khusus untuk capaian penyelenggaraan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pelaporannya juga disampaikan melalui Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus terdiri atas Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Sosial, serta Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Selanjutnya penyelenggaraan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

3.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

(* dalam ribu rupiah)

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			187.977.135	187.977.135	94,80%	Realisasi Anggaran pada Sub Kegiatan yang Sumber Dana dari APBN (BOP PAUD, Dikmas, BOS SD dan SMP) yang pencairan langsung ke sekolah/lembaga sehingga dalam penSPJan menunggu Rekonsiliasi dari Pemerintah Pusat	Menjadikan tahun 2023 sebagai evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dengan mengoptimalkan capaian kinerja dan penyerapan anggaran agar tercapai target tahun 2024		
				Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	%	114	114	100%				
				Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	%	101	101	100%				
				APK PAUD	%	70,06	70,06	100%				
				APK Pendidikan Kesetaraan	%	1,42	1,42	100%				
				APK SD/MI	%	101	101	100%				
				APK SMP/MTs	%	114	114	100%				
				APM SD/MI/Paket A	%	90	90	100%				
				APM SMP/MTs/Paket B	%	97,97	97,97	100%				
				Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	orang	1612	1612	100%				
				Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	orang	23041	23041	100%				
				Persentase sekolah terakreditasi A	%	74	74	100%				
				Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi	%	95	95	100%				
				Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi	%	90	90	100%				
				Persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik	%	70	70	100%				
				Persentase pendidik pendidikan non formal yang bersertifikat pendidik	%	38	38	100%				
				Persentase Sarpras Pendidikan Dasar Dalam Kondisi Baik	%	95	95	100%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
				Rata - rata kemampuan Literasi SD	%	2,07	2,07	100%			
				Rata-rata kemampuan Literasi SMP	%	2,03	2,03	100%			
				Rata - rata kemampuan Numerasi SD	%	1,91	1,91	100%			
				Rata-rata kemampuan Numerasi SMP	%	1,99	1,99	100%			
				Persentase akses dan mutu pendidikan (IKU)	%	88	88	100%			
				Presentase sarpras Pendidikan non formal dalam kondisi baik	%	95	95	100%			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			111.498.413	106.303.780	95,34%			
				Meningkatkan akreditasi satuan pendidikan dasar, kompetensi pendidiknya, sarpras, dan pemenuhan BOS	sub kegiatan	13	13	100%			
			Penambahan Ruang Kelas Baru			400.000	397.935	99,48%			
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	2	2	100%			
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			2.545.858	2.544.267	99,94%			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Dibangun	Ruang	13	13	100%			
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.238.093	1.238.093	100,00%			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	17	17	100%			
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah			2.658.448		99,86%			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Dibangun	Ruang	14	14	100%			
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			3.004.484	2.998.553	99,80%			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	21	21	100%			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas			15.338.953	15.255.322	99,45%			
				Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	110	110	100%			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			2.283.828	2.268.073	99,31%			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	14	14	100%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	2	100%			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			912.092	905.004	99,22%			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	7	7	100%			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			3.136.754	3.109.885	99,14%			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	21	21	100%			
			Pengadaan Mebel Sekolah			1.595.925	1.564.712	98,04%			
				Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	93	93	100%			
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			3.375.000	3.361.500	99,60%			
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	27	27	100%			
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			250.000	141.246	56,50%			
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	422	422	100%			
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar			500.000	411.572	82,31%			
				Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	422	422	100%			
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			357.550	290.286	81,19%			
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1000	1000	100%			
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			5.376.190	4.467.826	83,10%			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	193	193	100%			
				Jumlah Penerima Honararium Kesejahteraan Guru non ASN dalam satu tahun	Orang/Kali	15444	8787	57%			
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
				Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	422	422	100%			
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	sekolah	423	423	100%			
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			10.195.402	9.680.020	94,94%			
				Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	422	422	100%			
				jumlah sekolah penerima BOS APBD	Sekolah	600	600	100%			
			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			6.732.099	6.732.099	100,00%			
				Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	33	33	100%			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			45.270.160	41.197.462	91,00%			
				Meningkatkan akreditasi satuan pendidikan dasar, kompetensi pendidiknya, sarpras, dan pemenuhan BOS	sub kegiatan	9	9	100%			
			Pembangunan Laboratorium			1.000.665	1.000.665	100,00%			
				Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	1	1	100%			
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			2.090.424	2.088.279	99,90%			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	1	100%			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			2.385.012	2.363.919	99,12%			
				Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	6	100%			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			469.099	466.840	99,52%			
				Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	1	100%			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			102.980	102.980	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	1	100%			
			Pengadaan Mebel Sekolah			176.425	175.912	99,71%			
				Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	5	5	100%			
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			360.000	351.600	97,67%			
				Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	600	586	98%			
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			1.000.000	996.632	99,66%			
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	8	8	100%			
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			100.000	73.951	73,95%			
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Siswa	0	0	0%			
				jumlah smp pelaksana assesmen	Sekolah	51	51	100%			
				jumlah smp yang berhasil sinkron dapodik	Sekolah	51	51	100%			
				jumlah sekolah yang menerapkan ikm	Sekolah	51	51	100%			
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			200.000	156.779	78,39%			
				Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	sekolah	0	0	0%			
				jumlah sekolah penggerak smp	sekolah	20	20	100%			
				jumlah rekomendasi ijin pendirian sekolah	sekolah	2	2	100%			
				jumlah sekolah yang mengikuti pendampingan ektraskurikuler	Sekolah	51	51	100%			
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			222.105	165.560	74,54%			
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	500	500	100%			
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.461.450	1.213.622	83,04%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	2135	2135	100%			
				Jumlah Penerima Honorarium Kesejahteraan Guru non ASN dalam satu tahun	Orang/Kali	4284	2529	59%			
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			125.000	102.642	82,11%			
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Sekolah	0	0	0%			
				Jumlah sekolah ramah anak	Sekolah	51	51	100%			
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			27.955.210	24.460.436	87,50%			
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	51	51	100%			
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			7.621.790	7.477.645	98,11%			
				Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	30	30	100%			
				jumlah sekolah penerima BOS APBD	Sekolah	100	100	100%			
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			27.258.103	26.762.549	98,18%			
				Dokumen Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dokumen	4	4	100%			
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			2.150.000	2.150.000	100,00%			
				Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Lembaga	7	7	100%			
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			1.586.729	1.586.729	100,00%			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun	Lembaga	7	8	114%			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			570.000	570.000	100,00%			
				Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi sedang/berat	Lembaga	12	12	100%			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			940.000	940.000	100,00%			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah direhabilitasi sedang/berat	Lembaga	13	14	108%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD			175.000	174.372	99,64%			
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	4	4	100%			
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD			10.000	9.965	99,65%			
				Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	222	222	100%			
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			7.498.485	7.023.081	93,66%			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	595	595	100%			
				Jumlah Pendidik yang mendapatkan tunjangan Honorarium Peningkatan Kesejahteraan	Orang/Tahun	17675	18060	102%			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	6	6	100%			
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			400.000	392.423	98,11%			
				Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	442	442	100%			
			Pengelolaan Dana BOP PAUD			13.927.890	13.915.979	99,91%			
				Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	408	436	107%			
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			3.950.459	3.930.706	99,50%			
				Persentase akses dan mutu pendidikan (Persentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi baik (IKU)	%	0	0	0%			
				Persentase akses dan mutu pendidikan (IKU)	%	9	9	100%			
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan			29.999	21.978	73,26%			
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	60	60	100%			
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			27.999	22.128	79,03%			
				Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	16	18	113%			
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			25.000	20.690	82,76%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
			Nonformal/Kesetaraan								
				Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	16	18	113%			
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			3.867.460	3.865.910	99,96%			
				Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	18	18	100%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN					94.933.037	94.933.037	90,37%	Adanya anggaran katrid TCM oleh Kemenkes RI yang dipindahkan ke seksi yankes tetapi tidak dipergunakan karena keterbatasan waktu dan sudah adanya anggaran dari APBD, Adanya sisa pembelian belanja Rapid HIV/Sifilis Duo dikarenakan SSH Kabupaten Kudus melebihi harga tertinggi rapid di pasaran,Adanya menu pada ASB yang tidak dapat direalisasikan maksimal saat pelaksanaan kegiatan dan adanya pembelian belanja modal yang tidak dapat direalisasikan karena harga jenis barang sesuai spesifikasi pada SIPD sudah melebihi SSH yang tertera	Capaian 2023 beberapa Subkegiatan tidak mencapai target kinerja, KInerja tahun 2024 agar ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			91.779.943	83.130.064	90,58%			
				Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	%	100	100	100%			
				Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	%	100	100	100%			
				Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	%	100	100	100%			
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun	%	18	16,8	93%			
				Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	persen	100	100	100%			
				Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	persen	93	93	100%			
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			28.611.892	26.048.121	91,04%			
				Jumlah penyediaan fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Puskesmas	19	19	100%			
			Pengembangan Rumah Sakit			1.260.152	1.106.751	87,83%			
				Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	1	100%			
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			10.084.138	9.838.457	97,56%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	8	8	100%			
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			19.980	88.192	441,40%			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	1	1	100%			
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			2.931.971	2.887.975	98,50%			
				Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	jenis	3	3	100%			
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			5.489.038	4.969.398	90,53%			
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	170	170	100%			
			Pengadaan Obat, Vaksin			2.325.943	2.265.251	97,39%			
				Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	jenis	6	6	100%			
			Pengadaan Bahan Habis Pakai					75,46%			
				Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	jenis	35	35	100%			
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			124.750	80.895	64,85%			
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	jenis	10	10	100%			
				Menerima, Memeriksa dan Menyimpan Perbekalan Farmasi	kegiatan	75	75	100%			
				Mendistribusikan Perbekalan Farmasi	BBK & BAST	1020	1020	100%			
				Mendistribusikan Perbekalan Farmasi	BBK & BAST	1020	1020	100%			
				Merekapitulasi Data	laporan	800	800	100%			
				Penyusunan Laporan Kegiatan Pengelolaan Perbekalan farmasi	laporan	48	48	100%			
				Menerima, Memeriksa dan Menyimpan Perbekalan Farmasi		75	75	100%			
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			61.929.897	56.078.815	90,55%			
				Jumlah indikator SPM Bidang Kesehatan yang terpenuhi 100%	indikator	12	12	100%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			161.864	156.812	96,88%			
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	17186	13866	81%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			157.895	143.859	91,11%			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16405	13381	82%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			128.604	105.457	82,00%			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15642	13165	84%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			97.401	88.191	90,54%			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	balita	77148	61986	80%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			219.600	199.455	90,83%			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	45325	45325	100%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			155.287	136.633	87,99%			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	590928	519337	88%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			113.063	101.869	90,10%			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	357000	94958	27%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			10.148	10.148	100,00%			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	236931	212511	90%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			40.000	32.170	80,43%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18383	17553	95%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			32.850	32.850	100,00%			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	2279	1927	85%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			1.632.949	74.180	4,54%			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	10978	13037	119%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			493.040	463.169	93,94%			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	19737	19511	99%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			9.175.477	7.766.338	84,64%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	19	19	100%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			90.021	84.592	93,97%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	12	12	100%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			332.551	314.605	94,60%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	12	12	100%			
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			372.171	355.560	95,54%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12	100%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
				Jumlah tenaga kesehatan lingkungan yang mengikuti pelatihan advokasi	orang	32	32	100%			
				Jumlah pengadaan buku saku germas	buku	1300	1300	100%			
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan			306.840	271.802	88,58%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	12	12	100%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			10.000	10.000	100,00%			
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	500	1274	255%			
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			466.122	444.263	95,31%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	12	12	100%			
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			45.982.312	39.346.791	85,57%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	228	228	100%			
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			45.793	26.310	57,45%			
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	paket	12	12	100%			
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			190.331	167.049	87,77%			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dokumen	12	12	100%			
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			811.002	581.919	71,75%			
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	19	14	74%			
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			778.993	615.127	78,96%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	laporan	12	12	100%			
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			67.712	44.229	65,32%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	dokumen	12	12	100%			
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			960	960	100,00%			
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	2544	2675	105%			
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			4.913	4.490	91,40%			
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	300	300	100%			
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			52.000	4.499.988	8653,82%			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	2500	125	5%			
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			615.033	539.190	87,67%			
				Jumlah penyediaan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	lokasi	21	21	100%			
			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet			615.033	539.190	87,67%			
				Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Unit	3	3	100%			
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			623.121	463.938	74,45%			
				Jumlah Rumah Sakit Tipe C dan D serta klinik yang memenuhi syarat perizinan	lokasi	9	9	100%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			306.014	230.223	75,23%			
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	19	19	100%			
			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			317.108	233.714	73,70%			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	9	9	100%			
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			1.084.896	1.024.756	94,46%			
				<i>Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan</i>	<i>persen</i>	92	92	100%			
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.084.896	1.024.756	94,46%			
				Jumlah laporan pengelolaan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM	laporan	2	2	100%			
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.084.896	1.024.756	94,46%			
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	60	60	100%			
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			642.126	454.710	70,81%			
				<i>Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan</i>	<i>persen</i>	92	92	100%			
				<i>Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat</i>	<i>persen</i>	100	100	100%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			282.832	187.507	66,30%			
				Jumlah pengelola industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan	IRT	120	120	100%			
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			282.832	187.507	66,30%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	dokumen	12	12	100%			
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			177.252	169.386	95,56%			
				Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	lokasi	825	697	84%			
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			177.252	169.386	95,56%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	12	12	100%			
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			23.076	20.560	89,10%			
				Jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan	lokasi	9	9	100%			
			Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			23.076	20.560	89,10%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	12	12	100%			
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								
				Jumlah produksi dan produk makanan yang memenuhi syarat kesehatan	unit	120	120	100%			
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			158.966	77.257	48,60%			
				Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	60	60	100%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			1.426.072	1.180.144	82,75%			
				Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	persen	100	100	100%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			804.500	686.687	85,36%			
				Jumlah desa/ kel yang dilakukan pembinaan kader kesehatan untuk meningkatkan peran serta kader	desa/kelu	132	132	100%			
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			804.500	686.687	85,36%			
				Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	12	12	100%			
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			272.504	257.008	94,31%			
				Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	kali	3	3	100%			
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			272.504	257.008	94,31%			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	12	12	100%			
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			349.067	236.449	67,74%			
				Jumlah desa siaga aktif mandiri	desa/kel	23	23	100%			
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			349.067	236.449	67,74%			
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	12	12	100%			
	RSUD dr. LOEKMONO HADI					91.875.091	91.875.091	95,08%	-	Capaian kinerja tahun 2023 sudah bagus, tingkatkan kinerja di tahun 2024 agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			91.875.091	87.357.573	95,08%			
				Prosentase tercapainya ketersediaan sarpras pendukungnya	%	100	100	100%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
				<i>Prosentase tercapainya ketersediaan Obat dan Vaksin Rujukan Stunting</i>	%	100	100	100%			
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			91.875.091	87.357.573	95,08%			
				Terlaksananya ketersediaan sarpras kesehatan rujukan	unit	94	94	100%			
				Tersedianya Obat dan Vaksin Rujukan Stunting	Paket	1	1	100%			
			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			90.840.450	86.474.402	95,19%			
				Tersedianya sarpras kesehatan rujukan	unit	94	94	100%			
			Pengadaan Obat, Vaksin			1.034.641	883.171	85,36%			
				Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan untuk rujukan stunting	paket	1	1	100%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					174.771.335	174.771.335	97,87%	Keterlambatan proses lelang karena kendala administrasi dan lapangan, beberapa paket proses lelang ulang dan paket kegiatan ada yang pelaksanaan menunggu perubahan anggaran karena pada penetapan tidak ada dalam RKPD	evaluasi faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja, dan evaluasi indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMRT-C, sebagai upaya perbaikan perencanaan kegiatan di tahun mendatang	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			9.536.723	8.762.439	91,88%			
				<i>persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik</i>	%	85	90,28	106%			
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.600.000	990.643	61,92%			
				Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Dokumen	1	1	100%			
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			100.000	99.353	99,35%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
				Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	1	1	100%			
			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			1.300.000	693.051	53,31%			
				Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	km	0,328	0,181	55%			
			Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			200.000	198.239	99,12%			
				Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Paket	1	1	100%			
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			7.936.723	7.771.796	97,92%			
				Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	km	79	79	100%			
			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan			1.168.959	1.155.781	98,87%			
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Bangun	km	1	1	100%			
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			6.317.764	6.184.042	97,88%			
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	km	24	13,88	58%			
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			225.000	218.580	97,15%			
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	unit	1	1	100%			
			Operasional Unit Pengelola Irigasi			225.000	213.393	94,84%			
				Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Unit	15	15	100%			
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			6.262.636	6.130.079	97,88%			
				Persentase penduduk berakses air minum	%	100	98,68	99%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			6.262.636	6.130.079	97,88%			
				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	3	3	100%			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM			300.000	297.307	99,10%			
				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	3	3	100%			
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan								
				Jumlah Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%			
				Jumlah Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur	SR	100	965	965%			
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat			400.000	392.467	98,12%			
				Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Kelompok Masyarakat	2	2	100%			
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			1.109.843	1.061.862	95,68%			
				<i>Persentase rumah tinggal bersantasi</i>	%	100	100	100%			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.109.843	1.061.862	95,68%			
				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	1	100%			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	3	3	100%			
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat			617.794	617.000	99,87%			
				Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	2	2	100%			
			Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT			250.000	237.864	95,15%			
				Kapasitas IPLT Terbangun	M3 / Hari	1	5	500%			
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			12.811.231	12.508.710	97,64%			
				<i>persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat</i>	%	66	65,45	99%			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			12.811.231	12.508.710	97,64%			
				Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen	2	2	100%			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			209.667	198.806	94,82%			
				Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen	2	2	100%			
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			222.647	195.980	88,02%			
				Jumlah Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	2	2	100%			
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			9.655.000	9.484.993	98,24%			
				Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	M	2840	3309,91	117%			
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase			2.723.916	2.628.931	96,51%			
				Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	m	680	680	100%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			2.079.308	1.916.681	92,18%			
				<i>Persentase rekomendasi teknis perijinan pembangunan yang sesuai standart pelayanan</i>	%	60	55	92%			
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			2.079.308	1.916.681	92,18%			
				Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan PERSYARATAN Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	1	1	100%			
			Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			286.159	211.882	74,04%			
				Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan PERSYARATAN Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	dokumen	1	1	100%			
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota								
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%			
			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota			9.432	600	6,36%			
				Jumlah Dokumen Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%			
			Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			1.751.990	1.673.904	95,54%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
				Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%			
				Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Unit	5	5	100%			
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			36.801	600	1,63%			
				<i>Persentase rekomendasi teknis perijinan pembangunan yang sesuai standart pelayanan</i>	%	60	60	100%			
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			36.801	600	1,63%			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Kearifan Lokal untuk Bangunan Pemerintahan	Dokumen	1	1	100%			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota			36.801	600	1,63%			
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			142.303.662	140.167.702	98,50%			
				<i>Persentase alat-alat berat dalam kondisi baik</i>	%	89	95,45	107%			
				<i>persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap</i>	%	91,07	91,29	100%			
				<i>persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap</i>	%	92,83	94,69	102%			
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			142.303.662	140.167.702	98,50%			
				Panjang Jalan yang Dibangun	km	11	98,33	894%			
			Pembangunan Jalan			63.086.097	61.460.058	97,42%			
				Panjang Jalan yang Dibangun	km	11	33,33	303%			
			Rehabilitasi Jalan			68.219.975	68.051.087	99,75%			
				Panjang Jalan yang Direhabilitasi	km	2	65	3250%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
			Pembangunan Jembatan			6.937.994	6.841.953	98,62%			
				Panjang Jembatan yang Dibangun	m	10	43	430%			
			Rehabilitasi Jembatan			3.104.436	3.078.074	99,15%			
				Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	m	180	180	100%			
			Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat			955.160	736.531	77,11%			
				Jumlah alat berat yang terpelihara	buah	21	21	100%			
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			81.130	20.248	24,96%			
				<i>Persentase tenaga jasa konstruksi yg memiliki sertifikasi kompetensi</i>	%	50	50	100%			
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			81.130	20.248	24,96%			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Dokumen	1	1	100%			
			Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			81.130	20.248	24,96%			
				Tersedianya tenaga terampil konstruksi	Orang	150	150	100%			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Dokumen	1	1	100%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			550.000	474.495	86,27%			
				<i>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang</i>	%	100	98,6	99%			
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			83.020	41.369	49,83%			
				Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%			
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			83.020	41.369	49,83%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
				Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			344.858	330.073	95,71%			
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			122.122	103.052	84,38%			
				Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	100%			
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			122.122	103.052	84,38%			
				Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	100%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					5.213.320	5.213.320	94,12%	SDM tidak sesuai dengan kompetensi. overkapasitas beban pekerjaan	evaluasi faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja, dan evaluasi target kinerja tahun ini yang belum sesuai dengan perencanaan, sebagai upaya perbaikan perencanaan kegiatan di tahun mendatang	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			1.613.980	1.551.583	96,13%			
				<i>Cakupan ketersediaan rumah layak huni</i>	%	98,3	97,43	99%			
				<i>Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni</i>	%	100	100	100%			
				<i>Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni</i>	%	100	100	100%			
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		824	650	78,87%			
					Jumlah dokumen penyiapan pelaksanaan SPM Bidang Perumahan sesuai standar	dokumen	1	1			100%

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
			Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			824	650	78,87%			
				Jumlah dokumen data calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota atau yang terkena relokasi program Kabupaten/Kota yang terverifikasi	Dokumen	1	1	100%			
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			15.000	15.000	100,00%			
				Presentase rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten yang disediakan	%	100	100	100%			
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			15.000	15.000	100,00%			
				Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	Unit Rumah	1	1	100%			
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			1.386.826	1.350.599	97,39%			
				Presentase okupansi rusunawa	%	46,21	47,73	103%			
			Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			1.386.826	1.350.599	97,39%			
				Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Dokumen	1	1	100%			
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			211.330	185.334	87,70%			
				Presentase pengesahan siteplan sesuai standar pelayanan	%	100	100	100%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			211.330	185.334	87,70%			
				Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	Laporan	1	1	100%			
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			547.629	435.486	79,52%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
				<i>Persentase lingkungan permukiman kumuh</i>	%	0,02	0,02	100%			
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			222.629	200.486	90,05%			
				Luas kawasan kumuh yang tertangani	Ha	136,81	136,82	100%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			222.629	200.486	90,05%			
				Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Laporan	1	1	100%			
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			325.000	235.000	72,31%			
				Presentase RTLH yang diperbaiki	%	100	100	100%			
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			325.000	235.000	72,31%			
				Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Unit Rumah	21	21	100%			
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			3.051.712	2.919.472	95,67%			
				<i>Persentase kawasan lingkungan permukiman yang layak</i>	%	99,14	99,98	101%			
				<i>Presentase PSU dalam kondisi baik</i>	%	15	60,87	406%			
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			3.051.712	2.919.472	95,67%			
				Presentase perbaikan PSU	%	15	17	113%			
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			3.051.712	2.919.472	95,67%			
				Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	lokasi	7	7	100%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					4.668.942	4.668.942	88,49%	Masih belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan sehingga belum maksimalnya pencapaian target indikator OPD.	Tetap maksimalkan sumberdaya dan sarpras yang ada agar kinerja dapat berjalan optimal sesuai target yang telah ditentukan. Diperlukan upaya optimalisasi ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah.		
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			3.718.790	3.196.502	85,96%				
				Cakupan penegakan Perda dan Perkada	%	85	100	118%				
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	%	100	100	100%				
				Persentase cakupan penanganan gangguan tibumtranmas	%	80	92,55	116%				
				Rasio Linmas per jumlah RT	Nilai	1,34	1,36	101%				
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.298.790	2.261.328			98,37%	
				Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jenis	8	8	100%				
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			2.146.747	2.111.970			98,38%	
				Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	1	1	100%				
				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa								
				Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	12	12	100%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota								
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	100%			
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum			42.476	42.390	99,80%			
				Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	12	100%			
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			6.080	5.840	96,05%			
				Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	800	1049	131%			
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum			500	146	29,20%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	1	1	100%			
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum								
				Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	31	31	100%			
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat			441	431	97,63%			
				Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	1	1	100%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada			1.945	0	0,00%			
				Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	1	0	0%			
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			1.420.000	935.173	65,86%			
				Jumlah Strategi Penegakan Perda dan Perkada	strategi	3	3	100%			
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			2.000	1.988	99,40%			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	1	1	100%			
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			68.000	67.891	99,84%			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	12	12	100%			
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota								
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	12	12	100%			
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			950.152	935.091	98,41%			
				<i>Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten</i>	%	86	100	116%			
				<i>Cakupan penanganan penyelamatan non kebakaran kabupaten</i>	%	100	100	100%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100%			
				Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	100	93	93%			
				Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Menit	7	18	257%			
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			944.152	929.091	98,40%			
				Jumlah Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	kejadian	150	250	167%			
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100%			
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			6.000	6.000	100%			
				Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	obyek	250	366	146%			
			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			6.000	6.000	100%			
				Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	12	12	100%			
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					1.957.800	1.957.800	93,49%			
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			1.957.800	1.830.346	93,49%			
				Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana Sesuai Standar	%	100	100	100%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
				Cakupan Penanggulangan Bencana yang sesuai Standar	%	100	100	100%			
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			155.407	144.191	92,78%			
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100%			
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			3.000	1.532	51,06%			
				Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	100%			
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)			152.407	142.659	93,60%			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Ting	Orang	0	0	0%			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Ting	Orang	0	0	0%			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Ting	Orang	750	750	100%			
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.091.563	1.039.920	95,27%			
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100%			
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			3.000	2.989	99,62%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
				Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	100%			
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			52.864	52.831	99,94%			
				Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	200	200	100%			
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			508.822	497.818	97,84%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%			
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			353.834	338.086	95,55%			
				Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	160	160	100%			
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			42.654	35.347	82,87%			
				Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	1	1	100%			
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			65.826	48.365	73,47%			
				Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	80	80	100%			
			Penyusunan Rencana Kontinjensi			5.697	5.694	99,95%			
				Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	100%			
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			18.866	18.866	100%			
				Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	600	600	100%			
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			40.000	39.927	99,82%			
				Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	100%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			665.639	615.124	92,41%			
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100%			
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			2.849	1.800	63,18%			
				Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	1	100%			
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			35.250	26.987	76,56%			
				Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	20	20	100%			
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			627.540	586.337	93,43%			
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	100	100	100%			
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			45.190	31.111	68,84%			
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Dokumen	1	1	100%			
			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			45.190	31.111	68,84%			
				Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	1	1	100%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					72.672.576	72.672.576	97,13%	Masih adanya target Indikator yang belum tercapai dikarenakan koordinasi/kerjasama dengan OPD crosscutting belum optimal	capaian kinerja tahun 2023 ada beberapa subkegiatan tidak mencapai target, sehingga peningkatan kinerja di tahun 2024 agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				240.972	219.187	90,96%			
			Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar	%		85	85	100%			
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			240.972	219.187	90,96%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
				Jumlah PSKS yang aktif menanggapi PMKS	Lembaga	10	10	100%			
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			240.972	219.187	90,96%			
				Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	9	9	100%			
				Jumlah Lembaga Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	25	25	100%			
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			2.313.972	2.099.116	90,71%			
				<i>Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial</i>	%	100	95,6	96%			
				<i>Persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar</i>	%	85	79,5	94%			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			251.062	140.862	56,11%			
				Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, pengemis dan gelandangan yang mendapat rehabilitasi sosial	Orang	249	235	94%			
			Penyediaan Permakanan			50.000	46.550	93,10%			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	100%			
			Penyediaan Sandang			30.000	26.930	89,77%			
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50	100%			
			Penyediaan Alat Bantu			60.000	30.459	50,77%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	39	25	64%			
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			35.000	2.222	6,35%			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20	100%			
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			20.000	7.489	37,45%			
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	20	40%			
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			10.000	6.040	60,40%			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	15	100%			
			Pemberian Layanan Kedaruratan			31.063	12.961	41,73%			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20	100%			
			Pemberian Layanan Rujukan			15.000	8.211	54,74%			
				Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20	100%			
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			2.062.910	1.958.254	94,93%			
				Jumlah anak yatim piatu dan kelayan panti sosial yang mendapat bansos	orang	4148	4137	100%			
			Pemberian Layanan Kedaruratan			163.660	116.942	71,45%			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3450	3450	100%			
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			1.899.250	1.841.312	96,95%			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	173	172	99%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			69.879.944	68.102.754	97,46%			
				<i>Persentase Keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial</i>	<i>persen</i>	<i>75</i>	<i>73,25</i>	<i>98%</i>			
				<i>Rasio PMKS</i>	<i>Persen</i>	<i>7,5</i>	<i>8,4</i>	<i>112%</i>			
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			69.879.944	68.102.754	97,46%			
				Jumlah dokumen PMKS dan PSKS tersusun	dok	1	1	100%			
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			239.444	201.295	84,07%			
				Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	2500	2500	100%			
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			69.640.500	67.901.458	97,50%			
				Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerima	164613	164613	100%			
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			219.688	160.290	72,96%			
				<i>Cakupan penanganan korban bencana alam/sosial</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100%</i>			
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			219.688	160.290	72,96%			
				Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial selama masa tanggap darurat	Orang	1450	1450	100%			
			Penyediaan Makanan								
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1250	1250	100%			
			Penyediaan Sandang			21.400	17.668	82,56%			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	80	80	100%			
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			16.618	16.618	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20	100%			
			Pelayanan Dukungan Psikososial			7.800	1.500	19,23%			
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	100%			
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			18.000	7.364	40,91%			
				<i>Persentase TMP terpelihara</i>	%	100	100	100%			
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			18.000	7.364	40,91%			
				Jenis jasa pemeliharaan TMP	Jenis	12	12	100%			
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			18.000	7.364	40,91%			
				Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	1	100%			

3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

* dalam ribu rupiah

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			8.182.851	8.182.851	76,12%	Pelaksanaan kegiatan bersumber dari DBHCHT terutama pekerjaan konstruksi harus sesuai tahapan (guideline dari Kemenperin) sehingga administrasi pekerjaan ada yang belum bisa dilaksanakan. Kegiatan di BLK terdapat paket pelatihan pemandu wisata sebanyak 8 paket terlaksana 5 paket karena kendala di LPSE saat pengadaan tender. Sistem eror sehingga kehabisan waktu untuk pelaksanaannya hanya bisa 5A paket	Untuk tahun berikutnya agar mengacu pada Renstra, Renja, RKO yang sudah ada dan kegiatan paket pekerjaan segera dilaksanakan diawal tahun.	
				<i>Persentase Perusahaan yang Telah Menyusun Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja</i>	<i>persen</i>	2	2	100,00%			
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				9.883	9.701	98,15%			
			Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro	perusahaan		3	3	100,00%			
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				9.883	9.701	98,15%			
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan		3	3	100,00%			
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				8.063.709	6.114.289	75,82%			
			<i>Persentase Peserta Pelatihan Bersertifikasi Kompetensi</i>	<i>persen</i>		85	87,7	103,18%			
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				8.053.709	6.104.492	75,80%			
			Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	dok		2	2	100,00%			
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				8.053.709	6.104.492	75,80%			
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang		2352	2304	97,96%			
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				10.000	9.797	97,97%			
			Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	dok		1	1	100,00%			
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				10.000	9.797	97,97%			
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	LPKS		40	40	100,00%			
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				49.901	47.124	94,43%			
			<i>Persentase Pencari Kerja yang Sudah Bekerja</i>	<i>%</i>		50	57,6	115,20%			
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				15.000	14.646	97,64%			
			Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	dok		1	1	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelayanan antar Kerja			15.000	14.646	97,64%			
				Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	orang	1500	1927	128,47%			
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			30.000	27.590	91,97%			
				Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	dok	1	0	0,00%			
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			30.000	27.590	91,97%			
				Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	3000	3831	127,70%			
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			4.902	4.888	99,71%			
				Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	dok	2	2	100,00%			
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			4.902	4.888	99,71%			
				Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI	Orang	200	281	140,50%			
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			59.358	57.294	96,52%			
				Persentase Kasus yang terselesaikan	persen	100	100	100,00%			
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			44.999	43.129	95,84%			
				Jumlah Dokumen Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dok	3	3	100,00%			
			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			1.000	1.000	100,00%			
				Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WI KP Online	perusahaan	20	20	100,00%			
			Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan			1.000	1.000	100,00%			
				Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	perusahaan	5	5	100,00%			
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			42.999	41.129	95,65%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	dok	5	5	100,00%			
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			14.359	14.166	98,66%			
				Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Dok	1	1	100,00%			
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			995	995	100,00%			
				Jumlah Perusahaan yang Dibina	perusahaan	30	30	100,00%			
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.000	1.000	100,00%			
				Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	perkara	10	10	100,00%			
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			2.000	2.000	100,00%			
				Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	organisasi	2	2	100,00%			
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			9.462	9.269	97,96%			
				Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	lembaga	3	3	100,00%			
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			902	902	100,00%			
				Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	perusahaan	10	10	100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					657.104	657.104	76,23%	Masih adanya target Indikator yang belum tercapai dikarenakan koordinasi/kerjasama dengan OPD crosscutting belum optimal	capaian kinerja tahun 2023 ada beberapa subkegiatan tidak mencapai target, sehingga peningkatan kinerja di tahun 2024 agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			180.611	131.851	73,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<i>Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD</i>	<i>persen</i>	29	29	100,00%			
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			42.611	35.626	83,61%			
				Jumlah lembaga Pemerintah tingkat Daerah Kab/Kota yang telah dilatih PUG	Lembaga	61	61	100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			42.611	35.626	83,61%			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	100,00%			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			138.000	96.225	69,73%			
				Pengembangan KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	kelompok	25	16	64,00%			
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			138.000	96.225	69,73%			
				Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	4	4	100,00%			
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			26.997	16.135	59,77%			
				<i>Cakupan perempuan korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit layanan terpadu</i>	<i>persen</i>	100	100	100,00%			
				<i>Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)</i>	<i>persen</i>	0,015	0,003	20,00%			
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			18.000	11.925	66,25%			
				Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah	program	1	1	100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			18.000	11.925	66,25%			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			8.997	4.210	46,80%			
				Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Lembaga	1	1	100,00%			
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			8.997	4.210	46,80%			
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	10	9	90,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			7.500	4.207	56,09%			
				<i>Persentase pekerja perempuan</i>	<i>Persen</i>	89	90,4	101,57%			
				<i>Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam bekerja (TPAK)</i>	<i>Persen</i>	66,5	66,09	99,38%			
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.500	4.207	56,09%			
				Jumlah data sistem informasi gender dan anak yang tersusun	dok	1	1	100,00%			
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			7.500	4.207	56,09%			
				Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	1	100,00%			
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			407.497	328.728	80,67%			
				<i>Strata Kabupaten Layak Anak (KLA)</i>	<i>Peringkat</i>	3	1	33,33%			
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			35.999	34.308	95,30%			
				Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	keg	1	1	100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			35.999	34.308	95,30%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	100,00%			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			371.499	294.420	79,25%			
				Jumlah lembaga layanan perlindungan anak yang terbina	keg	1	1	100,00%			
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			371.499	294.420	79,25%			
				Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	100,00%			
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			34.500	19.999	57,97%			
				<i>Cakupan anak korban kekerasan yang ditangani</i>	<i>persen</i>	100	100	100,00%			
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			34.500	19.999	57,97%			
				Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat pendampingan	orang	10	10	100,00%			
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			34.500	19.999	57,97%			
				Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					452.495	452.495	93,77%	-	Disusun timeline aktivitas kinerja agar dapat melaksanakan tugas tepat waktu, disamping tetap tepat mutu, tepat administrasi dan tepat sasaran	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			12.500	8.760	70,08%			
				<i>Persentase peningkatan sarpras lumbung pangan</i>	<i>%</i>	100	100	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			12.500	8.760	70,08%			
				Jumlah lumbung pangan yang difasilitasi	unit	18	18	100,00%			
			Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan			12.500	8.760	70,08%			
				Terlaksananya pemeliharaan gudang cadangan pangan	paket	1	1	100,00%			
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			354.999	339.889	95,74%			
				<i>persentase ketersediaan pangan utama</i>	%	<i>100</i>	<i>195,56</i>	<i>195,56%</i>			
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			114.999	114.097	99,21%			
				Prosentase ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah	%	90	90	100,00%			
			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			45.000	44.919	99,82%			
				Tersusunnya data panel harga pangan	paket	1	1	100,00%			
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			45.000	44.420	98,71%			
				Tersusunnya neraca bahan makanan	paket	1	1	100,00%			
			Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia			25.000	24.758	99,03%			
				Terlaksananya Gelar Pasar Tani	kali	12	12	100,00%			
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			60.000	54.026	90,04%			
				Jumlah penyediaan pangan utama (beras/gabah)	ton	30	4	13,33%			
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			50.000	45.426	90,85%			
				Tersedianya gabah kering giling	ton	4	4	100,00%			
			Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			10.000	8.600	86,00%			
				Terlaksananya Pengelolaan cadangan pangan	paket	1	1	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			180.000	171.767	95,43%			
				Jumlah masyarakat yang paham tentang konsumsi B2SA	orang	120	120	100,00%			
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			180.000	171.767	95,43%			
				Terlaksananya Edukasi konsumsi b2sa bagi anak usia dini (sd/mi)	orang	200	200	100,00%			
				Terlaksananya pelatihan olahhan pangan	orang	25	25	100,00%			
				Terlaksananya keikutsertaan Lomba cipta menu Tk. Propinsi	kali	1	1	100,00%			
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			49.999	45.078	90,16%			
				<i>persentase penanganan daerah rawan pangan</i>	%	100	100	100,00%			
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			49.999	45.078	90,16%			
				Jumlah desa rawan pangan yang difasilitasi	desa/kel	18	18	100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			35.000	30.811	88,03%			
				Terlaksananya Pendampingan kelompok pupm	kelompok	6	6	100,00%			
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			15.000	14.267	95,11%			
				Terlaksananya pembinaan desa mandiri pangan dan kelompok lumbung pangan	Kec	9	9	100,00%			
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			34.997	30.595	87,42%			
				<i>persentase keamanan pangan</i>	%	90	95	105,56%			
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			34.997	30.595	87,42%			
				Presentase gapoktan penghasil pangan segar yang terfasilitasi tentang keamanan pangan	%	100	100	100,00%			
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			34.997	30.595	87,42%			
				Terlaksananya Uji laboratorium residu pestisida pangan segar	paket	1	1	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				Terlaksananya Sosialisasi bmr pestisida dan keamanan pangan segar	orang	30	30	100,00%					
				Terlaksananya Pembinaan keamanan pangan	Kecamatan	9	9	100,00%					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					549.999	549.999	62,27%	Keterlambatan proses lelang karena kendala administrasi dan lapangan, beberapa paket proses lelang ulang dan paket kegiatan ada yang pelaksanaan menunggu perubahan anggaran karena pada penetapan tidak ada dalam RKPD	evaluasi faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja, dan evaluasi indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMRT-C, sebagai upaya perbaikan perencanaan kegiatan di tahun mendatang			
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			190.000	111.622	58,75%					
				Persentase penyelesaian administrasi pertanahan	%	74,84	75	100,21%					
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			190.000	111.622			58,75%		
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	10			83,33%		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			190.000			111.622	58,75%	
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1			1	100,00%	
					PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			359.999			230.857	64,13%	
						Persentase tertib administrasi Dokumen pertanahan	%	100			75	75,00%	
						Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					359.999	230.857	64,13%
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	30	26	86,67%					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota			359.999	230.857	64,13%				
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00%					

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					14.545.405	14.545.405	97,56%	SDM tidak sesuai dengan kompetensi. overkapasitas beban pekerjaan	evaluasi faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja, dan evaluasi target kinerja tahun ini yang belum sesuai dengan perencanaan, sebagai upaya perbaikan perencanaan kegiatan di tahun mendatang	
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			506.999	492.513	97,14%			
				Presentase dokumen kebijakan lingkungan hidup sesuai standar	%	100	100	100,00%			
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			50.000	46.083	92,17%			
				Presentase dokumen RPPLH yang disusun sesuai standar	%	100	100	100,00%			
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			50.000	46.083	92,17%			
				Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	1	1	100,00%			
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			456.999	446.430	97,69%			
				Presentase dokumen KLHS yang disusun sesuai standar	%	100	100	100,00%			
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang			125.000	120.750	96,60%			
				Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	1	1	100,00%			
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			332.000	325.680	98,10%			
				Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	1	1	100,00%			
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			240.632	235.613	97,91%			
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,77	60,8	89,72%			
				Indeks kualitas air	indeks	50,85	52,67	103,58%			
				Indeks kualitas udara	indeks	93,92	81,92	87,22%			
				indeks tutupan lahan	indeks	60,85	35,72	58,70%			
				Persentase dokumen laporan pengelolaan lingkungan yang disusun sesuai standar	%	100	100	100,00%			
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			240.632	235.613	97,91%			
				Presentase Persentase dokumen laporan pengelolaan lingkungan yang disusun sesuai standar	%	100	100	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			79.600	78.454	98,56%			
				Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	dokumen	1	1	100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			50.000	49.743	99,49%			
				Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	100,00%			
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			111.032	107.416	96,74%			
				Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	100,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			6.393.899	6.181.509	96,68%			
				<i>Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>	%	8,2	9,7098	118,41%			
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			6.393.899	6.181.509	96,68%			
				Persentase Keanekaragaman Hayati (taman kehati+RTH) dalam kondisi baik	%	100	100	100,00%			
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			10.000	9.400	94,00%			
				Luas taman KEHATI di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	2,3	2,3	100,00%			
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			6.383.899	6.172.109	96,68%			
				Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	29,2417	29,2417	100,00%			
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			5.000	2.463	49,27%			
				<i>Presentase dokumen rincian teknis penyimpanan limbah B3,</i>	%	48,48	80,77	166,60%			
			Penyimpanan Sementara Limbah B3			5.000	2.463	49,27%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Presentase dokumen rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan sesuai standar	%	100	100	100,00%			
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3			5.000	2.463	49,27%			
				Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	Laporan	1	1	100,00%			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			22.500	19.135	85,04%			
				Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	50	50,16	100,32%			
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			22.500	19.135	85,04%			
				Persentase ijin lingkungan yang diawasi	%	50	48,57	97,14%			
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			22.500	19.135	85,04%			
				Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100,00%			
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			37.900	37.574	99,14%			
				Persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup	%	25	69,23	276,92%			
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			37.900	37.574	99,14%			
				Jumlah akumulasi komunitas pecinta lingkungan hidup yang terbentuk	kelompok	48	52	108,33%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan			30.000	29.747	99,16%			
				Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	22	58	263,64%			
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			7.900	7.826	99,07%			
				Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	100,00%			
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			257.825	254.251	98,61%			
				<i>Presentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi</i>	%	50	44,29	88,58%			
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			257.825	254.251	98,61%			
				Jumlah penerimaan penghargaan dibidang lingkungan hidup	kelompok	5	31	620,00%			
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			257.825	254.251	98,61%			
				Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	entitas	10	70	700,00%			
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			4.275	4.244	99,28%			
				<i>Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang ditindaklanjuti</i>	%	100	100	100,00%			
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			4.275	4.244	99,28%			
				Presentase tindaklanjuti pengaduan bidang PPLH	%	100	100	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota			4.275	4.244	99,28%			
				Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Dokumen	1	1	100,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			7.076.376	6.963.909	98,41%			
				<i>Persentase penanganan volume sampah</i>	%	<i>72</i>	<i>58,65</i>	<i>81,46%</i>			
			Penanganan Sampah			7.076.376	6.963.909	98,41%			
				<i>Persentase timbulan sampah yang ditangani</i>	%	<i>72</i>	<i>58,65</i>	<i>81,46%</i>			
			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			6.911.375	6.799.316	98,38%			
				Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPS/SPA Kabupaten/Kota	ton	121865,69	93290,59	76,55%			
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			165.001	164.593	99,75%			
				Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Unit	1	1	100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4.377.203	4.377.203	96,55%	1. Keterbatasan ketersediaan anggaran untuk peremajaan pengadaan sarpras pelayanan Adminduk (pelayanan di Dinas, 9 Kecamatan, Mall Pelayanan Publik dan Jemput Bola); 2. Belum optimalnya pelayanan perekaman dan pencetakan KTP, karena kondisi sarpras yang tidak memadai/rusak dimana umur ekonomisnya lebih dari 10 tahun; 3. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat bahwa Dana Pelayanan Admindukcapil (DAK Nonfisik) APBN Tahun 2023 bagi Kabupaten/Kota tidak lagi diberikan, sehingga mempengaruhi operasional pelayanan Adminduk; 4. Ketersediaan blangko KTP yang disediakan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui	Pertahankan Capaian Kinerja dan penyerapan anggaran yang sudah sangat tinggi.	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			2.779.538	2.656.034	95,56%			
				<i>Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</i>	%	<i>100</i>	<i>99,64</i>	<i>99,64%</i>			
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk			2.779.538	2.656.034	95,56%			
				Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sesuai standar	dokumen	169000	167303	99,00%			
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			2.779.538	2.656.034	95,56%			
				Jumlah penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk sesuai standar	dokumen	9000	5890	65,44%			
				Jumlah penerbitan KTP dan KIA sesuai standar	dokumen	90000	108199	120,22%			
				Jumlah penerbitan dokumen Kartu Keluarga sesuai standar	dokumen	70000	53214	76,02%			
				Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan	12	12	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL			782.089	771.785	98,68%	mekanisme hibah ke Dinas Dukcapil Kab. Kudus mengalami trend yang semakin menurun sehingga berdampak pada rendahnya penerbitan KTP Tahun 2023; 5. Dampak penerapan dari kebijakan implementasi SIAK Terpusat mulai bulan April Tahun 2022 dari Pemerintah Pusat, Dinas Dukcapil Kab. Kudus memiliki keterbatasan pengelolaan database kependudukan dimana penyajian data kependudukan skala kabupaten terbatas sesuai dengan template yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat.		
				Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	100	99,48	99,48%			
			Pelayanan Pencatatan Sipil			782.089	771.785	98,68%			
				Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil sesuai standar	dokumen	33930	29775	87,75%			
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			782.089	771.785	98,68%			
				Jumlah penerbitan dokumen akta perkawinan sesuai prosedur	dokumen	130	73	56,15%			
				Jumlah penerbitan akta kelahiran dan kematian sesuai standar	dokumen	33000	26527	80,38%			
				Jumlah penerbitan dokumen akta perceraian sesuai prosedur	dokumen	30	19	63,33%			
				Jumlah penerbitan perubahan data peristiwa penting sesuai prosedur	dokumen	770	3136	407,27%			
				Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Layanan	5	5	100,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			815.576	798.217	97,87%			
				Cakupan pengelolaan database kependudukan	%	100	100	100,00%			
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			815.576	798.217	97,87%			
				Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan sesuai standar	instansi	15	11	73,33%			
			Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			815.576	798.217	97,87%			
				Jumlah penyajian dan penyusunan buku/data kependudukan	dokumen	3	3	100,00%			
				Jumlah laporan fasilitasi penyediaan sarpras SIAK sesuai standar	dokumen	12	12	100,00%			
				Jumlah fasilitasi pengelolaan sistem dan basis data SIAK sesuai standar	dokumen	1	1	100,00%			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	12	12	100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		PROGRAM PENATAAN DESA			10.865.898	10.865.898	94,80%	Kurangnya anggaran pada sub kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi sehingga tidak dapat tercapai maksimal	capaian kinerja sudah tergolong tinggi, tingkatkan dan pertahankan di periode anggaran berikutnya	
				Meningkatnya Penataan Desa	Desa	123	123	100,00%			
				Prosentase Pelaksanaan TMMD/Karya Bhakti	Desa	123	123	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Persentase Penyelenggaraan Penatan Desa	%	2	2	100,00%			
			Penyelenggaraan Penataan Desa			6.462.245	6.268.899	97,01%			
				Jumlah Pelaksanaan TMMD / Karya Bhakti	Desa	3	3	100,00%			
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			6.462.245	6.268.899	97,01%			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	126	126	100,00%			
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			100.000	98.158	98,16%			
				Meningkatnya Kerjasama Desa	produk hukum kawasan pedesaan	2	2	100,00%			
				Prosentase Peningkatan Kawasan Pedesaan	produk hukum kawasan pedesaan	2	2	100,00%			
			Fasilitasi Kerja sama antar Desa			100.000	98.158	98,16%			
				Tersusunnya Produk Hukum tentang Kawasan Pedesaan	Produk Hukum	2	2	100,00%			
			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			100.000	98.158	98,16%			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	1	100,00%			
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			3.698.663	3.359.178	90,82%			
				Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	15	15	100,00%			
				Prosentase Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	15	15	100,00%			
				Menurunnya Persentase desa yang bermasalah	%	20	10	50,00%			
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			3.698.663	3.359.178	90,82%			
				Jumlah Produk Hukum dan Petunjuk Teknis Yang Dihasilkan	Dokumen	15	15	100,00%			
			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			25.000	24.762	99,05%			
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	3	3	100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			124.999	120.292	96,23%			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	3	3	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			10.000	9.903	99,03%			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	123	123	100,00%			
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			700.772	693.607	98,98%			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	3	3	100,00%			
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			1.999.990	1.710.647	85,53%			
				Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	1018	1018	100,00%			
			Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			5.000	4.990	99,80%			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	123	123	100,00%			
			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa			5.000	4.047	80,94%			
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	123	123	100,00%			
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa			90.000	88.718	98,58%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1	1	100,00%			
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			40.000	35.995	89,99%			
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	2	2	100,00%			
			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			40.000	39.530	98,83%			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	5	5	100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			270.000	253.262	93,80%			
				Jumlah Dokumen Profil Desa	Desa	123	123	100,00%			
				Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	123	123	100,00%			
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			77.903	73.045	93,76%			
				Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	369	369	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa			135.000	132.721	98,31%			
				Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	3	3	100,00%			
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			174.999	167.660	95,81%			
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	9	9	100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			604.989	574.295	94,93%			
				<i>Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa Yang Berjalan sesuai regulasi</i>	%	100	100	100,00%			
				<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi</i>	%	100	100	100,00%			
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			604.989	574.295	94,93%			
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa Yang Terfasilitasi	Lembaga	1239	1239	100,00%			
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			50.000	47.082	94,16%			
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	9	9	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			65.000	63.873	98,27%			
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1	1	100,00%			
			Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	1	1	100,00%			
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			94.990	86.076	90,62%			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	100,00%			
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			60.000	53.858	89,76%			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	100,00%			
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			20.000	9.889	49,45%			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	1	100,00%			
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			300.000	299.882	99,96%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					7.939.174	7.939.174	85,05%	Masih adanya target indikator yang belum tercapai dikarenakan koordinasi/kerjasama dengan OPD crosscutting belum optimal	capaian kinerja tahun 2023 ada beberapa subkegiatan tidak mencapai target, sehingga peningkatan kinerja di tahun 2024 agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			288.936	122.082	42,25%			
				Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1	0,4	40,00%			
				Total Fertility Rate (TFR)	%	2,01	2,11	104,98%			
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			10.000	2.587	25,87%			
				Jumlah dokumen hasil penyerasian kebijakan Pembangunan daerah kab/kota Program Bangga Kencana	Dokumen	1	0	0,00%			
			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)			10.000	2.587	25,87%			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Dokumen	1	1	100,00%			
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		278.936	119.495	42,84%			
				Jumlah dokumen profil kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	1	1	100,00%			
				Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		35.936	6.700	18,64%			
				Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	2	2	100,00%			
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		64.200	30.259	47,13%			
				Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	1	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			136.800	40.800	29,82%			
				Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	1	1	100,00%			
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			42.000	41.736	99,37%			
				Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1	1	100,00%			
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			3.088.838	2.255.306	73,01%			
				<i>Cakupan peserta KB aktif</i>	%	72	72,19	100,26%			
				<i>Persentase penggunaan MKJP</i>	%	14	14,05	100,36%			
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			916.721	663.450	72,37%			
				Jumlah PUS yang aktif ber-KB	PUS	105000	92128	87,74%			
			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			56.144	40.159	71,53%			
				Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	1	1	100,00%			
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			265.925	180.340	67,82%			
				Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	1	100,00%			
			Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK			27.946	6.744	24,13%			
				Pelaksanaan Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	Kegiatan	1	1	100,00%			
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			125.518	125.320	99,84%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1	1	100,00%			
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK			337.050	259.853	77,10%			
				Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	1	100,00%			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	1	100,00%			
			Pengendalian Program KKBPK			104.138	51.034	49,01%			
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	1	100,00%			
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			264.000	229.150	86,80%			
				Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100	100	100,00%			
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			264.000	229.150	86,80%			
				Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	1	1194	119400,00%			
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			1.573.617	1.218.025	77,40%			
				Jumlah alokon mix kontrasepsi yang tersedia di gudang alokon	buah/set/gross	67930	61783	90,95%			
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			68.743	21.800	31,71%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	30	30	100,00%			
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			679.542	445.979	65,63%			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	1	512	51200,00%			
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			791.131	743.099	93,93%			
				Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	21	21	100,00%			
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			34.202	7.147	20,90%			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1	100,00%			
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			334.500	144.682	43,25%			
				Persentase organisasi yang aktif dalam pelaksanaan KB di daerah	Persen	40	30	75,00%			
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			11.166	10.220	91,53%			
				Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1	1	100,00%			
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB			323.334	134.462	41,59%			
				Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	1	1	100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			4.561.400	4.374.488	95,90%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	%	14,5	6,76	46,62%			
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			4.561.400	4.374.488	95,90%			
				Persentase Kesertaan KB di Kab/Kota dengan Kesertaan Rendah	%	44	44	100,00%			
				Persentase kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	persen	70	33,82	48,31%			
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			360.000	232.820	64,67%			
				Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	1	1	100,00%			
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			4.151.400	4.107.458	98,94%			
				Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	1962	1962	100,00%			
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			50.000	34.210	68,42%			
				Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	5	5	100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN					50.008.653	50.008.653	96,50%	Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan sehingga belum maksimalnya pencapaian target indikator OPD	upaya pemenuhan infrastruktur keselamatan jalan yang memadai, pengelolaan manajemen penanganan PJU yg lebih baik dan efisien,	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)			50.008.653	48.257.255	96,50%			
				Kecepatan rata - rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan	km/jam	40	40	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan	%	90	90	100,00%		serta optimalisasi PAD melalui intensifikasi pendapatan dan perbaikan manajemen perparkiran	
				Kontribusi Retribusi Perparkiran dan Terminal terhadap PAD	Persen	0,019	0,019	100,00%			
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			555.801	551.919	99,30%			
				Jumlah Dokumen Perencanaan LLAJ	dok	5	5	100,00%			
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			6.998	6.353	90,78%			
				Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00%			
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			548.803	545.566	99,41%			
				Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100,00%			
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			44.844.028	43.321.783	96,61%			
				Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (rambu lalin,warning light,rambu type F, RPPJ)	titik	40	40	100,00%			
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			4.336.402	4.283.542	98,78%			
				Jumlah Perlengkapan jalan LPJU di jalan Kabupatenkota yang tersedia / terpasang	Unit	3	3	100,00%			
				Jumlah Perlengkapan Jalan (Traffick Light, Warning Light, Cermin Tikung,Cembung, Marka, Rambu-rambu lalin dan Guardrail)di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit,m2,buah	168	168	100,00%			
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			40.507.625	39.038.241	96,37%			
				Jumlah Perlengkapan Jalan LPJU yang terehabilitasi dan Terpelihara	Unit,titik	6000	6000	100,00%			
				Jumlah Perlengkapan Jalan (Traffic Light, Warning Light, Cermin Tikung/Cembung, Marka Rambu-rambu lalin, GuardrailGuardrail dan LPJU yang Terhabilitasi dan Terpelihara	Unit,m2,buah	168	168	100,00%			
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			442.437	433.716	98,03%			
				Jumlah Terminal (fasilitas utama dan pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara (Termial Getas dan Jetak)	unit	2	2	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)			335.530	330.158	98,40%			
				Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	4	100,00%			
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C			106.907	103.558	96,87%			
				Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Org	31	31	100,00%			
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			3.422.279	3.264.276	95,38%			
				Jumlah baju juru parkir	buah	230	230	100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			3.422.279	3.264.276	95,38%			
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100,00%			
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			360.000	358.064	99,46%			
				Jumlah Pemeliharaan SIM PKB	unit	9	9	100,00%			
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			210.000	209.450	99,74%			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	9	9	100,00%			
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			150.000	148.614	99,08%			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	9	9	100,00%			
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			69.108	59.952	86,75%			
				Jumlah Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	org	10	10	100,00%			
			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			69.108	59.952	86,75%			
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			40.000	39.979	99,95%			
				Jumlah Sewa BUS Yang Tersedia	unit	2	2	100,00%			
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			40.000	39.979	99,95%			
				Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	232	232	100,00%			
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			275.000	227.566	82,75%			
				Rencana Induk Jaringan Transportasi (RJT)	Paket	1	1	100,00%			
				Study Kinerja Angkutan Pedesaan	Paket	1	1	100,00%			
				Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Angkutan Jalan	dok	1	1	100,00%			
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			275.000	227.566	82,75%			
				Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					13.699.166	13.699.166	97,31%	- Terdapat beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu lama menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran - Belum tersedianya beberapa regulasi dari pusat yang mendukung pelaksanaan kegiatan di pemerintah daerah - Kesulitan dalam pengumpulan data statistik pada masing-masing perangkat daerah - Tantangan yang muncul adalah tuntutan berlomba dengan waktu yang tersedia hingga akhir tahun anggaran untuk memastikan seluruh kegiatan terlaksana dengan baik dan, tercapainya target yang ditentukan, serta dilaksanakan sesuai dengan	- dilakukan evaluasi terhadap faktor penghambat, untuk lebih meningkatkan upaya koordinasi atau kerjasama baik internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian target kinerja. - untuk lebih mempertahankan manajemen waktu, dan perencanaan pelaksanaan pekerjaan dengan lebih mengoptimalkan ketersediaan SDM dan sarpras atau anggaran untuk mencapai kinerja yang sesuai dengan rencana sebagai bahan	
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			11.545.474	11.375.358	98,53%			
				Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	%	100	100	100,00%			
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			11.545.474	11.375.358	98,53%			
				Persentase Jumlah Masyarakat yang Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten	%	72	72	100,00%			
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			186.500	184.540	98,95%			
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	5	5	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			317.328	281.762		ketentuan yang berlaku;	perbaikan tahun berikutnya.		
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	200	579	289,50%				
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			10.502.017	10.406.069	99,09%				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	214	274	128,04%				
			Pelayanan Informasi Publik			75.677	65.729	86,86%				
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	20	12	60,00%				
			Layanan Hubungan Media			243.265	219.975	90,43%				
				Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	2	2	100,00%				
			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			50.000	49.950	99,90%				
				Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	1	1	100,00%				
			Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			170.688	167.333	98,03%				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit	6	6	100,00%				
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			2.153.692	1.955.765	90,81%				
				<i>Indeks SPBE</i>	<i>Indeks</i>	2	3,38	169,00%				
				<i>Kebijakan Internal SPBE</i>	<i>Indeks</i>	3	3,9	130,00%				
				<i>Layanan SPBE</i>	<i>Indeks</i>	3	3,82	127,33%				
				<i>Tata Kelola SPBE</i>	<i>Indeks</i>	2	3	150,00%				
			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.450.092	1.302.502	89,82%				
				Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan	Unit	209	209	100,00%				
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			1.450.092	1.302.502	89,82%				
				Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	209	209	100,00%				
			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			703.599	653.263	92,85%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data	Unit	127	127	100,00%			
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			172.767	152.540	88,29%			
				Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	1	100,00%			
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			154.591	144.918	93,74%			
				Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	2	3	150,00%			
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			376.242	355.805	94,57%			
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			3.832.471	3.832.471	94,32%	Pelaksanaan kegiatan bersumber dari DBHCHT terutama pekerjaan konstruksi harus sesuai tahapan (guideline dari Kemenperin) sehingga administrasi pekerjaan ada yang belum bisa dilaksanakan. Kegiatan di BLK terdapat paket pelatihan pemandu wisata sebanyak 8 paket terlaksana 5 paket karena kendala di LPSE saat pengadaan tender. Sistem eror sehingga kehabisan waktu untuk pelaksanaannya hanya bisa 5A paket	Untuk tahun berikutnya agar mengacu pada Renstra, Renja, RKO yang sudah ada dan kegiatan paket pekerjaan segera dilaksanakan diawal tahun.	
				<i>Persentase Koperasi Aktif</i>	<i>persen</i>	89	89,15	100,17%			
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			226.940	215.338	94,89%			
				Jumlah dokumen laporan tahunan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dok	1	1	100,00%			
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			226.940	215.338	94,89%			
				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	105	105	100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			2.815.559	2.761.480	98,08%			
				<i>Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha</i>	<i>persen</i>	4	4,31	107,75%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			2.815.559	2.761.480	98,08%			
				Jumlah dokumen laporan tahunan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dok	1	1	100,00%			
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			2.587.129	2.558.698	98,90%			
				Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	unit usaha	64	64	100,00%			
				Jumlah kelompok yang menerima hibah bantuan modal usaha	kelompok	100	100	100,00%			
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan			228.430	202.783	88,77%			
				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	100	100	100,00%			
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			789.972	638.024	80,77%			
				Persentase Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	<i>persen</i>	6	6,03	100,50%			
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			789.972	638.024	80,77%			
				Jumlah dokumen laporan tahunan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dok	1	1	100,00%			
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			789.972	638.024	80,77%			
				Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	orang	70	70	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					806.987	806.987	85,86%	1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dari sisi kuantitas dan kualitas serta sarpras berupa kendaraan dinas operasional untuk peninjauan lapangan terkait perizinan dan pengawasan penanaman modal; 2. Penyelesaian kinerja terkait dengan kinerja OPD lain, sehingga kecepatan kinerja pihak eksternal akan mempengaruhi capaian proses kinerja di penetapan kebijakan; 3. Belum tersedia RDTR sebagai acuan yang lebih detail tentang Tata Ruang Investasi;	Dengan adanya penambahan SDM & kendaraan dinas pada DPMPSTP, diharapkan pada pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I 2024, permasalahan SDM & mobilitas kerja akan teratasi. Untuk penyelesaian kinerja OPD yang membutuhkan koordinasi dgn OPD lain, dapat disusun SOP penyelesaian pekerjaan yang disepakati oleh semua OPD yang terlibat, sehingga dapat dipantau dan diukur bersama. Penyusunan RDTR harus terus diupayakan, untuk menunjang penawaran investasi di Kabupaten Kudus kepada calon investor.	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			63.449	57.599	90,78%			
			Cakupan Sinkronisasi Kebijakan Penanaman Modal	%	100	100	100,00%				
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		6.551	4.300	65,64%				
			Jumlah dokumen kebijakan pemberian kemudahan, fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal	dokumen	1	0,8	80,00%				
			Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		6.551	4.300	65,64%				
			Jumlah dokumen bahan penyusunan kebijakan tentang kemudahan,fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	Dokumen	1	1	100,00%				
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	0,8	80,00%				
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		56.898	53.299	93,68%				
			Jumlah sistem peta potensi yang dikelola	sistem	1	1	100,00%				
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		2.899	1.460	50,37%				
			Jumlah dokumen bahan perencanaan kegiatan penanaman modal tahun (N+1)	Dokumen	0	0	0,00%				
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00%				
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		54.000	51.839	96,00%				
			Jumlah dokumen tentang potensi dan atau kajian peluang investasi Kabupaten	Dokumen	1	1	100,00%				
			Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00%				
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		152.449	143.448	94,10%				
			persentase peningkatan jumlah investor	persen	10	215,11	2151,10%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			152.449	143.448	94,10%			
				Jumlah Promosi Penanaman Modal	kali	1	1	100,00%			
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			59.873	58.513	97,73%			
				Jumlah dokumen bahan penyusunan strategi promosi penanaman modal Daerah	Dokumen	1	1	100,00%			
				Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00%			
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			92.575	84.935	91,75%			
				Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	kegiatan	4	4	100,00%			
				Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	100,00%			
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			137.679	128.515	93,34%			
				<i>Persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan</i>	%	60	100	166,67%			
				<i>Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan</i>	%	80	100	125,00%			
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			137.679	128.515	93,34%			
				Jumlah perizinan terbit sesuai dengan standar pelayanan	SK	12000	14553	121,28%			
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			127.182	124.595	97,97%			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	7500	9135	121,80%			
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			3.000	3.000	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	20	21	105,00%			
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			7.497	920	12,27%			
				Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	12	12	100,00%			
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			368.869	281.423	76,29%			
				<i>realisasi investasi yang dilaporkan</i>	<i>Trilyun</i>	3.497	1,69	48,33%			
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			368.869	281.423	76,29%			
				Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	perusahaan	500	636	127,20%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			265.420	228.904	86,24%			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	350	401	114,57%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			103.449	52.519	50,77%			
				Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	0	0	0,00%			
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	200	282	141,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			84.541	81.898	96,87%			
				<i>Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis</i>	%	100	100	100,00%			
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			84.541	81.898	96,87%			
				Jumlah sistem informasi yang dikelola	aplikasi	2	2	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			84.541	81.898	96,87%			
				Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	12	12	100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					18.841.125	18.841.125	99,58%	Realisasi Anggaran pada Sub Kegiatan yang Sumber Dana dari APBN (BOP PAUD, Dikmas, BOS SD dan SMP) yang pencairan langsung ke sekolah/lembaga sehingga dalam penSPJan menunggu Rekonsiliasi dari Pemerintah Pusat	jadikan tahun 2023 sebagai evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dengan mengoptimalkan capaian kinerja dan penyerapan anggaran agar tercapai target tahun 2024	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			956.680	924.030	96,59%			
				<i>Presentase organisasi pemuda yang aktif</i>	%	96,96	9696	10000,00%			
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			281.680	258.235	91,68%			
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Paket	1	1	100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor			31.680	25.560	80,68%			
				Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	100	100	100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota			250.000	232.674	93,07%			
				Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	100	100	100,00%			
				Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya/Latihan dasar kepemimpinan	orang	200	200	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya/Sosialisasi bahaya Narkoba dan HIV ADIS	orang	100	100	100,00%			
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			675.000	665.795	98,64%			
				Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Orang	120	120	100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha			300.000	290.813	96,94%			
				Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	orang	262	262	100,00%			
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota			375.000	374.982	100,00%			
				Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	dokumen	5	5	100,00%			
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			16.884.446	#####	99,72%			
				Cakupan pembinaan olahraga	%	92	92	100,00%			
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.786.327	1.740.980	97,46%			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	5	5	100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			1.786.327	1.740.980	97,46%			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	unit	5	5	100,00%			
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			691.408	690.570	99,88%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	6	6	100,00%			
			Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			691.408	690.570	99,88%			
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	6	6	100,00%			
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			5.406.711	5.405.816	99,98%			
				Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	400	400	100,00%			
			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota			915.712	914.823	99,90%			
				Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	400	400	100,00%			
			Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota			4.471.000	4.471.000	100,00%			
				Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang	244	204	83,61%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga			19.999	19.993	99,97%			
				Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	1	1	100,00%			
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			9.000.000	9.000.000	100,00%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	0	0	0,00%			
				Jumlah Dokumen Hasil engembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	62	62	100,00%			
			Pengembangan Organisasi Keolahragaan			9.000.000	9.000.000	100,00%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	organisasi	62	62	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			1.000.000	1.000.000	100,00%			
				<i>Presentase organisasi pramuka yang aktif</i>	%	100	100	100,00%			
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			1.000.000	1.000.000	100,00%			
				Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	1	1	100,00%			
			Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			1.000.000	1.000.000	100,00%			
				Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	1	1	100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					136.036	136.036	71,65%	- Terdapat beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu lama menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran - Belum tersedianya beberapa regulasi dari pusat yang mendukung pelaksanaan kegiatan di pemerintah daerah - Kesulitan dalam pengumpulan data statistik pada masing-masing perangkat daerah - Tantangan yang muncul adalah tuntutan berlomba dengan waktu yang tersedia hingga akhir tahun anggaran untuk memastikan seluruh kegiatan terlaksana dengan baik dan, tercapainya target yang ditentukan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	- dilakukan evaluasi terhadap faktor penghambat, untuk lebih meningkatkan upaya koordinasi atau kerjasama baik internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian target kinerja. - untuk lebih mempertahankan manajemen waktu, dan perencanaan pekerjaan dengan lebih mengoptimalkan ketersediaan SDM dan sarpras atau anggaran untuk mencapai kinerja yang sesuai dengan rencana sebagai bahan perbaikan tahun berikutnya.	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			136.036	97.469	71,65%			
				<i>Cakupan pelayanan data statistik sektoral</i>	%	100	100	100,00%			
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			136.036	97.469	71,65%			
				Jumlah dokumen statistik sektoral	Dokumen	1	1	100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			120.023	82.982	69,14%			
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1	1	100,00%			
			Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			16.013	14.488	90,48%			
				Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	200	200	100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					52.033	52.033	63,09%	- Terdapat beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu lama menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran - Belum tersedianya beberapa regulasi dari pusat yang mendukung pelaksanaan kegiatan di pemerintah daerah - Kesulitan dalam pengumpulan data statistik pada masing-masing	- dilakukan evaluasi terhadap faktor penghambat, untuk lebih meningkatkan upaya koordinasi atau kerjasama baik internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian target kinerja. - untuk lebih mempertahankan manajemen waktu,	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			52.033	32.830	63,09%			
				<i>Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian</i>	%	24	24	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			52.033	32.830	63,09%	perangkat daerah - Tantangan yang muncul adalah tuntutan berlomba dengan waktu yang tersedia hingga akhir tahun anggaran untuk memastikan seluruh kegiatan terlaksana dengan baik dan, tercapainya target yang ditentukan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	dan perencanaan pelaksanaan pekerjaan dengan lebih mengoptimalkan ketersediaan SDM dan sarpras atau anggaran untuk mencapai kinerja yang sesuai dengan rencana sebagai bahan perbaikan tahun berikutnya.		
			Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan keamanan informasi	PD	6	6	100,00%					
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			34.855	18.135	52,03%				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	1	100,00%					
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			17.178	14.695	85,54%				
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	7	7	100,00%					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					6.474.685	6.474.685	96,38%	Banyaknya pegawai yang pensiun dan ada yang meninggal dunia penyerapan membawa dampak pada penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta terkait sub kegiatan Kebudayaan ada pelaksanaan perlombaan yang tidak terlaksana karena tidak ada peserta yang mendaftar dan 1 kali pertemuan sarasehan kebudayaan tidak terlaksana dikarenakan ada sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) antara pusat dan daerah sesuai amanat aturan perundang-undangan yang baru.	Perlu dipikirkan cara-cara alternatif lain yang dapat dipakai dalam melestarikan kebudayaan. Ketiadaan peserta lomba kebudayaan mengisyaratkan bahwa ke depan harus dilakukan kegiatan lain yang mungkin bisa menarik minat generasi muda untuk melestarikan kebudayaan. Untuk masalah SDM yang semakin terbatas karena pensiun atau meninggal, dapat dilakukan dengan merekrut tenaga P3K yang diperlukan. Di sisi lain, Untuk menggairahkan pariwisata di Kudus, diperlukan kolaborasi Model Pentahelix dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Kudus.		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			3.834.967	3.627.696	94,60%				
				<i>Persentase Seni Budaya yang diaktualisasikan</i>	%	62	86,16	138,97%				
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.834.967	3.627.696			94,60%	
				Jumlah laporan triwulanan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	4	4	100,00%				
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			3.834.967	3.627.696			94,60%	
				Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	50	35	70,00%				
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			6.068	6.062			99,90%	
			<i>Jumlah Tema Dokumentasi Sejarah Lokal</i>	tema	1	1	100,00%					
			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			6.068	6.062	99,90%				
			Jumlah laporan kegiatan triwulanan pembinaan sejarah lokal	dokumen	4	4	100,00%					

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah			6.068	6.062	99,90%			
				Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	12	12	100,00%			
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			105.668	105.652	99,99%			
				<i>Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu</i>	%	20	78	390,00%			
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			36.993	36.977	99,96%			
				Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	dokumen	4	4	100,00%			
			Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			21.998	21.986	99,95%			
				Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	buah	180	378	210,00%			
			Penetapan Cagar Budaya			14.995	14.991	99,98%			
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	buah	2	2	100,00%			
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			68.675	68.675	100,00%			
				Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pengelolaan CB tk. Kab/Kota	dokumen	4	4	100,00%			
			Pelindungan Cagar Budaya			68.675	68.675	100,00%			
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	37	249	672,97%			
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			2.527.982	2.501.001	98,93%			
				<i>Persentase Museum Tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola</i>	%	100	100	100,00%			
			Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			2.527.982	2.501.001	98,93%			
				Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	dokumen	4	4	100,00%			
			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu			473.894	467.033	98,55%			
				Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	unit	4897	5900	120,48%			
			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			786.262	775.451	98,62%			
				Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat	unit	1	1	100,00%			
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			1.267.826	1.258.517	99,27%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	10	10	100,00%			
	KECAMATAN KALIWUNGU					9.995	9.995	99,75%	Seiring dengan bertambahnya pekerjaan berbasis IT, kebutuhan kuota internet kantor terkadang over limit yang mengakibatkan kecepatan dalam mengakses software menjadi lebih lama. direncanakan pada tahun 2024 akan diajukan penambahan kuota internet yang pada ujungnya akan meningkatkan kinerja perkantoran.	capaian kinerja sudah tergolong tinggi, tingkatkan dan pertahankan di periode anggaran berikutnya	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			9.995	9.970	99,75%			
				cakupan pengembangan kebudayaan	%	100	100	100,00%			
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			9.995	9.970	99,75%			
				Jumlah pelaksanaan kesenian tradisional dalam daerah kabupaten/kota	kali	1	1	100,00%			
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			9.995	9.970	99,75%			
				Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	kali	1	1	100,00%			
	KECAMATAN KOTA KUDUS					13.882	13.882	100,00%	Kegiatan terlaksana tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan di awal perencanaan	capaian kinerja sudah mencapai 100%, pertahankan di periode anggaran berikutnya	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			13.882	13.882	100,00%			
				Cakupan pengembangan kebudayaan	%	100	100	100,00%			
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			13.882	13.882	100,00%			
				Jumlah kegiatan pelestarian kesenian tradisional di Kecamatan Kota	kegiatan	1	1	100,00%			
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			13.882	13.882	100,00%			
				Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	1	1	100,00%			
	KECAMATAN JATI					11.925	11.925	93,98%	Kegiatan terlaksana tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan diawal perencanaan	capaian sudah tinggi, pertahankan diperiode tahun selanjutnya	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			11.925	11.207	93,98%			
				Cakupan pengembangan kebudayaan	%	100	100	100,00%			
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			11.925	11.207	93,98%			
				Jumlah pelaksanaan kesenian tradisional dalam daerah kabupaten/kota	kali	1	1	100,00%			
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			11.925	11.207	93,98%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				terlaksananya festival budaya	kali	1	1	100,00%			
	KECAMATAN UNDAAN					10.572	10.572	76,33%	Kegiatan terlaksana tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan	hasil sudah maksimal, pertahankan di periode tahun selanjutnya	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			10.572	8.070	76,33%			
				cakupan pengembangan kebudayaan (undaan)	%	100	100	100,00%			
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			10.572	8.070	76,33%			
				Jumlah fasilitasi pentas sei dan budaya lokal	kegiatan	2	2	100,00%			
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			10.572	8.070	76,33%			
				Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	3	3	100,00%			
	KECAMATAN MEJOBLO					12.704	12.704	69,43%	Fungsi Kecamatan sebagai Fasilitasi menjadi penyebab tidak terserapnya anggaran secara maksimal karena tergantung dengan OPD Pengampu kegiatan.	capaian kinerja sudah tergolong tinggi, tingkatkan dan pertahankan di periode anggaran berikutnya	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			12.704	8.820	69,43%			
				Cakupan Pengembangan Kebudayaan (Mejoblo)	%	100	100	100,00%			
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			12.704	8.820	69,43%			
				Jumlah kegiatan Pengembangan kebudayaan	Kegiatan	1	1	100,00%			
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan								
				Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	1	1	100,00%			
	KECAMATAN JEKULO					10.000	10.000	90,00%	Fungsi Kecamatan sebagai Fasilitasi menyebabkan sebagian Sub Kegiatan dalam capaian kinerja dan serapan anggaran tergantung dengan OPD Lain	tampak realisasi sudah termasuk tinggi, tingkatkan capaian di tahun-tahun mendatang	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			10.000	9.000	90,00%			
				Cakupan Pengembangan Kebudayaan	%	100	100	100,00%			
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			10.000	9.000	90,00%			
				Jumlah Pelaksanaan Festival seni dan Budaya	kali	1	1	100,00%			
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		10.000	9.000	90,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah obyek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	obyek	1	1	100,00%			
	KECAMATAN BAE					12.099	12.099	90,60%	Kegiatan terlaksana tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan	capaian kinerja sudah tergolong tinggi, tingkatkan dan pertahankan di periode anggaran berikutnya	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			12.099	10.962	90,60%			
				<i>Cakupan Pengembangan Kebudayaan (Bae)</i>	%	100	90,01	90,01%			
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			12.099	10.962	90,60%			
				Jumlah pelaksanaan festival seni dan budaya	kali	1	1	100,00%			
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			12.099	10.962	90,60%			
				jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan	kali	1	1	100,00%			
	KECAMATAN GEBOG					12.549	12.549	95,62%	Kegiatan terlaksana tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan	capaian sudah 100%, pertahankan di tahun-tahun mendatang agar hasil maksimal	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			12.549	11.999	95,62%			
				<i>Cakupan kegiatan pengembangan kebudayaan</i>	kegiatan	1	1	100,00%			
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			12.549	11.999	95,62%			
				jumlah kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	kegiatan	1	1	100,00%			
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			12.549	11.999	95,62%			
				Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	1	1	100,00%			
	KECAMATAN DAWE					5.800	5.800	99,95%	Fungsi Kecamatan sebagai Fasilitas menjadi penyebab tidak terserapnya anggaran secara maksimal karena tergantung dengan OPD Pengampu kegiatan.	capaian sudah tergolong tinggi, namun ditahun mendatang diharapkan bisa ditingkatkan kembali	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			5.800	5.797	99,95%			
				<i>Cakupan Pengembangan Kebudayaan</i>	%	100	95,65	95,65%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			5.800	5.797	99,95%			
				Jumlah Festival seni dan budaya yang terlaksana	kali	1	1	100,00%			
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			5.800	5.797	99,95%			
				Jumlah festival seni dan budaya yang terlaksanakan	kali	1	1	100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					244.267	244.267	96,41%	Penetapan target kinerja pada triwulan IV sudah ada pencapaian 100 %, ada juga yang belum mencapai sesuai target , yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, sehingga untuk indikator yang rendah akan akan lebih mudah dalam pencapaian target kinerja, sedangkan target kinerja yg tinggi kemungkinan lebih sulit dalam pencapaian kinerja dikarenakan adanya perubahan anggaran dan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, sedangkan jika target kinerja tinggi sehingga dalam capaian lebih sulit dicapai meskipun ada target yang tercapai meskipun baru pada triwulan II, perubahan target indikator perlu dilakukan agar realisasi capaian indikator dapat dicapai	- dilakukan evaluasi terhadap faktor penghambat, untuk lebih meningkatkan upaya koordinasi atau kerjasama baik internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian target kinerja. - untuk lebih mempertahankan manajemen waktu, dan perencanaan pelaksanaan pekerjaan dengan lebih mengoptimalkan ketersediaan SDM dan sarpras atau anggaran untuk mencapai kinerja yang sesuai dengan rencana sebagai bahan perbaikan tahun berikutnya.	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			244.267	235.491	96,41%			
				Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	%	9	2,36	26,22%			
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			191.920	183.862	95,80%			
				Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	10	10	100,00%			
			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			88.182	87.985	99,78%			
				Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	10	10	100,00%			
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			103.738	95.877	92,42%			
				Jumlah penambahan koleksi bahan pustaka digital	Eksemplar	666	666	100,00%			
				Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	31364	31364	100,00%			
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			52.347	51.629	98,63%			
				jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial diwilayah Kab/Kota yang dikembangkan	perpustakaan	4	4	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			52.347	51.629	98,63%			
				Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	4	4	100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			331.687	331.687	94,66%	<p>Penetapan target kinerja pada triwulan IV sudah ada pencapaian 100 %, ada juga yang belum mencapai sesuai target , yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, sehingga untuk indikator yang rendah akan akan lebih mudah dalam pencapaian target kinerja, sedangkan target kinerja yg tinggi kemungkinan lebih sulit dalam pencapaian kinerja dikarenakan adanya perubahan anggaran dan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, sedangkan jika target kinerja tinggi sehingga dalam capaian lebih sulit dicapai meskipun ada target yang tercapai meskipun baru pada triwulan II, perubahan target indikator perlu dilakukan agar realisasi capaian indikator dapat dicapai</p>	<p>- dilakukan evaluasi terhadap faktor penghambat, untuk lebih meningkatkan upaya koordinasi atau kerjasama baik internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian target kinerja. - untuk lebih mempertahankan manajemen waktu, dan perencanaan pelaksanaan pekerjaan dengan lebih mengoptimalkan ketersediaan SDM dan sarpras atau anggaran untuk mencapai kinerja yang sesuai dengan rencana sebagai bahan perbaikan tahun berikutnya.</p>	
			<i>Persentase perangkat daerah yang melaksanakan jadwal retensi arsip</i>	%	32	32	100,00%				
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			275.473	265.899	96,52%			
				Jumlah Perangkat Daerah dan BUMD yang melaksanakan tertib arsip	OPD	10	11	110,00%			
			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			63.034	55.167	87,52%			
				Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	500	500	100,00%			
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			195.878	194.283	99,19%			
				Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	200	200	100,00%			
			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			16.562	16.448	99,31%			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	10	10	100,00%			
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			56.214	48.078	85,53%			
				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Berkas	100	100	100,00%			
			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			56.214	48.078	85,53%			
				Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	100	100	100,00%			

3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

* dalam ribu rupiah

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					194.999	194.999	91,77%	-	Disusun timeline aktivitas kinerja agar dapat melaksanakan tugas tepat waktu, disamping tetap tepat mutu, tepat administrasi dan tepat sasaran	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			149.999	145.568	97,05%			
				<i>persentase peningkatan produksi perikanan</i>	%	100	100,3	100,30%			
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			139.999	135.568	96,84%			
				Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	2210	2210,43	100,02%			
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			139.999	135.568	96,84%			
				Terlaksananya pelatihan budidaya Perikanan dan sekolah lapang	orang	45	45	100,00%			
				Tersusnya data statistik perikanan	paket	1	1	100,00%			
				Hibah Bantuan Perikanan Lele Pokdakan Barokah Sidomulyo Rt 2Rw 1 Jekulo	Paket	1	1	100,00%			
				Bantuan Budi Daya Ikan Lele Kelompok Pemuda Tani Bangkit Bersemi (Babe) Desa Undaan Kidul Kec. Undaan	Paket	1	1	100,00%			
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			10.000	10.000	100,00%			
				Jumlah produksi benih ikan	ekor	125000	86400	69,12%			
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			10.000	10.000	100,00%			
				Tersedianya pakan ikan dan kelengkapan pembibitan	paket	1	1	100,00%			
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			45.000	33.384	74,19%			
				<i>Persentase peningkatan produksi perikanan olahan</i>	<i>persen</i>	100	100,05	100,05%			
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			45.000	33.384	74,19%			
				Jumlah produksi perikanan olahan	ton	1877	1878	100,05%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			45.000	33.384	74,19%			
				Pembinaan dan Penumbuhan Kelompok (POKDAKAN/POKLAHSAR)	Kecamatan	9	9	100,00%			
				Forum Pokdakan dan Poklahsar	kali	6	6	100,00%			
				Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	Orang	45	45	100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					5.400.361	5.400.361	96,20%	<p>Banyaknya pegawai yang pensiun dan ada yang meninggal dunia</p> <p>penyerapan membawa dampak pada penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta terkait sub kegiatan Kebudayaan ada pelaksanaan perlombaan yang tidak terlaksana karena tidak ada peserta yang mendaftar dan 1 kali pertemuan sarasehan kebudayaan tidak terlaksana dikarenakan ada sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) antara pusat dan daerah sesuai amanat aturan perundang-undangan yang baru.</p>	<p>Perlu dipikirkan cara-cara alternatif lain yang dapat dipakai dalam melestarikan kebudayaan. Ketiadaan peserta lomba kebudayaan mengisyaratkan bahwa ke depan harus dilakukan kegiatan lain yang mungkin bisa menarik minat generasi muda untuk melestarikan kebudayaan. Untuk masalah SDM yang semakin terbatas karena pensiun atau meninggal, dapat dilakukan dengan merekrut tenaga P3K yang diperlukan. Di sisi lain, Untuk menggairahkan pariwisata di Kudus, diperlukan kolaborasi Model Pentahelix dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Kudus.</p>	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			2.392.249	2.319.733	96,97%			
				<i>Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang Pariwisata</i>	%	10	10	100,00%			
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			1.694.285	1.686.739	99,55%			
				Jumlah Laporan Triwulanan kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	dokumen	4	4	100,00%			
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			1.694.285	1.686.739	99,55%			
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	11	11	100,00%			
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			697.964	632.994	90,69%			
				Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	dokumen	4	4	100,00%			
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			697.964	632.994	90,69%			
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100,00%			
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			2.613.112	2.541.879	97,27%			
				<i>Persentase kenaikan PAD sektor pariwisata</i>	<i>persen</i>	14	12,05	86,07%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<i>Persentase peningkatan promosi pariwisata</i>	<i>persen</i>	15	61	406,67%			
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			2.613.112	2.541.879	97,27%			
				Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	dokumen	4	4	100,00%			
			Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			2.613.112	2.541.879	97,27%			
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	12	12	100,00%			
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			395.000	333.661	84,47%			
				<i>Persentase pertumbuhan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>	%	2	2	100,00%			
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			395.000	333.661	84,47%			
				"Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	dokumen	0	0	0%			
				"Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	dokumen	4	4	100,00%			
			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			395.000	333.661	84,47%			
				Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	40	40	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					13.471.828	13.471.828	98,76%	-	Disusun timeline aktivitas kinerja agar dapat melaksanakan tugas tepat waktu, disamping tetap tepat mutu, tepat administrasi dan tepat sasaran	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			10.000	10.000	100,00%			
				<i>Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian</i>	%	100	89,88	89,88%			
				<i>persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan</i>	%	100	102,37	102,37%			
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			10.000	10.000	100,00%			
				Jumlah benih padi bersertifikat yang tersedia	ton	3	3,1	103,33%			
			Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak			10.000	10.000	100,00%			
				Tersedianya sarpras pembenihan padi	paket	1	1	100,00%			
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			12.594.584	12.462.736	98,95%			
				<i>Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian</i>	<i>persen</i>	100	100	100,00%			
				<i>persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan</i>	<i>persen</i>	100	102,37	102,37%			
			Pengembangan Prasarana Pertanian			25.068	23.655	94,37%			
				Jumlah petani yang meningkat ketrampilannya di bidang budidaya tanaman perkebunan	orang	150	150	100,00%			
			Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan			25.068	23.655	94,37%			
				Terlaksananya Pelatihan petani perkebunan	paket	1	1	100,00%			
			Pembangunan Prasarana Pertanian			12.569.516	12.439.081	98,96%			
				Jumlah infrastruktur pertanian kondisi baik	km	454	476	104,85%			
				Jumlah alsintan yang siap pakai	unit	115	115	100,00%			
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			2.191.512	2.185.451	99,72%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Terlaksananya rehab jaringan irigasi	paket	15	14	93,33%			
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			9.749.999	9.652.171	99,00%			
				Terlaksananya rehab jalan usaha tani	unit	62	64	103,23%			
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya			420.000	416.046	99,06%			
				Terlaksananya Rehab BPP	unit	2	2	100,00%			
				Jasa konsultasi Perencanaan	paket	1	1	100,00%			
				Jasa Konsultasi Pengawasan	paket	1	1	100,00%			
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			208.005	185.413	89,14%			
				Terlaksananya perawatan alsintan	Unit	115	115	100,00%			
				Permohonan Bantuan Tractor Quick GAPOKTAN TAMBAH MAKMUR Desa Banget	unit	1	1	100,00%			
				Bantuan Hand Traktor untuk Kelompok Tani BAROKAH LORAM KULON Kec. Jati	Unit	1	1	100,00%			
				Permohonan Bantuan Pompa Air	Unit	2	2	100,00%			
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			544.745	534.699	98,16%			
				<i>persentase peningkatan produksi peternakan</i>	%	100	85,87	85,87%			
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			384.745	377.842	98,21%			
				Jumlah peningkatan populasi ternak besar	ekor	11211	10220	91,16%			
			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			384.745	377.842	98,21%			
				Terlaksananya Pelatihan pembuatan Pakan ternak Fermentasi	paket	1	1	100,00%			
				Tersedianya n2 cair, semen beku dan peralatan ib	paket	1	1	100,00%			
				Tersedianya obat-obatan ternak	paket	1	1	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Tersedianya sarana prasarana kesehatan hewan dan kesmavet	paket	1	1	100,00%			
				Terlaksananya Uji darah dan uji produk hasil ternak	paket	1	1	100,00%			
				Tersusunnya data peternakan	paket	1	1	100,00%			
				Terlaksananya Pelatihan budidaya peternakan	orang	50	50	100,00%			
				Hibah Ternak kambing dan Kandang " Setia Jaya " Desa Bakalan Krapyak	paket	1	1	100,00%			
				Bantuan ternak kabing Gapoktan "Sumber Makmur" Payaman	paket	1	1	100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			25.000	24.011	96,04%			
				Jumlah hewan yang disembelih sesuai standart ASUH(Aman, sehat, utuh dan halal)	ekor	1400	1210	86,43%			
			Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium			10.000	9.749	97,49%			
				Terseleenggaranya operasional dan pengelolaan upt puskesmas	paket	1	1	100,00%			
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			15.000	14.262	95,08%			
				Terseleenggaranya operasional dan pengelolaan rumah potong hewan	paket	1	1	100,00%			
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			135.000	132.846	98,40%			
				Jumlah wira usaha peternakan yang difasilitasi	orang	200	200	100,00%			
			Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan			135.000	132.846	98,40%			
				Terlaksananya Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	bulan	12	12	100,00%			
				Terwujudnya Pengembangan usaha agribisnis peternakan	paket	1	1	100,00%			
				Bantuan Hibah Alat Pembuat Pakan Permentasi dan Sarpras Kandang Ternak Kambing kepada Kelompok Ternak JEPANG BERDAYA	paket	1	1	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Terlaksananya Pembinaan dan peningkatan teknologi sarana prasarana peternakan	paket	1	1	100,00%			
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			194.000	180.557	93,07%			
				<i>persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan</i>	<i>persen</i>	100	102,37	102,37%			
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			194.000	180.557	93,07%			
				Jumlah petani yang meningkat ketrampilannya di bidang budidaya tanaman pangan dan hortikultura	orang	200	200	100,00%			
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			194.000	180.557	93,07%			
				Pelatihan Budidaya, pengendalian OPT, dan Pasca Panen Tanaman Pangan/Hortikultura	orang	25	25	100,00%			
				Pelatihan Kompetensi Petugas Statistik Tanaman Pangan/hortikultura	orang	60	30	50,00%			
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			128.500	116.918	90,99%			
				<i>Persentase peningkatan kapasitas petani dalam menerapkan pengetahuan maupun teknologi pertanian</i>	<i>persen</i>	100	100	100,00%			
				<i>persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan</i>	<i>persen</i>	100	102,37	102,37%			
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			128.500	116.918	90,99%			
				Jumlah Gapoktan yang difasilitasi dalam menyusun RDKK	Kelompok	123	112	91,06%			
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			128.500	116.918	90,99%			
				Terlaksananya Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan (penyusunan rdck, pelatihan teknologi pertanian, lomba penyuluhan pertanian)	paket	1	1	100,00%			
				Terlatihnya kader saka taruna bumi	orang	50	50	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					15.000	15.000	100,00%	SDM tidak sesuai dengan kompetensi. overkapasitas beban pekerjaan	evaluasi faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja, dan evaluasi target kinerja tahun ini yang belum sesuai dengan perencanaan, sebagai upaya perbaikan perencanaan kegiatan di tahun mendatang	
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			15.000	15.000	100,00%			
				Persentase tutupan lahan	%	0,48	26,86	5595,83%			
				Persentase tutupan lahan tahura	%	19,9	26,86	134,97%			
			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota			15.000	15.000	100,00%			
				Jumlah akumulasi tanaman dalam tahura	batang	200	270	135,00%			
			Keajaiban Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota			15.000	15.000	100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					1.950	1.950	75,90%	1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dari sisi kuantitas dan kualitas serta sarpras berupa kendaraan dinas operasional untuk peninjauan lapangan terkait perizinan dan pengawasan penanaman modal; 2. Penyelesaian kinerja terkait dengan kinerja OPD lain, sehingga kecepatan kinerja pihak eksternal akan mempengaruhi pencapaian proses kinerja di penetapan kebijakan; 3. Belum	Dengan adanya penambahan SDM & kendaraan dinas pada DPMPSTSP, diharapkan pada pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I 2024, permasalahan SDM & mobilitas kerja akan teratasi. Untuk penyelesaian kinerja OPD yang membutuhkan koordinasi dgn OPD lain, dapat disusun SOP penyelesaian pekerjaan yang disepakati oleh semua OPD yang terlibat, sehingga dapat dipantau dan diukur bersama. Penyusunan RDTR harus terus diupayakan, untuk menunjang penawaran investasi di Kabupaten Kudus kepada calon investor.	
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			1.950	1.480	75,90%			
				cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	persen	100	100	100,00%			
			Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.950	1.480	75,90%			
				Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan langsung panas bumi	kali	2	2	100,00%			
			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.950	1.480	75,90%			
				Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									tersedia RDTR sebagai acuan yang lebih detail tentang Tata Ruang Investasi;		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN					7.452.959	7.452.959	96,26%	Kurangnya koordinasi dengan pengusaha ekspor dan pengelola sarana distribusi perdagangan	Penetapan target indikator agar lebih SMART dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, personil , dan kondisi eksternal yang berpengaruh dalam pencapaian target indikator.	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			6.534.741	6.488.078	99,29%			
				Cakupan pengelolaan pasar rakyat	%	95	95	100,00%			
				Kontribusi Pendapatan Pasar terhadap PAD	%	4,5	2,996	66,58%			
				Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana gudang SRG	%	10	0	0,00%			
				Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pasar rakyat	%	10	10	100,00%			
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			6.516.991	6.474.357	99,35%			
				Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	Unit	29	29	100,00%			
				Jumlah sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun/ Direvitalisasi	Unit	20	20	100,00%			
				Realisasi penerimaan retribusi		1097000000	10268248273	93,60%			
				Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	143	143	100,00%			
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			1.860.035	1.837.197	98,77%			
				Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit	20	20	100,00%			
				Jumlah Pasar yang Direvitalisasi atau dibangun	Unit	20	11	55,00%			
				Jumlah Gudang yang direvitalisasi atau dibangun	unit	1	0	0,00%			
			Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			4.656.956	4.637.161	99,57%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	143	143	100,00%			
				Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar	%	4,4	-1,94	-44,09%			
				Penerimaan Retribusi Pasar	rupiah	10837000000	8719917655	80,46%			
				Penerimaan Retribusi Gudang	rupiah	80000000	0	0,00%			
				Penerimaan Retribusi Trade Center	rupiah	530000000	485754309	91,65%			
				Terlaksananya Kebersihan Pasar	%	100	80	80,00%			
				Terlaksananya Keamanan Pasar	%	100	80	80,00%			
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			17.750	13.721	77,30%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	12	12	100,00%			
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			17.750	13.721	77,30%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	12	12	100,00%			
				Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	Pengelola	142	139	97,89%			
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			246.576	222.265	90,14%			
				Cakupan pembinaan fasilitas perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi	%	100	95	95,00%			
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			222.499	211.259	94,95%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah laporan pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Laporan	0	0	0%			
				Jumlah Laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kotag Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	laporan	0	0	0%			
				"Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota"	Laporan	240	240	100,00%			
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			12.499	11.032	88,26%			
				Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	laporan	360	360	100,00%			
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			210.000	200.227	95,35%			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100,00%			
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			24.077	11.006	45,71%			
				Jumlah Laporan Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	36	36	100,00%			
			Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan			10.000	4.580	45,80%			
				Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen	36	36	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Distributor Pupuk bersubsidi dan KPL yang diperiksa Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pelaku	141	141	100,00%			
			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			6.447	2.503	38,83%			
				Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	kali	12	12	100,00%			
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			7.630	3.923	51,41%			
				Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	12	12	100,00%			
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			273.788	107.275	39,18%			
				Nilai Ekspor	Rupiah	1,65757E+12	1,12511E+12	67,88%			
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			273.788	107.275	39,18%			
				Jumlah laporan keikutsertaan promosi dagang	Laporan	1	1	100,00%			
			Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota			28.788	13.721	47,66%			
				Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Pelaku Usaha	2	36	1800,00%			
				Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Ekspor	Orang	30	19	63,33%			
			Peningkatan Citra Produk Ekspor			245.000	93.554	38,19%			
				Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	7	13	185,71%			
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			71.422	45.471	63,66%			
				Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen	%	95	88	92,63%			
				Prosentase fasilitasi perlindungan konsumen	%	20	20	100,00%			
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			71.422	45.471	63,66%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah laporan pelaksanaan tera dan tera ulang	Laporan	12	12	100,00%			
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			57.422	36.021	62,73%			
				Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	11151	10003	89,70%			
				Realisasi Retribusi Tera/ Tera Ulang	Rupiah	175500000	168621500	96,08%			
			Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal			14.000	9.450	67,50%			
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	100	125	125,00%			
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			326.432	311.285	95,36%			
				Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	%	70	70	100,00%			
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			326.432	311.285	95,36%			
				Jumlah laporan pelaksanaan pameran produk dalam negeri	laporan	1	1	100,00%			
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			138.000	131.861	95,55%			
				Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	600	620	103,33%			
				Jumlah PKL yang dibina	Orang	250	250	100,00%			
			Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan			188.432	179.424	95,22%			
				Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	1	1	100,00%			
				Jumlah PKL yang berjualan ditempat yang diijinkan	Orang	250	260	104,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					28.288.338	28.288.338	86,81%	Pelaksanaan kegiatan bersumber dari DBHCHT terutama pekerjaan konstruksi harus sesuai tahapan (guideline dari Kemenperin) sehingga administrasi pekerjaan ada yang belum bisa dilaksanakan akan. Kegiatan di BLK terdapat paket pelatihan pemandu wisata sebanyak 8 paket terlaksana 5 paket karena kendala di LPSE saat pengadaan tender. Sistem eror sehingga kehabisan waktu untuk pelaksanaannya hanya bisa 5 paket	Untuk tahun berikutnya agar mengacu pada Renstra, Renja, RKO yang sudah ada dan kegiatan paket pekerjaan segera dilaksanakan diawal tahun.		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			28.288.338	24.556.657	86,81%				
				Peningkatan Pertumbuhan IKM	persen	0,4	0,43	107,50%				
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			28.288.338	24.556.657	86,81%				
				Dokumen DED SIHT	doc	1	1	100,00%				
				Dokumen UKL-UPL	doc	1	1	100,00%				
				Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	doc	1	1	100,00%				
				Master plan	doc	1	1	100,00%				
				Pemasangan lampu LPJU KIHT	unit	35	20	57,14%				
				Pembangunan drainase terpasang SIHT Kudus	paket	1	1	100,00%				
				Pembangunan gedung SIHT Kudus	unit	0	0	0%				
				Pembangunan Jalan SIHT Kudus	paket	0	0	0%				
				Pembangunan kantor pengelola SIHT Kudus	paket	0	0	0%				
				Pembangunan pagar keliling samping kanan KIHT	paket	1	1	100,00%				
				Pembangunan pagar pembatas untuk SIHT	paket	1	1	100,00%				
				Pembangunan pos hanggar bea cukai SIHT Kudus	paket	1	0	0,00%				
				Pembangunan pos keamanan KIHT	paket	1	1	100,00%				
				Pembangunan ruang gas KIHT	paket	1	1	100,00%				
				Pembinaan IHT	doc	1	1	100,00%				
				Pendataan mesin pelinting rokok pada IHT di Kabupaten Kudus	unit	90	90	100,00%				
				Penerangan untuk SIHT Kudus	paket	2	0	0,00%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan alat pemadam kebakaran untuk KIHT Kudus	unit	15	15	100,00%			
				Pengadaan dan pemasangan CCTV KIHT	unit	16	16	100,00%			
				Pengadaan dan pemasangan CCTV SIHT	unit	0	0	0%			
				Pengadaan pintu gerbang	paket	1	0	0,00%			
				Pengelolaan KIHT	kgt	3	3	100,00%			
				Studi kelayakan pembangunan SIHT	doc	1	1	100,00%			
				Andalalin dan Pertek pemenuhan baku mutu air limbah	dok	1	1	100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			6.437.756	5.855.316	90,95%			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dok	8	8	100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			21.787.452	18.642.592	85,57%			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dok	5	5	100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			58.130	55.856	96,09%			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan industri dan Peran Serta Masyarakat	dok	2	2	100,00%			
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			5.000	2.892	57,84%			
				Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dok	1	1	100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					2.999	2.999	100,00%	Pelaksanaan kegiatan bersumber dari DBHCHT terutama pekerjaan konstruksi harus sesuai tahapan (guideline dari	Untuk tahun berikutnya agar mengacu pada Renstra, Renja, RKO yang sudah ada dan kegiatan paket pekerjaan segera dilaksanakan diawal tahun.	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			2.999	2.999	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<i>Persentase Calon Transmigran yang Terfasilitasi</i>	%	25	25	100,00%	Kemenperin) sehingga administrasi pekerjaan ada yang belum bisa dilaksanakan. Kegiatan di BLK terdapat paket pelatihan pemandu wisata sebanyak 8 paket terlaksana 5 paket karena kendala di LPSE saat pengadaan tender. Sistem eror sehingga kehabisan waktu untuk pelaksanaannya hanya bisa 5 paket		
			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			2.999	2.999	100,00%			
				Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Dok	1	1	100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			2.999	2.999	100,00%			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	dok	1	1	100,00%			

3.1.4. Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan

* dalam ribu rupiah

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					3.566.655	3.566.655	83,09%	Kurang tepatnya perhitungan waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga terdapat 1 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan	Disusun timeline aktivitas kinerja agar dapat melaksanakan tugas tepat waktu, disamping tetap tepat mutu, tepat administrasi dan tepat sasaran		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			2.880.134	2.379.402	82,61%				
				Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu	persen	100	100	100,00%				
				Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	persen	100	100	100,00%				
				Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	persen	100	100	100,00%				
				Persentase pengakomodasian usulan musrenbang dalam perencanaan pembangunan	persen	100	100	100,00%				
				Persentase keterisian data data perencanaan pembangunan	persen	65	65	100,00%				
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			2.055.342	1.611.258	78,39%				
				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	5	5	100,00%				
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			414.826	280.818	67,70%				
				Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2	2	100,00%				
				Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	2	2	100,00%				
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD			84.533	81.020	95,84%				
				Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	100,00%				
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			63.383	59.304	93,57%				
				Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	100,00%				
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			5.488	5.488	100,00%				
				Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	482	771	159,96%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			1.487.112	1.184.628	79,66%			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	3	100,00%			
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			612.051	598.255	97,75%			
				Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	Dokumen	3	3	100,00%			
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			612.051	598.255	97,75%			
				Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	1	100,00%			
				Jumlah laporan perencanaan pembangunan menurut sumber dana (DAK dan BANGUB)	Dokumen	2	2	100,00%			
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			212.740	169.890	79,86%			
				Tersedianya Dokumen Laporan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2	2	100,00%			
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			212.740	169.890	79,86%			
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3	3	100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			686.521	584.131	85,09%			
				<i>Indeks kualitas perencanaan bidang Pemsosbud</i>		100	100	100,00%			
				<i>Indeks kualitas perencanaan bidang Praswil, Ekonomi, SDA</i>	<i>Indeks</i>	100	100	100,00%			
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			451.400	359.861	79,72%			
				Jumlah laporan hasil koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	dok	5	5	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			115.000	82.406	71,66%			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	100,00%			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			336.400	277.456	82,48%			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	4	100,00%			
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			166.194	157.467	94,75%			
				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perekonomian dan SDA & LH	Dokumen	3	3	100,00%			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			92.631	89.211	96,31%			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	100,00%			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			73.563	68.256	92,79%			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	100,00%			
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			68.927	66.802	96,92%			
				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	Dokumen	1	1	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			68.927	66.802	96,92%			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	100,00%			
KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH					295.997.366	295.997.366	98,43%	Belanja tidak terduga digunakan untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan biaya pemakaman penduduk miskin, penanganan pengungsi terdampak bencana dan santunan bagi warga sakit di RS kelas III sehingga realisasinya sesuai jumlah pengajuan.	Capaian kinerja tahun 2023 sudah bagus, untuk tahun 2024 agar pencapaian kinerja diupayakan dapat melampaui target yang telah ditetapkan, terutama pada indikator yang memiliki dampak yang lebih luas dalam peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan.	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			287.340.987	284.195.201	98,91%			
				<i>Capaian realisasi pembayaran belanja PD</i>	<i>persen</i>	95	88,38	93,03%			
				<i>Penyelesaian tahapan/proses pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan</i>	<i>persen</i>	100	100	100,00%			
				<i>Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan</i>	<i>persen</i>	100	100	100,00%			
				<i>Penyelesaian tahapan/proses penganggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan</i>	<i>persen</i>	100	100	100,00%			
				<i>Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</i>	<i>persen</i>	100	99,73	99,73%			
				<i>Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan perundang-undangan</i>	<i>persen</i>	100	100	100,00%			
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			961.392	844.705	87,86%			
				Jumlah Dokumen Anggaran Daerah	Dok	8	8	100,00%			
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			288.041	264.374	91,78%			
				Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	100,00%			
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			164.549	118.144				
				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			316.509	298.918	94,44%			
				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	100,00%			
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			192.294	163.269	84,91%			
				Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	100,00%			
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			315.024	304.874	96,78%			
				Jumlah dokumen Laporan Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Dok	12	12	100,00%			
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			140.696	138.986	98,78%			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	4	4	100,00%			
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			73.265	72.528	98,99%			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	80	79	98,75%			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			20.943	18.875	90,13%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Penerimaan dan Pengeluaran	Laporan	6954	6740	96,92%			
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			80.120					
				Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	10	25	250,00%			
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			591.107	495.449	83,82%			
				Jumlah Laporan tahapan penyusunan LKPD	Dok	1	1	100,00%			
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			62.670	54.622	87,16%			
				Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	18	18	100,00%			
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			251.680	236.258	93,87%			
				Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	1	1	100,00%			
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			264.325	204.570	77,39%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	100,00%			
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			5.766	0	0,00%			
				Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	0,5	50,00%			
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			6.666	0	0,00%			
				Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	0,5	50,00%			
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			285.473.465	282.550.173	98,98%			
				Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dok	36	36	100,00%			
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			259.625.882	259.574.105	99,98%			
				Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	12	12	100,00%			
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			5.233.454	2.366.477	45,22%			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	12	12	100,00%			
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota			20.614.129	20.609.592	99,98%			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			6.768.712	5.385.366	79,56%			
				Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	persen	90	99,99	111,10%			
			Pengelolaan Barang Milik Daerah			6.768.712	5.385.366	79,56%			
				Jumlah Laporan Pengelolaan BMD	Dok	12	12	100,00%			
			Penyusunan Standar Harga			271.465	245.530	90,45%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	2	100,00%			
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			124.199	102.680	82,67%			
				Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	100,00%			
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.247	252	20,22%			
				Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	100,00%			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah			100.000	75.047	75,05%			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	6	6	100,00%			
			Pengamanan Barang Milik Daerah			1.811.216	706.298	39,00%			
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Sertifikat	900	904	100,44%			
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			12.707	7.987	62,86%			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100,00%			
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			4.447.877	4.247.571	95,50%			
				Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	11	11	100,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			1.887.666	1.769.802	93,76%			
				Persentase Realisasi PAD	persen	100	105,99	105,99%			
			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			1.887.666	1.769.802	93,76%			
				Jumlah Realisasi PAD	Miliar	374	502,07	134,24%			
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah			25.807	20.227	78,38%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	2	100,00%			
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.			163.106	152.524	93,51%			
				Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	100,00%			
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			96.523	83.396	86,40%			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	1	100,00%			
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			13.278	13.278	100,00%			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	1	1	100,00%			
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			27.460	21.278	77,49%			
				Jumlah Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	OP/WP	15000	14097	93,98%			
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			60.000	58.747	97,91%			
				Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	1	100,00%			
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			10.443	5.329	51,03%			
				Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	16	16	100,00%			
			Penetapan Wajib Pajak Daerah			150.272	142.520	94,84%			
				Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	399000	399000	100,00%			
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			38.447	28.065	73,00%			
				Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	22500	27459	122,04%			
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			6.000	3.250	54,17%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	1	1	100,00%			
			Penagihan Pajak Daerah			805.989	796.030	98,76%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	100,00%			
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			9.196	6.795	73,89%			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	100	115	115,00%			
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			444.408	413.863	93,13%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	100,00%			
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			2.805	2.294	81,78%			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	1	100,00%			
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			33.934	22.207	65,44%			
				Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100,00%			
KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					4.561.224	4.561.224	80,51%	<p>Masih adanya Pelanggaran Disiplin menyebabkan target Persentase Perangkat Daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku tidak tercapai.</p> <p>Pencapaian Target Poin Penilaian Mandiri Merit Sistem pada Nilai Kriteria Peningkatan Kompetensi belum tercapai maksimal karena belum adanya penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan karier melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai, Pelaksanaan Coaching dan Mentoring belum terjadwal dan dievaluasi</p>	<p>Disarankan untuk perencanaan tahun depan lebih optimal sesuai kebutuhan opd dan lebih tepat sasaran</p>	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			4.561.224	3.672.067	80,51%			
				<i>Poin Penilaian Mandiri Merit Sistem Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karier, Mutasi Rotasi dan Promosi, Pengelolaan Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan, Sistem Pendukung</i>	<i>nilai</i>	<i>220,5</i>	<i>218</i>	<i>98,87%</i>			
				<i>Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG</i>	<i>persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00%</i>			
				<i>Persentase Pejabat eselon II, III, IV, dan JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi</i>	<i>persen</i>	<i>46</i>	<i>46,85</i>	<i>101,85%</i>			
				<i>Persentase layanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar</i>	<i>persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00%</i>			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Persentase Perangkat Daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku	persen	95	91,18	95,98%			
				Persentase perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian	persen	100	100	100,00%			
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			2.494.436	1.967.635	78,88%			
				Poin Penilaian Mandiri Merit Sistem pada Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Perlindungan dan Sistem Pendukung	skor	98	98	100,00%			
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			1.691.682	1.208.246	71,42%			
				Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	dokumen	18	14	77,78%			
				Jumlah dokumen Bezetting PNS yang tersusun	dokumen	1	1	100,00%			
				Jumlah dokumen Usulan Formasi PNS yang tersusun dan terkirim	dokumen	1	1	100,00%			
				E Formasi yang tersusun dan terkirim	dokumen	1	1	100,00%			
				Jumlah Kebutuhan ASN yang tersusun	formasi	559	559	100,00%			
				Update data e-formasi yang terlaksana	kali	1	1	100,00%			
				Jumlah tahapan Seleksi pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif yang dilaksanakan	kali	4	4	100,00%			
				Jumlah ASN yang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan formasi yang dilamar	orang	300	485	161,67%			
				Jumlah SK hasil pemrosesan pengangkatan CPNS	buah	300	413	137,67%			
				Jumlah fasilitasi pelaksanaan seleksi calon ASN	kali	1	1	100,00%			
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			305.551	291.478	95,39%			
				Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	dokumen	15	14	93,33%			
				Jumlah SK Pemberhentian PHD yang sesuai standar	buah	7	7	100,00%			
				Jumlah SK pensiun ASN yang sesuai standar	SK	450	467	103,78%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah data PNS yang akan memasuki masa pensiun dalam jangka waktu 5 tahun yang sudah tervalidasi (data)	data	1	1	100,00%			
				Jumlah usulan Pertimbangan Teknis Pensiun BUP yang terfasilitasi penerbitannya tepat waktu (usulan)	buah	450	466	103,56%			
				Jumlah Fasilitas Surat Keputusan Pensiun Tepat Waktu	sk	250	467	186,80%			
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			355.180	334.038	94,05%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	4	5	125,00%			
				Jumlah Bimbingan Teknis Pengembangan Aplikasi Simpeg	kali	1	0	0,00%			
				Jumlah Infrastruktur Pengembangan Simpeg (UPS, Internet, Hosting Server)	buah	3	3	100,00%			
				Jumlah aplikasi/modul SIMPEG yang dibangun ulang (upgrade) dan atau dikembangkan (update)	buah	1	2	200,00%			
				Jumlah pemeliharaan aplikasi/modul SIMPEG yang dilaksanakan	buah	1	1	100,00%			
				Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dengan Simpeg	buah	8	8	100,00%			
				Jumlah Aplikasi yang Dikembangkan dan Terintegrasi dengan simpeg	buah	7	8	114,29%			
			Pengelolaan Data Kepegawaian			142.023	133.874	94,26%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	dokumen	2	2	100,00%			
				Jumlah Data Kepegawaian Tersedia Secara Lengkap dan Akurat di Simpeg sebagai Profil Kepegawaian dan Sumber Data (tersusun berdasarkan jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi, kompetensi)	buah	6486	6486	100,00%			
				Jumlah dokumen tata naskah kepegawaian yang dikelola di Lemari Arsip	buah	6486	6486	100,00%			
				Jumlah Infrastruktur pendukung Simpeg yang terpelihara (pemeliharaan almari, Service server)	jenis	2	2	100,00%			
				Jumlah Informasi kepegawaian yang diupdate didalam website dan medsos BKPSDM	buah	41	172	419,51%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Laporan data kepegawaian sesuai dengan permintaan dari OPD lain	laporan	1	11	1100,00%			
				Jumlah Database Kepegawaian yang Diperbaharui secara Berkala Setiap Bulan	data	5	5	100,00%			
			Mutasi dan Promosi ASN			1.431.214	1.167.261	81,56%			
				Poin Penilaian Mandiri Merit Sistem pada Nilai Kriteria Mutasi Rotasi dan Promosi	skor	18	32,5	180,56%			
			Pengelolaan Mutasi ASN			25.000	7.570	30,28%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	21	32	152,38%			
				Jumlah SK Mutasi (SK Penetapan dan Penempatan PNS sesuai dengan kebutuhan ASN) yang diproses	SK	25	31	124,00%			
				Jumlah Surat Permintaan Persetujuan Mutasi (surat)	buah	25	28	112,00%			
				Jumlah surat rekomendasi Mutasi Masuk Pemkab. Kudus	buah	20	28	140,00%			
				Jumlah surat rekomendasi Mutasi Keluar Pemkab. Kudus	buah	5	15	300,00%			
				Jumlah Kebijakan Mutasi dan Rencana Pemenuhan Kebutuhan ASN melalui Pengisian dari Instansi Lain	Dokumen	1	1	100,00%			
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			115.102	107.331	93,25%			
				Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Jumlah usulan Kenaikan Pangkat yang terproses secara tepat waktu)	dokumen	700	697	99,57%			
				Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang diterbitkan	SK	700	697	99,57%			
				Fasilitasi Pendampingan dengan Kanreg I BKN	kali	2	2	100,00%			
				Jumlah Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian yang diselenggarakan	kali	2	2	100,00%			
				Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala Pimpinan yang diterbitkan	SK	12	17	141,67%			
				Jumlah Penetapan SK Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	sk	700	697	99,57%			
			Pengelolaan Promosi ASN			1.291.112	1.052.361	81,51%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	dokumen	52	64	123,08%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Sidang Tim Penilai Kinerja yang diselenggarakan di bidang Mutasi dan Promosi	kali	12	8	66,67%			
				Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas	orang	99	99	100,00%			
				Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI)	orang	23	23	100,00%			
				Jumlah pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan	kali	10	9	90,00%			
				Jumlah JPT Pratama yang diangkat/dimutasi	orang	1	6	600,00%			
				Jumlah Pengangkatan dan penataan PNS dalam Jabatan administrator dan pengawas yang sesuai dengan standart kompetensi (Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan)	SK	39	66	169,23%			
				Jumlah SK Pengangkatan/Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Fungsional Baru	SK	29	680	2344,83%			
				Jumlah SK Pengangkatan/Pelantikan Jabatan Fungsional hasil Penyesuaian/ Inpassing	SK	1	0	0,00%			
				Jumlah SK Pengangkatan/Pelantikan Jabatan Fungsional hasil Pengangkatan Perpindahan	SK	1	3	300,00%			
				Jumlah SK Pengangkatan/Pelantikan Jabatan Fungsional hasil Kenaikan Jabatan	SK	1	122	12200,00%			
				Jumlah SK Pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional yang diterbitkan	SK	1	2	200,00%			
				Jumlah kegiatan Seleksi Terbuka JPT Pratama yang diselenggarakan	kali	1	2	200,00%			
				Jumlah peserta tes Asesment JPT	orang	30	4	13,33%			
				Jumlah peserta Uji Kompetensi JPT	orang	14	14	100,00%			
				Jumlah peserta Uji Kompetensi Pejabat Fungsional	orang	1	2	200,00%			
				Jumlah SK Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional yang terproses	SK	20	34	170,00%			
				Jumlah SK Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang diterbitkan	SK	20	22	110,00%			
				Jumlah ASN yang mengikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji ASN yang baru diangkat	orang	23	23	100,00%			
				Jumlah SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional	SK	2	3	150,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah SK Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional	SK	1	16	1600,00%			
				Jumlah pengisian JPT dan JA berdasarkan Manajemen Tatenta	orang	200	93	46,50%			
			Pengembangan Kompetensi ASN			259.384	215.602	83,12%			
				Poin Penilaian Mandiri Merit Sistem pada Nilai Kriteria Pengembangan Karier	skor	43	62,5	145,35%			
				Jumlah ASN yang mengikuti Asesmen	orang	50	78	156,00%			
				Jumlah PNS yang dipetakan dalam Matriks Kinerja dan Potensi (Talent Pool)	orang	50	78	156,00%			
				Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Jabatan ASN (ASN)	orang	1	2	200,00%			
				Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dan kapasitas	orang	1021	1021	100,00%			
				Jumlah ASN yang mengajukan Ijin Belajar dan/atau Tugas Belajar	orang	100	135	135,00%			
				Jumlah ASN yang mendapatkan Surat Ijin Belajar dan/atau Tugas Belajar	orang	100	135	135,00%			
				Jumlah ASN yang mengajukan usul Penggunaan Gelar	orang	100	137	137,00%			
				Jumlah ASN yang mendapatkan Ijin Penggunaan Gelar dari BKN	orang	100	130	130,00%			
				Jumlah permohonan ijin magang yang disetujui	surat	35	80	228,57%			
			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			259.384	215.602	83,12%			
				Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	150	135	90,00%			
				Jumlah PNS yang mengikuti Sertifikasi Fungsional ASN (PNS)	orang	1	2	200,00%			
				Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun Pengelolaan karier ASN dalam Jabatan Fungsional	sk	300	135	45,00%			
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			376.191	321.568	85,48%			
				Poin Penilaian Mandiri Merit Sistem pada Nilai Kriteria Pengelolaan Kinerja	skor	35	57,5	164,29%			
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			64.921	57.478	88,53%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	dokumen	9	16	177,78%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTA SE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah ASN yang mengikuti Fasilitasi SKP	orang	285	225	78,95%			
				Jumlah Evaluasi SKP dan PKP lingkup OPD se-Kab. Kudus	dokumen	6486	6886	106,17%			
				Jumlah dokumen yang disusun terkait Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada ASN	dokumen	4	4	100,00%			
				Jumlah Pegawai yang Dilakukan Penilaian Kinerja yang Disertai Dialog Kinerja Setiap Tahun	dokumen	6542	6886	105,26%			
			Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai			18.548	5.420	29,22%			
				Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	orang	300	430	143,33%			
				Jumlah Usulan ASN yang Diberikan Tanda Jasa	orang	300	269	89,67%			
				Jumlah ASN yang Menerima Penghargaan Satya Lancana	orang	300	430	143,33%			
			Pembinaan Disiplin ASN			168.315	156.795	93,16%			
				Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	650	632	97,23%			
				Jumlah Sidang Tim Pembina Disiplin ASN	kali	3	3	100,00%			
				Frekuensi Pelaksanaan Pembinaan (Monitoring dan Evaluasi Disiplin)	kali	12	12	100,00%			
				Jumlah ASN yang mendapatkan Usulan Fasilitasi Tes Kesehatan PNS	orang	6	9	150,00%			
				Jumlah ASN yang mendapatkan Fasilitasi Tes Kesehatan PNS	orang	6	9	150,00%			
				Jumlah Pelaksanaan Senam di lingkungan kantor Bupati dalam setahun	kali	44	38	86,36%			
				Jumlah Wajib Laporan LHKPN yang terkelola	orang	100	100	100,00%			
				Jumlah Laporan LHKPN yang terselesaikan	orang	100	100	100,00%			
				Jumlah Usulan JKK / JKM	buah	1	1	100,00%			
				Jumlah JKK / JKM yang terselesaikan	buah	1	5	500,00%			
				Jumlah Usulan ASN yang mendapatkan Karis/Karsu/Karpeg/ Taspen	buah	191	13	6,81%			
				Jumlah realisasi pemberian Karis/Karsu/Karpeg/ Taspen	buah	191	13	6,81%			
				Jumlah Usulan Cuti yang ditangani BKPSDM	buah	423	460	108,75%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah realisasi surat Izin Cuti Sakit yang terproses	buah	3087	2323	75,25%			
				Jumlah realisasi surat Izin Cuti Alasan Penting yang terproses	buah	807	375	46,47%			
				Jumlah realisasi surat Izin Cuti Besar yang terproses	buah	147	49	33,33%			
				Jumlah realisasi surat Izin Cuti melahirkan yang terproses	buah	98	96	97,96%			
				Jumlah realisasi surat Izin Cuti tahunan yang terproses	buah	5646	7795	138,06%			
				Jumlah evaluasi daftar hadir PNS lingkup SKPD se Kab. Kudus (lewat aplikasi Sihadir)	dokumen	1	1	100,00%			
				Jumlah Laporan Pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti	Laporan	10	3	30,00%			
				Jumlah Unit Kerja yang Dilakukan Pembinaan Disiplin dan Kode Etik/Kode Perilaku	buah	3	3	100,00%			
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			93.873	80.718	85,99%			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	laporan	10	16	160,00%			
				Jumlah Kasus ASN yang masuk	buah	15	6	40,00%			
				Jumlah rekomendasi Penanganan Kasus ASN	buah	15	7	46,67%			
				Jumlah SK penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin	SK	16	8	50,00%			
				Jumlah Penegakan Disiplin, Pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang Telah Ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Telah Terupdate Datanya di SAPK	buah	14	8	57,14%			
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			30.534	21.159	69,29%			
				Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	dokumen	5	5	100,00%			
				Jumlah Permohonan Izin Perceraian Pegawai yang masuk	buah	11	17	154,55%			
				Jumlah SK dan Surat Keterangan Izin Perceraian yang terproses	buah	8	13	162,50%			
				Jumlah Izin Perceraian Pegawai yang Difasilitasi	buah	1	5	500,00%			
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.690.717	1.690.717	87,05%	Masih adanya Pelanggaran Disiplin menyebabkan target Persentase Perangkat Daerah yang berhasil melaksanakan kode	Disarankan untuk perencanaan tahun depan lebih optimal sesuai kebutuhan opd dan lebih tepat sasaran	

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			1.690.717	1.471.829	87,05%	etik/aturan perilaku tidak tercapai. Pencapaian Target Poin Penilaian Mandiri Merit Sistem pada Nilai Kriteria Peningkatan Kompetensi belum tercapai maksimal karena belum adanya penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan karier melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai, Pelaksanaan Coaching dan Mentoring belum terjadwal dan dievaluasi		
				<i>Poin Penilaian Mandiri Merit Sistem pada Nilai Kriteria Peningkatan Kompetensi</i>	nilai	15	10	66,67%			
				<i>Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun</i>	persen	8,08	8,24	101,98%			
			Pengembangan Kompetensi Teknis			1.182.177	1.107.391	93,67%			
				Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Teknis	%	100	16,67	16,67%			
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			1.182.177	1.107.391	93,67%			
				Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	orang	512	512	100,00%			
				Dokumen penetapan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi	dokumen	1	1	100,00%			
				Jumlah ASN yang memiliki sertifikat manajerial dan teknis (lulus)	orang	512	512	100,00%			
				Jumlah PNS yang dikirim bimtek/ seminar/ lokakarya/ workshop	orang	1210	1210	100,00%			
				Dokumen Hasil Evaluasi Dampak Diklat Teknis bagi pegawai	dokumen	1	1	100,00%			
				Jumlah ASN yang Memiliki Sertifikasi kompetensi/ STTPL Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah, Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	orang	512	512	100,00%			
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			508.540	364.438	71,66%			
				Persentase ASN yang lulus Pelatihan Manajerial dan Teknis	%	100	100	100,00%			
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			508.540	364.438	71,66%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTA SE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	laporan	25	19	76,00%			
				Jumlah pejabat struktural eselon II yang dikirim Diklatpim II	orang	5	5	100,00%			
				Jumlah pejabat struktural eselon III yang dikirim Diklatpim III	orang	5	5	100,00%			
				Jumlah pejabat struktural eselon IV yang dikirim Diklatpim IV	orang	7	7	100,00%			
				Jumlah CPNS yang dikirim Latsar	orang	2	2	100,00%			
				Jumlah ASN yang memiliki sertifikat manajerial dan teknis (lulus)	orang	19	19	100,00%			
				Dokumen Hasil Evaluasi Dampak Diklat Manajerial dan Fungsional	dokumen	1	1	100,00%			
				Jumlah ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/STTPL Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	orang	19	19	100,00%			
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					831.600	831.600	59,41%	Kurang tepatnya perhitungan waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga terdapat 1 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan	Disusun timeline aktivitas kinerja agar dapat melaksanakan tugas tepat waktu, disamping tetap tepat mutu, tepat administrasi dan tepat sasaran	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			831.600	494.075	59,41%			
				Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	Persen	100	100	100,00%			
				Persentase peningkatan hasil kelitbangan	Persen	100	100	100,00%			
				Persentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan daerah	persen	86	86	100,00%			
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		300.000	0	0,00%			
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		300.000	0	0,00%			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	1	0	0,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			115.000	95.487	83,03%			
				Jumlah rekomendasi, studi kelayakan, naskah akademik, dan inovasi teknologi bidang ekbang yang digunakan untuk perumusan kebijakan	Dokumen	1	1	100,00%			
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			115.000	95.487	83,03%			
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	1	100,00%			
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi			416.600	398.588	95,68%			
				Jumlah Dokumen pengembangan dan Inovasi	Dokumen	1	1	100,00%			
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			416.600	398.588	95,68%			
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	1	100,00%			

3.1.5. Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					489.629.152	489.629.152	81,22%	Realisasi Anggaran pada Sub Kegiatan yang Sumber Dana dari APBN (BOP PAUD, Dikmas, BOS SD dan SMP) yang pencairan langsung ke sekolah/lembaga sehingga dalam penSPJan menunggu Rekonsiliasi dari Pemerintah Pusat	jadikan tahun 2023 sebagai evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dengan mengoptimalkan capaian kinerja dan penyerapan anggaran agar tercapai target tahun 2024	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			489.629.152	397.661.666	81,22%			
			IKM atas kinerja Disdikpora	%	98,1	98,41	100,32%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			110.000	88.695	80,63%			
			Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	11	11	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100.000	78.715	78,71%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.000	9.980	99,80%			
			Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	4	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			483.314.278	391.595.526	81,02%			
			Gaji dan tunjangan ASN, PPK yang terbayarkan	bulan	14	14	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			483.014.478	391.313.247	81,01%			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	5278	5278	100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			289.800	272.410	94,00%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			10.000	9.869	98,69%			
			Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			76.055	75.350	99,07%			
			Terasuransinya Gedung Disdikpora	Unit	2	2	100,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			76.055	75.350	99,07%			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Unit	2	2	100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			36.765	36.280	98,68%			
			Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	2	2	100,00%			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			4.024	3.960	98,41%			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	178	178	100,00%			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			13.741	13.715	99,81%			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	4	100,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			19.000	18.605	97,92%			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	2	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			615.720	578.614	93,97%			
			Tercapainya Administrasi Umum Perangkat daerah	Bulan	12	12	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			17.000	16.356	96,21%			
			Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	14	14	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			90.000	86.769	96,41%			
			Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	14	14	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			16.920	14.422	85,23%			
			Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			132.000	122.258	92,62%			
			Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	14	14	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			95.000	81.523	85,81%			
			jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	14	14	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			64.800	59.630	92,02%			
			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	27	27	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			200.000	197.656	98,83%			
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.947.093	1.906.819	97,93%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100,00%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			444.496	421.500	94,83%			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.502.597	1.485.319	98,85%			
			Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	43	43	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.438.971	1.314.167	91,33%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000	4.764	95,28%			
			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			604.290	553.655	91,62%			
			jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.000	32.973	94,21%			
			jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			794.681	722.775	90,95%			
			jumlah PHD/K2/Tenaga administrasi/Tenaga kebersihan/tanaga keamanan	orang	33	33	100,00%			
			jumlah tanah kas desa yang dibayarkan sewanya untuk sekolah/bangunan kantor	lokasi	5	5	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.090.270	2.066.215	98,85%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			200.000	198.581	99,29%			
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	28	28	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			39.894	33.252	83,35%			
			jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	52	52	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.820.376	1.806.965	99,26%			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	5	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			30.000	27.417	91,39%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	30	30	100,00%			
DINAS KESEHATAN					83.116.906	83.116.906	89,38%	Adanya anggaran katrid TCM oleh Kemenkes RI yang dipindahkan ke seksi yankes tetapi tidak dipergunakan karena keterbatasan waktu dan sudah adanya anggaran dari APBD, Adanya sisa pembelian belanja Rapid HIV/Sifilis Duo dikarenakan SSH Kabupaten Kudus melebihi harga tertinggi rapid di pasaran,Adanya menu pada ASB yang tidak dapat direalisasikan maksimal saat pelaksanaan kegiatan dan adanya pembelian belanja modal yang tidak dapat direalisasikan karena harga jenis barang sesuai spesifikasi pada SIPD sudah melebihi SSH yang tertera	Capaian 2023 beberapa Subkegiatan tidak mencapai target kinerja, Kinerja tahun 2024 agar ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			83.116.906	74.291.399	89,38%			
			<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah</i>	<i>indeks</i>	85	95,83	112,74%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			259.802	186.306	71,71%			
			Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	dokumen	18	18	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			86.300	77.966	90,34%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	7	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			173.502	108.340	62,44%			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	6	6	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			78.967.704	70.442.633	89,20%			
			Jumlah dokumen administrasi keuangan	dokumen	12	12	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			78.855.790	70.332.419	89,19%			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	10430	9216	88,36%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			105.600	105.600	100,00%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			6.314	4.614	73,08%			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50.000	19.003	38,01%			
			Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	orang	15	10	66,67%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			50.000	19.003	38,01%			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	15	100	666,67%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			563.817	558.221	99,01%			
			Jumlah laporan pengelolaan administrasi umum	laporan	7	7	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			356.000	354.678	99,63%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50.392	50.007	99,24%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	3	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			20.268	20.263	99,98%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			58.177	57.269	98,44%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			16.456	14.724	89,47%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	4	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200	4.200	100,00%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	10	10	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			58.324	57.080	97,87%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	100	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.803.631	1.760.072	97,58%			
			Jumlah laporan pengelolaan penyediaan jasa penunjang pada Dinas	laporan	4	4	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.150	1.114	96,87%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			443.034	399.022	90,07%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.929	20.889	99,81%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.338.518	1.339.048	100,04%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.471.953	1.325.163	90,03%			
			Jumlah laporan pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan	laporan	4	4	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			317.731	263.229	82,85%			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	45	90,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.154.222	1.061.934	92,00%			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100,00%			
RSUD dr. LOEKMONO HADI					274.431.556	274.431.556	91,39%	-	Capaian kinerja tahun 2023 sudah bagus, tingkatkan kinerja di tahun 2024 agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			274.431.556	250.789.944	91,39%			
			<i>Cakupan Peayanan BLUD (RSUD)</i>	%	0	0	0%			
			<i>Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah</i>	%	100	93,73	93,73%			
			<i>Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>	%	100	127,59	127,59%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			36.827.048	33.096.797	89,87%			
			Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN BLUD	Bulan	14	14	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			36.827.048	33.096.797	89,87%			
			Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN BLUD	Bulan	14	14	100,00%			
		Peningkatan Pelayanan BLUD			237.604.508	217.693.147	91,62%			
			Jumlah kunjungan Pasien di RSUD	Pasien	141447	180470	127,59%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			237.604.508	217.693.147	91,62%			
			Jumlah kunjungan pasien di RSUD	Pasien	141447	180470	127,59%			
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					13.789.838	13.789.838	94,29%	Keterlambatan proses lelang karena kendala administrasi dan lapangan, beberapa paket proses lelang ulang dan paket kegiatan ada yang pelaksanaan menunggu perubahan anggaran karena pada penetapan tidak ada dalam RKPD	evaluasi faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja, dan evaluasi indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMRT-C, sebagai upaya perbaikan perencanaan kegiatan di tahun mendatang	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.789.838	13.003.104	94,29%			
			<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PUPR)</i>	<i>Indeks</i>	83,5	83,98	100,57%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.023	7.608	84,32%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9.023	7.608	84,32%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.336.740	10.597.755	93,48%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang/Bulan	95	95	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.271.700	10.532.755	93,44%			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	95	89	93,68%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			65.040	65.000	99,94%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang/bulan	11	11	100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.500	2.225	29,67%			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	1	1	100,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			7.500	2.225	29,67%			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			383.464	365.845	95,41%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	1	1	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			9.019	8.932	99,04%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Unit	106	106	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			140.214	135.536	96,66%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit	1087	1087	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			13.901	13.692	98,50%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			139.823	139.502	99,77%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			23.517	22.913	97,43%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	lembar	80250	80250	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			56.990	45.271	79,44%			
			Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Orang/kali	36	36	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			29.825	29.620	99,31%			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	100,00%			
		Pengadaan Mebel			29.825	29.620	99,31%			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25	25	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			492.761	479.923	97,39%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.750	4.750	100,00%			
			Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lembar	250	250	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			185.547	174.976	94,30%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			302.464	300.197	99,25%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	11	11	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.530.525	1.520.128	99,32%			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			503.275	503.192	99,98%			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	97	97	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			27.250	27.173	99,72%			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	37	37	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.000.000	989.762	98,98%			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	5	5	100,00%			
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					22.354.960	22.354.960	90,73%			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.354.960	20.283.333	90,73%			
			<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PKPLH)</i>	<i>Indeks</i>	85	83,29	97,99%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.000	12.860	85,73%			
			Persentase capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.000	4.848	96,95%			
			Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.000	8.013	80,13%			
			Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	8	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.345.049	14.423.278	88,24%			
			Persentase dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	%	100	100	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.269.869	14.352.935	88,22%			
			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	148	134	90,54%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			60.180	57.072	94,84%			
			Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			15.000	13.271	88,47%			
			Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	13	13	100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			49.620	48.330	97,40%			
			Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	%	50	100	200,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			49.620	48.330	97,40%			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	2	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			105.153	98.603	93,77%			
			Cakupan layanan administrasi umum Perangkat Daerah pengelolaan umum dan kepegawaian	%	71,43	85,71	119,99%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.004	7.724	96,50%			
			Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	6	6	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.434	15.210	98,55%			
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	25	22	88,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12.527	12.009	95,86%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTAS E KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	25	25	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12.847	12.634	98,34%			
			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	7	7	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			28.800	23.860	82,85%			
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	8	8	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800	1.650	91,67%			
			Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	1	1	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25.741	25.516	99,13%			
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	5	5	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			135.034	133.574	98,92%			
			Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai standar	%	100	100	100,00%			
		Pengadaan Mebel			2.450	2.450	100,00%			
			Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	1	1	100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			132.584	131.124	98,90%			
			Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	20	20	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.025.954	1.927.935	95,16%			
			Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			250.312	236.807	94,60%			
			Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.775.642	1.691.128	95,24%			
			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTAS E KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.679.150	3.638.755	98,90%			
			Persentase BMD dalam kondisi baik	%	100	98,16	98,16%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.377.913	2.365.338	99,47%			
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	137	134	97,81%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			11.655	10.325	88,59%			
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	21	25	119,05%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.289.581	1.263.092	97,95%			
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	100,00%			
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					8.105.597	8.105.597	96,70%	Masih belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan sehingga belum maksimalnya pencapaian target indikator OPD.	Tetap maksimalkan sumberdaya dan sarpras yang ada agar kinerja dapat berjalan optimal sesuai target yang telah ditentukan. Diperlukan upaya optimalisasi ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.105.597	7.837.879	96,70%			
			Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Pol PP)	Indeks	83,5	85,22	102,06%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.865	19.461	97,97%			
			Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	dokumen	24	24	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			15.172	14.843	97,83%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.693	4.619	98,41%			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	12	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.740.082	6.504.458	96,50%			
			Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	dokumen	12	12	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.680.100	6.445.362	96,49%			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	49	46	93,88%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			55.860	54.980	98,42%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			4.122					
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			181.657	173.877	95,72%			
			Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	dokumen	12	12	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.300	4.292	99,81%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			16.230	16.178	99,68%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.039	3.987	98,71%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.770	22.353	86,74%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.000	5.000	99,99%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			126.318	122.068	96,64%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	15	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			195.824	195.429	99,80%			
			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jenis	6	6	100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			195.824	195.429	99,80%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25	25	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			238.502	233.528	97,91%			
			Jumlah PHD	orang	3	3	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000	2.000	100,00%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			90.744	86.524	95,35%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			145.758	145.003	99,48%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			729.667	711.125	97,46%			
			Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	unit	37	37	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			456.552	441.248	96,65%			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	37	37	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			14.542	14.319	98,47%			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	16	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			258.573	255.559	98,83%			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00%			
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					5.105.213	5.105.213	96,13%	Perubahan Iklim dan dampak Bencana Hidrometrologi di kabupaten Kudus yang tidak dapat di prediksi	Laksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.105.213	4.907.521	96,13%			
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap atas kinerja perangkat daerah	Nilai	84	89,81	106,92%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.877	4.634	95,02%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi sesuai Standar	Dokumen	6	6	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.819	2.591	91,91%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2.058	2.043	99,27%			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	7	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.531.642	3.391.048	96,02%			
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	laporan	1	1	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.461.142	3.322.073	95,98%			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	21	21	100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			70.500	68.975	97,84%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			225.924	214.044	94,74%			
			Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran sesuai Standar	%	100	100	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			17.361	14.363	82,73%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			36.161	33.758	93,35%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.407	6.865	81,66%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			24.324	22.980	94,47%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			9.438	9.037	95,76%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200	3.480	82,86%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	24	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			126.033	123.561	98,04%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			145.497	143.210	98,43%			
			Jumlah Barang milik daerah yang di adakan	unit	5	5	100,00%			
		Pengadaan Mebel			89.501	87.945	98,26%			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	22	22	100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			55.996	55.265	98,69%			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			301.645	289.954	96,12%			
			Jumlah jasa penunjang yang disediakan	bulan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			82.495	72.375	87,73%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			219.150	217.579	99,28%			
			Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	bulan	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			895.628	864.631	96,54%			
			Jumlah Barang Milik daerah yang di pelihara	unit	25	25	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			83.878	71.072	84,73%				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	4	100,00%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			279.157	265.415	95,08%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	21	100,00%				
		Pemeliharaan Mebel			3.760	3.750	99,73%				
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	10	100,00%				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			19.900	18.100	90,95%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	31	31	100,00%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			508.933	506.294	99,48%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	100,00%				
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					7.163.446	7.163.446	93,26%	Masih adanya target indikator yang belum tercapai dikarenakan koordinasi/kerjasama dengan OPD crosscutting belum optimal	capaian kinerja tahun 2023 ada beberapa subkegiatan tidak mencapai target, sehingga peningkatan kinerja di tahun 2024 agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.163.446	6.680.333	93,26%				
				Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Dinsos)	Indeks	85	90,73				106,74%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.243	9.318				76,11%
				Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai standar	dok	16	16				100,00%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8.520	7.860				92,25%
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	10	10				100,00%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.723	1.458				39,16%

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	6	6	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.255.554	4.885.437	92,96%			
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	Laporan	35	35	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.198.814	4.828.728	92,88%			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	546	546	100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			44.140	44.140	100,00%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12.600	12.569	99,75%			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			147.555	125.909	85,33%			
			Persentase fasilitas administrasi umum PD	persen	0	0	0%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.871	7.871	100,00%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.362	29.854	84,42%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			50.457	42.359	83,95%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			18.268	15.781	86,39%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTAS E KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6.600	3.580	54,24%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			28.997	26.463	91,26%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			170.360	162.792	95,56%			
			Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (Perpres Pengadaan Barang Jasa dan RKBU)	unit	3	3	100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			170.360	162.792	95,56%			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			778.269	710.984				
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	Lap	46	46	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.468	4.753	86,91%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			259.629	213.872	82,38%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45.923	39.211	85,38%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	10	10	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			467.249	453.149	96,98%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			799.464	785.894	98,30%			
			Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	unit	91	91	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			272.139	268.005	98,48%			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	80	80	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			389.092	381.260	97,99%			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			138.233	136.629	98,84%			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100,00%			
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					9.435.921	9.435.921	92,41%			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.435.921	8.719.584	92,41%			
			<i>Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>indeks</i>	85	83,7	98,47%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.574	5.538	99,37%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Terukur	Dok	10	10	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.504	3.501	99,94%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	6	6	100,00%	Sistem eror sehingga kehabisan waktu untuk pelaksanaannya hanya bisa 5A paket		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.070	2.037	98,41%			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	4	4	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.181.118	6.573.641	91,54%			
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standa	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.117.985	6.511.344	91,48%			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	46	41	89,13%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			59.500	59.451	99,92%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			3.633	2.847	78,37%			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			189.547	177.236	93,51%			
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	persen	85	85	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.043	5.989	99,11%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.148	30.010	99,54%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.041	8.022	99,76%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			45.243	44.325	97,97%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			13.557	9.906	73,07%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Paket	2	2	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Disediakan							
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.800	4.800	100,00%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dok	2	2	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			81.715	74.184	90,78%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	24	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			24.980	24.642	98,65%			
			Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	unit	2	2	100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			24.980	24.642	98,65%			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	2	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.833.290	1.763.287	96,18%			
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	laporan	36	36	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.740	6.740	100,00%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			412.797	346.266	83,88%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.413.753	1.410.282	99,75%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			201.413	175.239	87,00%			
			Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	unit	58	58	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			184.274	161.580	87,68%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTAS E KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	47	47	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			17.139	13.659	79,70%			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	11	11	100,00%			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4.963.043	4.963.043	93,37%	1. Keterbatasan ketersediaan anggaran untuk peremajaan pengadaan sarpras pelayanan Adminduk (pelayanan di Dinas, 9 Kecamatan, Mall Pelayanan Publik dan Jemput Bola); 2. Belum optimalnya pelayanan perekaman dan pencetakan KTP, karena kondisi sarpras yang tidak memadai/rusak dimana umur ekonomisnya lebih dari 10 tahun; 3. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat bahwa Dana Pelayanan Admindukcapil (DAK Nonfisik) APBN Tahun 2023 bagi Kabupaten/Kota tidak lagi diberikan, sehingga mempengaruhi operasional pelayanan Adminduk; 4. Ketersediaan blangko KTP yang disediakan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui mekanisme hibah ke Dinas Dukcapil Kab. Kudus mengalami trend yang semakin menurun sehingga berdampak pada rendahnya penerbitan KTP Tahun 2023; 5. Dampak penerapan dari kebijakan implementasi SIAK Terpusat mulai bulan April Tahun 2022 dari Pemerintah Pusat, Dinas Dukcapil Kab.	Pertahankan Capaian Kinerja dan penyerapan anggaran yang sudah sangat tinggi.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.963.043	4.634.050	93,37%			
			<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Dukcapil)</i>	<i>indeks</i>	92	99,79	108,47%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			74.261	73.261	98,65%			
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	dokumen	48	48	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			45.673	45.149	98,85%			
			Jumlah dokumen perencanaan, dokumen anggaran, dokumen pelaporan kegiatan/kinerja yang tersusun sesuai standar	dokumen	19	19	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			28.588	28.112	98,33%			
			Jmh dok evaluasi OPD (Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja Triwulanan, Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan, Evaluasi Rencana Aksi Triwulanan, Lapo Capaian Output Dok Kependudukan Triwulanan, Lap Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran/TEPRA bulanan	dokumen	29	29	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.177.140	3.876.662	92,81%			
			Jumlah dokumen administrasi pertanggungjawaban anggaran, dan dokumen pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	dokumen	63	63	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.121.007	3.824.705	92,81%	Kudus memiliki keterbatasan pengelolaan database kependudukan dimana penyajian data kependudukan skala kabupaten terbatas sesuai dengan template yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat.		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	325	325	100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			56.133	51.957	92,56%			
			Jmh dok adm pertanggungjawaban keu (Lap SPJ Fungsional SKPD Bulanan; Lap SPJ Administratif SKPD Bulanan; Lap Prognosis Semesteran; Lap Keu SKPD Th 2022; Lap Rekap Daftar Transaksi Harian(DTH) Pajak SKPD Bulanan; Lap Pajak Daerah SKPD Bulanan; Lap Buku	dokumen	63	63	100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.217	4.345	83,29%			
			Jumlah dokumen kepegawaian sesuai standar	dokumen	12	12	100,00%			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			5.217	4.345	83,29%			
			Jumlah Laporan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian sesuai standar	laporan	12	12	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			170.716	159.099	93,20%			
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	%	100	100	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.284	2.282	99,91%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			18.320	16.814	91,78%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			17.531	16.072	91,68%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			13.177	12.190	92,51%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			19.700	12.687	64,40%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600	3.055	84,86%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	1	100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			13.155	13.052	99,22%			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			82.948	82.948	100,00%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			35.376	34.480	97,47%			
			Jumlah pengadaan peralatan kantor sesuai ketentuan	unit	2	2	100,00%			
		Pengadaan Mebel			11.076	10.500	94,80%			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	2	100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			24.300	23.980	98,68%			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			373.656	365.621	97,85%			
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan administrasi kependudukan	laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.276	1.217	37,14%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11.910	11.842	99,43%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			358.470	352.562	98,35%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126.677	120.582	95,19%			
			Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	26	26	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			113.508	107.972	95,12%			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	26	26	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			13.169	12.610	95,76%			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00%			
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					5.460.909	5.460.909	93,96%	Kurangnya anggaran pada sub kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi sehingga tidak dapat tercapai maksimal	capaian kinerja sudah tergolong tinggi, tingkatkan dan pertahankan di periode anggaran berikutnya	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.460.909	5.131.097	93,96%			
			<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PMD)</i>	<i>Indeks</i>	85	88,66	104,31%			
			<i>IRB</i>	<i>orang</i>	26	26	100,00%			
			<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	<i>Nilai</i>	28	28	100,00%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.423	8.251	97,96%			
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	Dokumen	10	10	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.981	4.841	97,19%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.442	3.410	99,07%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.311.571	4.033.858	93,56%			
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.218.841	3.945.034	93,51%			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	26	26	100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			92.730	88.824	95,79%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.430	220	15,38%			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	26	1	3,85%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1.430	220	15,38%			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	26	1	3,85%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			130.985	116.752	89,13%			
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	%	100	100	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			17.035	13.001	76,32%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.783	20.514	98,71%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12.693	12.361	97,38%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			17.790	14.883	83,66%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			16.114	16.113	100,00%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	3	3	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.800	7.080	90,77%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			6.195	2.005	32,36%			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	5	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			32.576	30.795	94,53%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	40	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			95.347	94.439	99,05%			
			Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	Unit	3	3	100,00%			
		Pengadaan Mebel			36.867	36.464	98,91%			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	2	100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			58.480	57.975	99,14%			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			444.911	425.706	95,68%			
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	Laporan	3	3	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000	3.000	100,00%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100.974	89.192	88,33%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			340.937	333.513	97,82%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			468.242	451.872	96,50%			
			Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	Unit	23	23	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			177.650	168.404	94,80%			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			273.912	269.778	98,49%			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00%			
			Jumlah Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan Yang dibayarkan	orang	7	7	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			16.680	13.690	82,07%			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	12	100,00%			
DINAS PERHUBUNGAN					15.204.031	15.204.031	94,53%			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.204.031	14.372.038	94,53%			
			<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Dishub)</i>	<i>Indeks</i>	85	89,68	105,51%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000	24.262	97,05%			
			Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu dan berkualitas	dok	24	24	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			17.000	16.361	96,24%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.000	7.901	98,76%			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.409.455	8.701.480	92,48%			
			Terselenggaranya administrasi keuangan PD yang akuntabel	laporan	29	29	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.291.850	8.593.913	92,49%			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	79	79	100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			115.705	105.675	91,33%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	6	6	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.900	1.892	99,58%			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	29	29	100,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000	14.887	99,25%			
			Terlaksananya BMD yang dapat di pertanggungjawaban/ akuntabel	dok	1	1	100,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			15.000	14.887	99,25%			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			74.648	74.114	99,28%			
			Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	Org	2	2	100,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			74.648	74.114	99,28%			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	2	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			321.356	299.263	93,13%			
			Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Persen	100	100	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			22.399	20.642	92,16%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.958	29.760	82,76%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			21.973	18.008	81,95%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			45.328	41.426	91,39%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			89.148	88.017	98,73%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600	2.250	62,50%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			102.950	99.160	96,32%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	20	20	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			321.927	313.047	97,24%			
			Efisiensi dan efektifnya pengadaan BMD	unit	21	21	100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			321.927	313.047	97,24%			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	21	21	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.719.303	4.645.348	98,43%			
			Tersedianya jasa penunjang urusan Pemda	org	132	132	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.940	3.935	99,87%			
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			269.544	251.433	93,28%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			21.825	19.970	91,50%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.423.994	4.370.010	98,78%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	132	132	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			317.343	299.639	94,42%			
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen	100	100	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			110.680	93.886	84,83%			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	42	42	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			206.663	205.753	99,56%			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00%			
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					21.772.130	21.772.130	96,27%			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			21.772.130	20.960.499	96,27%			
			<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kominfo)</i>	<i>Indeks</i>	84	87,15	103,75%			
			<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah</i>	<i>Indeks</i>	84	87,15	103,75%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.992	6.905	98,75%			
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	Dokumen	11	11	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.100	1.095	99,50%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	100,00%	tersedia hingga akhir tahun anggaran untuk memastikan seluruh kegiatan terlaksana dengan baik dan, tercapainya target yang ditentukan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	dengan rencana sebagai bahan perbaikan tahun berikutnya.		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.892	5.810	98,61%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	100,00%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.543.242	3.444.818	97,22%				
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	Laporan	12	12	100,00%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.470.097	3.377.132	97,32%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	24	23	95,83%				
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			57.480	52.060	90,57%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00%				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			15.665	15.627	99,76%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100,00%				
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.000	5.874	97,90%				
			Jumlah dokumen administrasi BMD sesuai standar	Dokumen	1	1	100,00%				
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			6.000	5.874	97,90%				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100,00%				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			14.311.855	13.754.548	96,11%				
			Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	Laporan	1	1	100,00%				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			61.855	21.878	35,37%				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	3	100,00%				
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			14.250.000	13.732.670	96,37%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	12800	12800	100,00%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			256.059	239.727	93,62%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	%	100	100	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			54.468	43.465	79,80%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	40	40	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			35.363	34.442	97,40%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			14.413	12.603	87,44%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	6	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10.800	10.440	96,67%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			141.015	138.777	98,41%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			65.290	64.950	99,48%			
			Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	Unit	11	11	100,00%			
		Pengadaan Mebel			15.860	15.840	99,87%			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	5	5	100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			49.430	49.110	99,35%			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.285.803	3.189.414	97,07%			
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.500	2.057	58,78%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.282.303	3.187.357	97,11%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			296.889	254.263	85,64%			
			Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	Unit	82	82	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			247.706	227.218	91,73%			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			49.183	27.045	54,99%			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70	70	100,00%			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					4.396.186	4.396.186	92,39%	<p>1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dari sisi kuantitas dan kualitas serta sarpras berupa kendaraan dinas operasional untuk peninjauan lapangan terkait perizinan dan pengawasan penanaman modal; 2. Penyelesaian kinerja terkait dengan kinerja OPD lain, sehingga kecepatan kinerja pihak eksternal akan mempengaruhi capaian proses kinerja di penetapan kebijakan; 3. Belum tersedia RDTR sebagai acuan yang lebih detail tentang Tata Ruang Investasi;</p>	<p>Dengan adanya penambahan SDM & kendaraan dinas pada DPMPSTP, diharapkan pada pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I 2024, permasalahan SDM & mobilitas kerja akan teratasi. Untuk penyelesaian kinerja OPD yang membutuhkan koordinasi dgn OPD lain, dapat disusun SOP penyelesaian pekerjaan yang disepakati oleh semua OPD yang terlibat, sehingga dapat dipantau dan diukur bersama. Penyesunan RDTR harus terus diupayakan, untuk menunjang penawaran investasi di Kabupaten Kudus kepada calon investor.</p>	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.396.186	4.061.678	92,39%			
			<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PTSP)</i>	<i>Indeks</i>	85	88,79	104,46%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.195	3.158	98,83%			
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	dokumen	29	29	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.597	1.570	98,25%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.597	1.588	99,41%			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18	18	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.596.384	3.311.409	92,08%			
			Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	laporan	29	29	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.553.506	3.268.553	91,98%			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	21	21	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			41.280	41.280	100,00%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.598	1.577	98,69%			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	17	17	100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			48.600	48.560	99,92%			
			Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	Laporan	1	1	100,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			48.600	48.560	99,92%			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	40	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			229.633	216.083	94,10%			
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	%	100	100	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.691	3.612	97,85%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.929	40.685	99,40%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			14.460	10.481	72,48%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			44.688	38.778	86,77%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			28.721	25.831	89,94%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.400	8.310	98,93%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			88.744	88.388	99,60%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	38	126,67%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			141.558	137.727	97,29%			
			Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	unit	25	25	100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			141.558	137.727	97,29%			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	25	25	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			201.326	188.894	93,82%			
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	Laporan	5	5	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000	3.824	76,48%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			85.250	74.220	87,06%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			111.076	110.850	99,80%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			175.491	155.848	88,81%			
			Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	unit	43	43	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			140.994	127.999	90,78%			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	13	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			34.497	27.849	80,73%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	30	100,00%			
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					12.316.346	12.316.346	94,75%	Banyaknya pegawai yang pensiun dan ada yang meninggal dunia penyerapan membawa dampak pada penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta terkait sub kegiatan Kebudayaan ada pelaksanaan perlombaan yang tidak terlaksana karena tidak ada peserta yang mendaftar dan 1 kali pertemuan sarasehan kebudayaan tidak terlaksana dikarenakan ada sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) antara pusat dan daerah sesuai amanat aturan perundang-undangan yang baru.	Perlu dipikirkan cara-cara alternatif lain yang dapat dipakai dalam melestarikan kebudayaan. Ketiadaan peserta lomba kebudayaan mengisyaratkan bahwa ke depan harus dilakukan kegiatan lain yang mungkin bisa menarik minat generasi muda untuk melestarikan kebudayaan. Untuk masalah SDM yang semakin terbatas karena pensiun atau meninggal, dapat dilakukan dengan merekrut tenaga P3K yang diperlukan. Di sisi lain, Untuk menggairahkan pariwisata di Kudus, diperlukan kolaborasi Model Pentahelix dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Kudus.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.316.346	11.669.712	94,75%			
			<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Kinerja Perangkat daerah</i>	%	85	89,86	105,72%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			51.930	51.809	99,77%			
			Jumlah Laporan Triwulanan Keigatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	4	4	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.000	24.999	100,00%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	14	14	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			26.930	26.810	99,56%			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	29	29	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.881.590	5.304.953	90,20%			
			laporan triwulanan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen	4	4	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.761.068	5.184.521	89,99%			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	45	39	86,67%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			48.700	48.695	99,99%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			71.823	71.738	99,88%			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	30	30	100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			125.500	124.579	99,27%			
			Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	dokumen	4	4	100,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			125.500	124.579	99,27%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	14	14	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.112.451	1.103.461	99,19%			
			Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	dokumen	4	4	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20.000	19.989	99,95%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			478.059	473.222	98,99%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			80.198	76.495	95,38%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			88.000	87.919	99,91%			
			Jumlah jenis bahan logistik	jenis	5	5	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			193.286	193.078	99,89%			
			Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	jenis	8	8	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.208	8.186	99,73%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	36	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			237.500	237.421	99,97%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	85	85	100,00%			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			7.200	7.150	99,31%			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			214.642	212.943	99,21%			
			Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	dokumen	4	4	100,00%			
		Pengadaan Mebel			214.642	212.943	99,21%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.530.349	2.495.833	98,64%			
			Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dokumen	4	4	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000	4.832	96,64%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			648.778	628.542	96,88%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.876.571	1.862.459	99,25%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.399.884	2.376.133	99,01%			
			Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	dokumen	4	4	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			263.334	262.586	99,72%			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	23	23	100,00%			
		Pemeliharaan Mebel			10.000	9.958	99,58%			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	10	10	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			35.000	34.759	99,31%			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	91	91	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.091.550	2.068.830	98,91%			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					5.122.882	5.122.882	94,96%	Penetapan target kinerja pada triwulan IV sudah ada pencapaian 100 %, ada juga yang belum mencapai sesuai target , yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, sehingga untuk indikator yang rendah akan akan lebih mudah dalam pencapaian target kinerja, sedangkan target kinerja yg tinggi kemungkinan lebih sulit dalam pencapaian kinerja dikarenakan adanya perubahan anggaran dan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, sedangkan jika target kinerja tinggi sehingga dalam capaian lebih sulit dicapai meskipun ada target yang tercapai meskipun baru pada triwulan II, perubahan target indikator perlu dilakukan agar realisasi capaian indikator dapat dicapai	- dilakukan evaluasi terhadap faktor penghambat, untuk lebih meningkatkan upaya koordinasi atau kerjasama baik internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian target kinerja. - untuk lebih mempertahankan manajemen waktu, dan perencanaan pelaksanaan pekerjaan dengan lebih mengoptimalkan ketersediaan SDM dan sarpras atau anggaran untuk mencapai kinerja yang sesuai dengan rencana sebagai bahan perbaikan tahun berikutnya.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.122.882	4.864.678	94,96%			
			IKM atas kinerja Dinas Arpus	Nilai	85	92,29	108,58%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.908.618	3.729.908	95,43%			
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	Dok	24	24	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.860.678	3.685.908	95,47%			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	28	28	100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			47.940	44.000	91,78%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			154.455	121.753	78,83%			
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	persen	100	100	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.983	1.982	99,95%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			28.803	24.421	84,79%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.457	7.146	95,83%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			18.268	16.362	89,57%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			4.354	3.233	74,24%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600	3.120	86,67%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			450	449	99,67%			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	2	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			89.540	65.041	72,64%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	5	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			330.768	311.909	94,30%			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	3	3	100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			103.288	102.930	99,65%			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			227.480	208.979	91,87%			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			330.828	324.331	98,04%			
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang yang sesuai ketentuan	laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			330.828	324.331	98,04%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			398.213	376.776	94,62%			
			Efisien dan efektifnya pengadaan BMD	satuan	85	85	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			89.034	75.384	84,67%			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.499	4.120	91,58%			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	7	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			304.680	297.272	97,57%			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00%			
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					3.555.978	3.555.978	425,82%	-	Disusun timeline aktivitas kinerja agar dapat melaksanakan tugas tepat waktu, disamping tetap tepat mutu, tepat administrasi dan tepat sasaran	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.555.978	3.317.900	93,30%			
			<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Distanpangan)</i>	<i>Indeks</i>	85	79,99	94,11%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			120.659	115.405	95,64%			
			Jumlah data/dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai standart	dok	33	33	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			102.490	100.529	98,09%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.169	14.876	81,87%			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	29	29	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			45.600	45.600	100,00%			
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	dok	29	29	100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			45.600	45.600	100,00%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jenis	1	1	100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9.000	6.119	67,98%			
			Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standart	Laporan	35	35	100,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			9.000	6.119	67,98%			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	10	66,67%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			197.018	184.823	93,81%			
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	persen	100	100	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.948	7.374	92,78%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			37.417	34.080	91,08%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
			ATK	Paket	1	1	100,00%			
			Kursi kerja	buah	2	2	100,00%			
			Laptop	unit	3	3	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			20.000	15.016	75,08%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			44.255	42.703	96,49%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			17.023	15.685	92,14%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800	1.560	86,67%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			68.575	68.406	99,75%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	100	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			155.438	154.000	99,07%			
			Prosentase Pengadaan BMD Sesuai Ketentuan	%	100	100	100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			155.438	154.000	99,07%			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	19	19	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.027.240	932.464	90,77%			
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	Laporan	11	11	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.300	3.300	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			366.852	280.970	76,59%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			657.088	648.194	98,65%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	6	100,00%			
			Terbayarnya Honorarium pelatih senam dan narasumber bintal	kali	52	27	51,92%			
			Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	orang	19	19	100,00%			
			Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia	orang	13	13	100,00%			
			Jumlah tenaga pengemudi yang tersedia	orang	2	2	100,00%			
			Jumlah tenaga keamanan/penjaga yang tersedia	orang	16	16	100,00%			
			Jumlah sewa tanah gedung kantor	unit	25	21	84,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.001.023	1.879.489	93,93%			
			Jumlah dokumen administrasi BMD sesuai standar	dok	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			270.894	221.398	81,73%			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	90	90	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			13.444	12.767	94,96%			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	42	42	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.716.685	1.645.324	95,84%			
			Rehab Gedung sekretariat pertanian	paket	1	1	100,00%			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	paket	1	1	100,00%			
DINAS PERDAGANGAN					19.071.169	19.071.169	83,43%	Kurangnya koordinasi	Penetapan target	

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			19.071.169	15.910.896	83,43%	dengan pengusaha ekspor dan pengelola sarana distribusi perdagangan	indikator agar lebih SMART dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, personil, dan kondisi eksternal yang berpengaruh dalam pencapaian target indikator.		
			<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah</i>	%	85	92,34	108,64%				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			63.083	36.679	58,14%				
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Dokumen	29	29	100,00%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			48.573	23.326	48,02%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	20	100,00%				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.510	13.353	92,03%				
			Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja PD yang tersusun	dokumen	9	9	100,00%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9	9	100,00%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.240.578	11.732.402	82,39%				
			Jumlah dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah	Dokumen	67	60	89,55%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.120.497	11.626.839	82,34%				
			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	114	110	96,49%				
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			73.800	67.415	91,35%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00%				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			46.281	38.148	82,43%				
			Jumlah Panitia Pelaksana Kegiatan yang terbayar honorariumnya	Orang	25	26	104,00%				
			Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	67	60	89,55%				
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			705.000	669.000	94,89%				
			Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen	14	14	100,00%				
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			705.000	669.000	94,89%				
			Jumlah Gedung yang di asuransikan	Dokumen	1	1	100,00%				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100,00%				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15.000	4.450	29,67%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTAS E KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	75	67	89,33%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			15.000	4.450	29,67%			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	2	2	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			338.649	301.187	88,94%			
			Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	5	10	200,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.600	3.549	98,58%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.000	9.967	99,67%			
			Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			6.000	5.583	93,05%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			70.005	55.207	78,86%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00%			
			Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat	Orang	800	555	69,38%			
			Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu/ kegiatan lain	Orang	800	760	95,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			120.000	116.520	97,10%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.200	7.200	100,00%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			21.200	3.629	17,12%			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	15	10	66,67%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.644	99.532	98,90%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	6	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			722.702	701.813	97,11%			
			Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	1	1	100,00%			
			Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	Unit	2	2	100,00%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			595.000	588.000	98,82%			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	1	100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			121.803	107.963	88,64%			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	3	3	100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.899	5.850	99,17%			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.079.503	1.669.648	80,29%			
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	50	40	80,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000	1.000	100,00%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.120.093	786.690	70,23%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	5	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			958.410	881.958	92,02%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	44	42	95,45%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			906.654	795.718	87,76%			
			Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	Unit	52	45	86,54%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			530.459	428.780	80,83%			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	25	29	116,00%			
		Pemeliharaan Mebel			2.000	1.927	96,35%			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	5	5	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			41.491	35.321	85,13%			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	20	20	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			310.456	309.336	99,64%			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			22.247	20.354	91,49%			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100,00%			
BAGIAN PEMERINTAHAN					199.557	199.557	88,58%	-	Persiapkan timeline pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan secara rinci dan baik untuk tertib kinerja ke depannya. Lakukan pemantauan secara efektif dan efisien atas pelaksanaan kinerja agar terhindar dari kesalahan Lakukan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan untuk memperbaiki kelemahan.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			199.557	176.769	88,58%			
			<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bag Pemerintahan)</i>	<i>Indeks</i>	85	89,27	105,02%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.912	15.500	67,65%			
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			21.780	14.520	66,67%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.132	980	86,59%			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			19.895	12.560	63,13%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	orang	2	2	100,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			19.895	12.560	63,13%			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	2	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			74.383	70.649	94,98%			
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	Persen	80	100	125,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8.994	8.128	90,37%			
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	3	3	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.300	3.296	99,88%			
			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			7.715	7.715	100,00%			
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	2	2	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2.400	2.400	100,00%			
			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	paket	1	1	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			51.974	49.110	94,49%			
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	50	50	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50.036	49.716	99,36%			
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	Laporan	15	15	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.450	1.238	85,38%			
			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			48.586	48.478	99,78%			
			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	14	14	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			32.331	28.344	87,67%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	unit	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			25.835	23.684	91,67%			
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	2	2	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.496	4.660	71,74%			
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	10	10	100,00%			
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					351.408	351.408	82,36%			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			351.408	289.431	82,36%	Beberapa Lembaga tidak memenuhi persyaratan pencairan hibah , Sehingga penyerapan Anggaran belum maksimal	Penyusunan timeline program, kegiatan dan subkegiatan yang jelas dan baik agar tidak terulang keterlambatan capaian kinerja Keluaran/output subkegiatan yang berkaitan dengan hibah bansos agar dirumuskan dengan jelas mengingat besarnya alokasi anggaran bansos dan hibah.	
			<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kesra)</i>	<i>Indeks</i>	85	89,27	105,02%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			62.892	54.709	86,99%			
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	dokumen	14	14	100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
			Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	bulan	12	12	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	bulan	12	12	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.201	62.219	62,09%			
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	%	85	100	117,65%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12.800	12.797	99,98%			
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	3	3	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.342	6.105	73,19%			
			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1	1	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12.761	12.761	100,00%			
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	2	2	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800	1.800	100,00%			
			jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	12	12	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			64.499	28.756	44,58%			
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	2	2	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			97.228	97.158	99,93%			
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	laporan	13	13	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.080	2.080	100,00%			
			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			95.148	95.078	99,93%			
			jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			91.087	75.345	82,72%			
			Jumlah unit BMD yang pelihara sesuai standar	unit	20	20	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			78.095	62.353	79,84%			
			jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara atau dibayarkan pajaknya	unit	9	9	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.992	12.992	100,00%			
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	18	18	100,00%			
BAGIAN HUKUM					193.778	193.778	81,62%	Dalam penyebarluasan dokumentasi hukum masih terkendala dari Perangkat Daerah dalam penyerahan minute Produk Hukum ke bagian Hukum, sehingga perlu di ubah	Data capaian kinerja sangat tinggi, aga keluaran/output kinerja di setiap tingkatan didokumentasikan secara digital sehingga masyarakat dapat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			193.778	158.166	81,62%			
			<i>Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Bag Hukum)</i>	<i>Indeks</i>	85	89,27	105,02%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.860	15.620	82,82%	dalam penyusunan SOP untuk Pendokumentasian dan Informasi Hukum	mengakses. Capaian kinerja terkait RAN HAM agar dipersiapkan dengan baik. Persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan capaian kinerja tidak memenuhi target, agar diberi penjelasan/keterangan	
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			18.860	15.620	82,82%			
			Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	12	12	100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			23.940	15.000				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	3	3	100,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			23.940	15.000	62,66%			
			Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang	3	3	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			76.729	71.511	93,20%			
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	%	100	100	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.440	13.957	90,40%			
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	3	3	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.841	6.621	96,77%			
			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	2	2	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2.835	2.835	99,99%			
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10.800	8.820	81,67%			
			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perUUan yang disediakan	dokumen	2	2	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40.814	39.279	96,24%			
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	25	22	88,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.000	1.000	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai standar	laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000	1.000	100,00%			
			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	1	1	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			73.249	55.036	75,13%			
			Jumlah unit BMD yang pelihara sesuai standar (Bag Hukum)	unit	7	7	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			66.510	50.934	76,58%			
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	7	7	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.739	4.102	60,87%			
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	9	9	100,00%			
BAGIAN PEREKONOMIAN					115.998	115.998	91,95%			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			115.998	106.659	91,95%			
			<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bag Perekonomian)</i>	<i>Indeks</i>	85	89,27	105,02%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			29.657	22.127	74,61%			
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	laporan	19	19	100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			29.657	22.127	74,61%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	7	7	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			25.908	24.855	95,93%			
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar (Bag Perekonomian)	%	90	90	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.344	1.335	99,33%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1	1	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.311	6.892	94,27%			
			Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	3	3	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4.800	4.305	89,69%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	3	3	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800	1.680	93,33%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10.653	10.643	99,90%			
			Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	7	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			21.183	21.089	99,56%			
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan (Bag Perekonomian)	laporan	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			900	900	100,00%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.283	20.189	99,54%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			39.250	38.588	98,31%			
			Jumlah unit BMD yang pelihara sesuai standar	unit	17	17	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			33.850	33.260	98,26%			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	4	4	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.570	3.498	97,98%			
			Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	10	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.830	1.830	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	100,00%			
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					125.225	125.225	95,42%	Perencanaan yang kurang akurat dalam perkiraan biaya pemeliharaan sarpras gedung kantor	Untuk membantu mempertahankan kinerja yang telah sesuai target, siapkan timeline yang baik dan dimanfaatkan / dipatuhi. Efektifkan monitoring. Lakukan evaluasi dengan baik dan berikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			125.225	119.485	95,42%			
			<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bag Adbang)</i>	<i>Indeks</i>	85	89,27	105,02%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22.670	21.373	94,28%			
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	dokumen	14	14	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12.000	11.531	96,09%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.669	9.842	92,24%			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.560	13.560	100,00%			
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	dokumen	12	12	100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			13.560	13.560	100,00%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3.938	3.884	98,62%			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	1	100,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			3.938	3.884	98,62%			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.000	4.650	93,00%			
			Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar (Bag Adbang)	dokumen	1	1	100,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			5.000	4.650	93,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	1	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			44.827	43.074	96,09%			
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	%	85	100	117,65%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12.793	11.588	90,58%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			552	550	99,64%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.903	2.871	98,87%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.867	5.857	99,83%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800	1.680	93,33%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20.912	20.529	98,17%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	5	12	240,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			900	900	100,00%			
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan (Bag Adbang)	laporan	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			900	900	100,00%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			34.330	32.044	93,34%			
			Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar (Bag Adbang)	unit	9	9	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			30.270	29.374	97,04%			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	3	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.840	1.850	65,14%			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.220	820	67,21%			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100,00%			
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					587.761	587.761	95,70%	-	Optimalisasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemilihan penyedia dilakukan di awal tahun sehingga pelaksanaan pekerjaan cukup waktu	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			587.761	562.511	95,70%			
			<i>Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Bagian PBJ)</i>	<i>Indeks</i>	85	89,27	105,02%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			35.640	34.705	97,38%			
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	Laporan	24	24	100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			35.640	34.705	97,38%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			280.488	267.145	95,24%			
			Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	Laporan	2	2	100,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			280.488	267.145	95,24%			
			Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25	54	216,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			86.337	78.581	91,02%			
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	Persen	100	100	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			976	976	100,00%			
			Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.868	6.972	70,65%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.011	9.811	98,00%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	2	2	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			11.449	10.360	90,49%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600	3.120	86,67%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	2	2	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50.433	47.342	93,87%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			96.663	95.330	98,62%			
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.200	1.200	100,00%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			95.463	94.130	98,60%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			88.633	86.750	97,88%			
			Jumlah unit Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai standar	Unit	32	32	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			78.395	77.520	98,88%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	9	10	111,11%				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.720	4.770	83,39%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	8	15	187,50%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.518	4.460	98,72%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	7	116,67%				
BAGIAN UMUM					34.303.140	34.303.140	89,82%	<p>Anggaran gaji baik gaji ASN maupun gaji KDH/WKDH tahun 2023 tidak dapat terserap maksimal dikarenakan gaji KDH selama Triwulan IV ikut anggaran Propinsi, karena selain sbg Pj. Bupati Kudus, Beliau adalah Kalak BPBD Prop. Jateng. Sedangkan Gaji WKDH tidak terealisasi dikarenakan kekosongan jabatan WKDH. Gaji ASN tidak dapat maksimal dikarenakan gaji Pj. Sekda masih ikut di Bappeda karena selain sbg Pj. Sekda, Beliau jg Kepala Bappeda Kab. Kudus. Sisa anggaran dari sub kegiatan yang lain selain gaji ASN dan Gaji KDH/WKDH merupakan selisih SSH dengan harga riil.</p>	<p>Penyusunan timeline yang jelas untuk pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan aktivitas untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.</p>		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			34.303.140	30.812.169	89,82%				
			<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Umum)</i>	<i>Indeks</i>	85	89,27	105,02%				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.623	11.468	98,66%				
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar (Bag Umum)	dokumen	7	7	100,00%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.623	11.468	98,66%				
			Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	dok	7	7	100,00%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.381.424	20.120.115	89,90%				
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	dokumen	4	4	100,00%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			22.269.222	20.008.189	89,85%				
			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	127	127	100,00%				
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			105.240	105.240	100,00%				
			Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dok	12	12	100,00%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			6.962	6.686	96,04%			
			Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dok	4	4	100,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			430.928	362.207	84,05%			
			Jumlah dokumen administrasi BMD sesuai standar	dokumen	4	4	100,00%			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			3.485	3.107	89,15%			
			Jumlah rencana kebutuhan barang miulik daerah	dok	2	2	100,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			427.443	359.100	84,01%			
			Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	dok	4	4	100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20.000	20.000	100,00%			
			Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar (Bag Umum)	dokumen	1	1	100,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			20.000	20.000	100,00%			
			Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	4	4	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.876.047	2.384.738	82,92%			
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar (Bag Umum)	%	80	80	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			56.359	53.853	95,55%			
			Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			103.343	94.937	91,87%			
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	6	6	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			26.961	25.492	94,55%			
			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			136.471	132.721	97,25%			
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1	1	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			48.000	22.260	46,38%			
			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dok	12	12	100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.526.137	1.302.385	85,34%			
			Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	lap	250	250	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			978.777	753.091	76,94%			
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	lap	12	12	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			394.983	367.876	93,14%			
			Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (Perpres Pengadaan Barjas & RKBU)	unit	10	10	100,00%			
		Pengadaan Mebel			73.123	72.545	99,21%			
			Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	10	10	100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			122.586	98.320	80,20%			
			Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	21	21	100,00%			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			99.992	99.345	99,35%			
			Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	1	1	100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			99.282	97.666	98,37%			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	13	13	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.650.175	5.351.536	94,71%			
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			18.460	11.510	62,35%			
			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	lap	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.271.051	2.150.248	94,68%			
			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	lap	12	12	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.360.664	3.189.778	94,92%			
			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	lap	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.803.210	1.663.205	92,24%			
			Jumlah unit BMD yang pelihara sesuai standar	unit	138	138	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			83.800	83.798	100,00%			
			Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	2	2	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			596.072	513.677	86,18%			
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	60	60	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			316.772	266.954	84,27%			
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	110	110	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			783.963	776.388	99,03%			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	8	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			22.604	22.388	99,04%			
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	54	54	100,00%			
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			254.860	74.300	29,15%			
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan dan operasional KDH/WKDH yang disediakan	laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			254.860	74.300	29,15%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang	2	2	100,00%				
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			479.891	456.725	95,17%				
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan rumah tangguh KDH/WKDH	paket	8	8	100,00%				
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			479.891	456.725	95,17%				
			Jumlah paket keputusan Kepala Daerah	paket	11	11	100,00%				
BAGIAN ORGANISASI					765.489	765.489	92,64%	Semua sudah tercapai sesuai target	Keluaran/output kinerja agar didokumentasikan secara digital sehingga masyarakat dapat mengakses.		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			765.489	709.176	92,64%				
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Bagian Organisasi)	indeks	85	89,27	105,02%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.400	14.400	82,76%				
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar (Bag Organisasi)	laporan	15	15	100,00%				
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			17.400	14.400	82,76%				
			Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	2	2	100,00%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			57.803	51.993	89,95%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar (Bag Organisasi)	%	90	100	111,11%				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			18.773	16.631	88,59%				
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	4	4	100,00%				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.380	1.376	99,71%				
			Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	1	1	100,00%				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.079	6.070	99,86%				
			Jumlah paket, bahan logistik kantor yang disediakan	paket	2	2	100,00%				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			13.003	9.762	75,07%				
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	2	2	100,00%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800	1.740	96,67%			
			Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	1	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			16.768	16.414	97,89%			
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.400	2.400	100,00%			
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan (Bag Organisasi)	laporan	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.400	2.400	100,00%			
			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	1	1	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50.881	45.713	89,84%			
			Jumlah unit BMD yang pelihara sesuai standar (Bag Organisasi)	unit	10	10	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			48.161	43.213	89,73%			
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	6	6	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.720	2.500	91,91%			
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	4	4	100,00%			
		Penataan Organisasi			637.006	594.671	93,35%			
			Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	%	100	100	100,00%			
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			336.222	316.740	94,21%			
			Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan yang tersusun	Dokumen	7	7	100,00%			
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			168.400	159.663	94,81%			
			Jumlah Laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana yang disediakan	laporan	3	3	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			107.557	98.827	91,88%			
			Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang tersusun	Dokumen	2	2	100,00%			
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			24.827	19.441	78,31%			
			Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun	Dokumen	2	2	100,00%			
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN					3.878.497	3.878.497	87,51%	Jadwal Pimpinan yang sering berubah-ubah dari yang ditentukan, sehingga perlunya kecermatan dan tenaga ekstra dalam kelancaran pelayanan kedinasan KDH/WKDH.	Dari data capaian kinerja tahun 2023 kategori sangat tinggi. Keluaran kinerja / output kinerja / level/tingkatan hendaknya di dokumentasikan secara digital dan semua masyarakat dapat mengakses.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.878.497	3.394.247	87,51%			
			<i>Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Bag. Prokompim)</i>	<i>indeks</i>	85	89,27	105,02%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			61.806	50.083	81,03%			
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar (Bag Prokompim)	laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			38.940	30.140	77,40%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	8	8	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			22.866	19.943	87,21%			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	26	26	100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			39.950	34.575	86,55%			
			Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar (Bag Prokompim)	laporan	12	12	100,00%			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			39.950	34.575	86,55%			
			Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan yang disediakan	paket	4	4	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			205.976	138.737	67,36%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar (Bag Prokompim)	%	90	90	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			39.332	38.006	96,63%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	5	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.022	5.917	73,76%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			27.222	20.156	74,04%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200	3.120	74,29%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	24	24	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			127.200	71.538	56,24%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			360.547	357.996	99,29%			
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan (Bag Prokompim)	laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000	2.800	56,00%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	2	2	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			355.547	355.196	99,90%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			198.553	162.120	81,65%			
			Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	unit	32	32	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			182.470	148.089	81,16%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	8	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			16.083	14.031	87,24%			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	26	24	92,31%			
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			895.031	666.761	74,50%			
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar (Bag Prokompim)	laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			295.031	246.761	83,64%			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	28	28	100,00%			
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			600.000	420.000	70,00%			
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan	8	12	150,00%			
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			2.116.634	1.983.976	93,73%			
			Persentase pelayanan Keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi pimpinan	persen	100	100	100,00%			
		Fasilitasi Keprotokolan			1.581.679	1.516.834	95,90%			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	laporan	12	12	100,00%			
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			155.558	90.746	58,34%			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	laporan	12	12	100,00%			
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan			379.397	376.396	99,21%			
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	laporan	12	12	100,00%			
SEKRETARIAT DPRD					56.148.662	56.148.662	92,56%	Target kinerja dicapai dengan kerjasama antar bagian yang menyesuaikan	Susun perencanaan program kegiatan yang adaptif dan akomodatif dengan dinamika	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			56.148.662	51.973.710	92,56%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Indeks</i>	85	94,34	110,99%	dinamika jadwal kegiatan DPRD	jadwal kegiatan DPRD	
			<i>Persentase Dokumen Perencanaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>	<i>Persen</i>	100	0	0,00%			
			<i>Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Bagian Keuangan)</i>	<i>Indeks</i>	85	85,0026	100,00%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.063	9.057	90,00%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Standar	Dokumen	33	33	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.169	7.137	99,55%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	19	19	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.894	1.920	66,35%			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	14	14	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.198.768	3.945.186	93,96%			
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai standar	laporan	3140	3667	116,78%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.080.313	3.838.111	94,06%			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	728	743	102,06%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			113.220	101.890	89,99%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5.235	5.185	99,04%			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2400	2914	121,42%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			101.000	100.575	99,58%			
			Jumlah Dokumen Administrasi BMD sesuai standar	Dokumen	1	1	100,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			101.000	100.575	99,58%			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			743.240	603.824	81,24%			
			Jumlah Layanan administrasi Kepegawaian sesuai standar	Laporan/dokumen setiap layanan yang diberikan	0	0	0%			
			Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	Laporan	6	9	150,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			48.364	21.426	44,30%			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	110	107	97,27%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			694.876	582.398	83,81%			
			Jumlah Orang yang Mengikuti BinteK Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	laporan	0	0	0%			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Laporan	5	5	100,00%			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	91	80	87,91%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.840.382	1.267.291	68,86%			
			Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran sesuai standar	Persen	98	100	102,04%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			179.057	119.582	66,78%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	32	32	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			191.612	168.140	87,75%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24	32	133,33%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			220.360	218.270	99,05%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	52	80	153,85%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			136.545	133.927	98,08%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	91	91	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			71.603	51.654	72,14%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Paket	21	21	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Disediakan							
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			53.400	50.220	94,04%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	24	24	100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			756.740	306.981	40,57%			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	94	94	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			231.065	218.519	94,57%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	60	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.035.366	5.631.182	93,30%			
			Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	Unit	467	619	132,55%			
		Pengadaan Mebel			937.358	925.931	98,78%			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	157	157	100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			680.061	640.322	94,16%			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	80	80	100,00%			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.210.056	2.976.956	92,74%			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	5	5	100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.207.891	1.087.973	90,07%			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	377	377	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.219.664	1.860.975	83,84%			
			Jumlah Laporan Penggunaan Jasa Penunjang Urusan yang sesuai ketentuan	Laporan	266	266	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			13.000	12.577	96,74%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	17	17	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			889.916	565.564	63,55%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	100	100	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.316.748	1.282.834	97,42%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	149	149	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.866.184	3.598.630	93,08%			
			Jumlah Unit BMD yang dipelihara sesuai standar	Unit	405	391	96,54%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			584.370	510.852	87,42%			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	115	110	95,65%			
		Pemeliharaan Mebel			56.570	49.095	86,79%			
			Jumlah mebel yang dipelihara	unit	80	66	82,50%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			120.709	74.810	61,98%			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	73	73	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.655.114	2.585.949	97,40%			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	14	14	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			449.421	377.924	84,09%			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	128	128	100,00%			
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			36.225.409	34.161.672	94,30%			
			Jumlah Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kegiatan	3	3	100,00%			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Orang/bulan/paket	586	637	108,70%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			35.210.152	33.312.580	94,61%			
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	orang/bulan	630	540	85,71%			
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			890.348	796.680	89,48%			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	225	225	100,00%			
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			124.909	52.413	41,96%			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	orang	45	23	51,11%			
		Layanan Administrasi DPRD			908.587	795.318	87,53%			
			Jumlah Layanan Administarsi DPRD	Kali	177	177	100,00%			
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			908.587	795.318	87,53%			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	177	177	100,00%			
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					8.192.793	8.192.793	88,23%	Kurang tepatnya perhitungan waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga terdapat 1 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan	Disusun timeline aktivitas kinerja agar dapat melaksanakan tugas tepat waktu, disamping tetap tepat mutu, tepat administrasi dan tepat sasaran	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.192.793	7.228.157	88,23%			
			<i>Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah</i>	<i>Indeks</i>	83	94,04	113,30%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.550	8.374	61,80%			
			Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai standart	Dokumen	15	15	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.000	3.930	56,14%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.550	4.444	67,84%			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.905.111	5.217.915	88,36%			
			Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	Dokumen	1	1	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.830.111	5.155.380	88,43%			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	35	35	100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			70.000	59.347	84,78%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5.000	3.188	63,76%			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			489.600	469.969	95,99%			
			Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	Orang	35	35	100,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			30.000	22.431	74,77%			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	9	9	100,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			459.600	447.538	97,38%			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	64	68	106,25%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			781.352	611.631	78,28%			
			Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	paket	38	38	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.500	7.500	100,00%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			401.152	399.013	99,47%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	56	56	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			17.000	10.893	64,08%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	8	8	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			55.300	54.763	99,03%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			17.000	16.996	99,98%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	5	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.400	6.840	81,43%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			275.000	115.626	42,05%			
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	80	80	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			310.732	299.000	96,22%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			310.732	299.000	96,22%			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			385.503	322.804	83,74%			
			jumlah laporan penyediaan urusan pemerintah daerah	laporan	3	3	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			113.950	53.643	47,08%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			271.553	269.160	99,12%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			306.945	298.465	97,24%			
			Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit	31	31	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			268.945	261.510	97,24%			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	kendaraan	31	31	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.000	11.760	98,00%			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	17	17	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			6.000	5.495	91,58%			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20.000	19.700	98,50%			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	100,00%			
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH					20.875.497	20.875.497	88,56%	Belanja tidak terduga digunakan untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan biaya pemakaman penduduk miskin, penanganan pengungsi terdampak bencana dan santunan bagi warga sakit di RS kelas III sehingga realisasinya sesuai jumlah pengajuan.	Capaian kinerja tahun 2023 sudah bagus, untuk tahun 2024 agar pencapaian kinerja diupayakan dapat melampaui target yang telah ditetapkan, terutama pada indikator yang memiliki dampak yang lebih luas dalam peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20.875.497	18.488.230	88,56%			
			<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah</i>	<i>Indeks</i>	85	90,46	106,42%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.036	17.741	93,20%			
			Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun	Dok	15	15	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.476	10.128	96,68%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.560	7.613	88,94%			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.456.267	17.222.855	88,52%			
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	Dok	5	5	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.326.804	17.095.764	88,46%			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	75	69	92,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			125.258	123.534	98,62%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	1	1	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			4.205	3.557	84,58%			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	8	8	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			117.866	94.579	80,24%			
			Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	Dokumen	1	1	100,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			117.866	94.579	80,24%			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	98	100	102,04%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			308.681	252.991	81,96%			
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	Persen	100	100	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.617	2.608	99,64%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	24	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			59.023	35.837	60,72%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	83	83	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.072	5.614	69,55%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	33	33	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			39.209	29.611	75,52%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	14	14	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			20.644	16.111	78,04%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	17	17	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.608	3.790	82,25%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	2	2	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			174.508	159.421	91,35%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	30	30	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			75.256	70.946	94,27%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	Unit	10	10	100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			75.256	70.946	94,27%			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	10	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			612.097	588.769	96,19%			
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.090	6.848	75,33%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	2	2	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			30.747	23.666	76,97%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	2	2	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			572.260	558.255	97,55%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			286.294	240.349	83,95%			
			Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	Unit	184	172	93,48%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			221.765	196.369	88,55%			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	130	128	98,46%			
		Pemeliharaan Mebel			1.752	713	40,67%			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	11	7	63,64%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			19.601	12.159	62,03%			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			43.176	31.109	72,05%			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	27	27	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					11.098.388	11.098.388	89,78%	Masih adanya Pelanggaran Disiplin menyebabkan target Persentase Perangkat Daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku tidak tercapai. Pencapaian Target Point Penilaian Mandiri Merit Sistem pada Nilai Kriteria Peningkatan Kompetensi belum tercapai maksimal karena belum adanya penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan karier melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai, Pelaksanaan Coaching dan Mentoring belum terjadwal dan dievaluasi	Disarankan untuk perencanaan tahun depan lebih optimal sesuai kebutuhan opd dan lebih tepat sasaran		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.098.388	9.964.560	89,78%				
			Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (BKPP)	indeks	85	89,15	104,88%				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.162	7.667	75,44%				
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	dokumen	4	4	100,00%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.609	3.439	61,31%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	dokumen	2	2	100,00%				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.553	4.228	92,85%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	13	13	100,00%				
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Bulanandan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)	dokumen	2	2	100,00%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.440.009	5.978.888	92,84%				
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	dokumen	29	29	100,00%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.377.027	5.919.840	92,83%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	528	528	100,00%				
			Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar	orang/bulan	49	44	89,80%				
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			57.120	57.120	100,00%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	100,00%				
			Jumlah bulan terbayarnya administrasi pelaksanaan tugas ASN	bulan	12	12	100,00%				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5.862	1.928	32,89%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	14	14	100,00%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Tertata dan Terverifikasi (Laporan SPJ Bulanan, Laporan Prognosis, Laporan Keuangan)	Dokumen	3	3	100,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000	19.788	98,94%			
			Jumlah dokumen administrasi BMD sesuai standar	dokumen	1	1	100,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			20.000	19.788	98,94%			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	1	100,00%			
			Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit	1	1	100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.714.349	3.123.487	84,09%			
			Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	dokumen	4	4	100,00%			
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			33.300	33.295	99,98%			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	5	5	100,00%			
			jumlah mesin absensi yang terbeli	buah	5	5	100,00%			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			3.620.945	3.034.193	83,80%			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	1	100,00%			
			Jumlah ID Card ASN yang tercetak	buah	1320	1889	143,11%			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	7011	7011	100,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			60.104	55.998	93,17%			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	15	31	206,67%			
			Jumlah ASN yang ikut diklat/workshop/bintek/seminar berdasarkan tugas dan fungsi	orang	20	31	155,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			306.866	288.139	93,90%			
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	%	100	100	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.237	1.632	72,97%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	11	1100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			62.639	58.240	92,98%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	59	59	100,00%			
			Jumlah penyediaan ATK	jenis	50	50	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			16.008	10.883	67,98%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	8	8	100,00%			
			Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	jenis	4	4	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			74.019	70.417	95,13%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	14	14	100,00%			
			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	jenis	17	17	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.800	4.800	100,00%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	24	24	100,00%			
			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	jenis	2	2	100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			24.982	24.716	98,94%			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			122.181	117.452	96,13%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	100,00%			
			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri	kali	40	40	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			127.961	122.230	95,52%			
			Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	unit	15	16	106,67%			
		Pengadaan Mebel			16.382	15.780	96,33%			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	3	3	100,00%			
			Jumlah Pengadaan Mebel dan Perlengkapannya	jenis	2	2	100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			95.059	89.930	94,60%			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	11	11	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			16.520	16.520	100,00%			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	2	100,00%			
			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jenis	2	2	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			154.273	121.967	79,06%			
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	laporan	36	36	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.400	2.711	61,60%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	100,00%			
			Jumlah Surat Terkirim Lewat Ekspedisi	berkas	60	60	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			77.666	53.389	68,74%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
			Jumlah Tagihan fasilitas dasar kantor	kali	48	48	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			72.207	65.868	91,22%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	100,00%			
			Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honorarium dan premi asuransi PHD, sewa tanah gedung diklat)	jenis	2	2	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			324.768	302.394	93,11%			
			Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	unit	64	64	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			141.860	140.898	99,32%			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	15	19	126,67%			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	unit	18	19	105,56%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			44.632	24.834	55,64%	Penyerapan anggaran pada sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Fasilitasi Pengawasan di bawah 50% karena dilakukan efisiensi anggaran.	Agar dilakukan Evaluasi atas kelemahan-kelemahan kinerja yang menyebabkan capaian masih di bawah 90% pada minggu ketiga bulan Desember 2023. Agar dipersiapkan timeline pelaksanaan kegiatan untuk kejelasan kinerja yang akan dilakukan termasuk menyesuaikan dengan PKPT APIP	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	48	48	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			138.276	136.663	98,83%			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100,00%			
INSPEKTORAT DAERAH					8.989.432	8.989.432	93,21%			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.989.432	8.378.714	93,21%			
			<i>Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja PD</i>	<i>Indeks</i>	84	95,18	113,31%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			71.867	69.534	96,75%			
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	Dokumen	17	17	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			19.787	19.548	98,79%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			52.081	49.986	95,98%			
			Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3	3	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.800.294	7.291.269	93,47%			
			Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai ketentuan	dokumen	6	6	100,00%			
			Jumlah gaji dan tunjangan yang terbayar	persen	100	100	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.749.505	7.244.049	93,48%			
			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	630	630	100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			41.580	38.665	92,99%			
			Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			9.209	8.556	92,91%			
			Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	6	6	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			30.000	25.702	85,67%			
			Jumlah BMD yang diasuransikan	Unit	1	1	100,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			30.000	25.702	85,67%			
			Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	Dokumen	1	1	100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			237.725	185.036	77,84%			
			Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	orang	35	35	100,00%			
			Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek (PKS)	orang	135	135	100,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			194.088	169.817	87,49%			
			Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	20	100,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			43.637	15.219	34,88%			
			Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	40	35	87,50%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			171.828	167.155	97,28%			
			Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standar	dokumen	38	38	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.135	4.071	98,44%			
			Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	5	5	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			31.215	28.899	92,58%			
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	24	24	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.902	1.760	92,53%			
			Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	2	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14.820	14.586	98,42%			
			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	10	10	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			14.602	14.198	97,23%			
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	10	10	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.000	6.340	90,57%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			98.153	97.302	99,13%			
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			65.676	59.332	90,34%			
			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	31	31	100,00%			
		Pengadaan Mebel			9.126	8.730	95,66%			
			Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	2	2	100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			44.570	44.300	99,39%			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			11.980	6.302	52,60%			
			Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	15	10	66,67%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			328.240	304.884	92,88%			
			Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jenis	6	6	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.050	612	58,24%			
			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			117.894	107.168	90,90%			
			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			209.296	197.105	94,18%			
			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			283.802	275.802	97,18%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang dilakukan pemeliharaan	Unit	121	121	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			222.110	221.992	99,95%			
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	28	28	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			33.604	28.176	83,85%			
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	10	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			18.040	17.898	99,21%			
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			10.048	7.736	76,99%			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	20	16	80,00%			
KECAMATAN KALIWUNGU					3.741.877	3.741.877	93,19%			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.741.877	3.487.042	93,19%			
			<i>Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah</i>	<i>indeks</i>	84	93,33	111,11%			
			<i>Jumlah barang milik daerah yang tersedia</i>	<i>jenis</i>	2	2	100,00%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.535	6.954	60,29%			
			Jumlah dokumen renstra dan renja yang tersusun	dokumen	2	2	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9.535	5.685	59,62%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat (RKA, DPA, RTP, Renstra dan perubahannya, KAK, GAB GBS, RenAksi, renja)	Dokumen	12	12	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000	1.269	63,46%			
			Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	dokumen	6	6	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.622.110	2.430.704	92,70%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	orang	22	16	72,73%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.581.470	2.394.566	92,76%			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	22	16	72,73%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			38.640	34.980	90,53%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.000	1.159	57,94%			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	2	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			103.465	92.879	89,77%			
			Jumlah Administrasi Umum dan Kepegawaian yang terlaksana	orang	22	16	72,73%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.000	7.950	99,38%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			27.878	24.940	89,46%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.352	6.629	79,37%			
			Jumlah persediaan peralatan rumah tangga	Jenis	4	4	100,00%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	22	22	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.090	12.813	84,91%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4.337	2.037	46,96%			
			Jumlah persediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis	2	2	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200	4.200	100,00%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	jenis	2	2	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			35.608	34.311	96,36%			
			Jumlah perjalanan rapat dan konsultasi SKPD	OH	80	76	95,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			187.267	185.290	98,94%			
			Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan	jenis	7	7	100,00%			
		Pengadaan Mebel			18.473	17.237	93,31%			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	jenis	2	2	100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.238	99.823	99,59%			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	jenis	3	3	100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			68.556	68.230	99,52%			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			293.075	272.650	93,03%			
			Jumlah jasa penunjang urusan yang terlaksana	Kegiatan	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000	3.000	100,00%			
			Jumlah belanja surat menyurat	Jenis	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			54.563	43.689	80,07%			
			Jumlah rekening telepon, internet dan listrik yang terbayar	Jenis	3	3	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			235.512	225.962	95,94%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	orang	8	7	87,50%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			524.426	498.564	95,07%			
			Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	unit	15	15	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			120.127	115.789				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan	30	30	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.830	5.690	97,60%	Kegiatan terlaksana tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan di awal perencanaan	capaian kinerja sudah mencapai 100%, pertahankan di periode anggaran berikutnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	15	15	100,00%					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			398.470	377.085	94,63%					
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	gedung	1	1	100,00%					
KECAMATAN KOTA KUDUS					15.016.423	15.016.423	96,09%					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.016.423	14.429.142	96,09%					
			<i>Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec. Kota)</i>	<i>Indeks</i>	83	94,5	113,86%					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.000	13.910	99,35%					
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	Dokumen	14	14	100,00%					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.000	9.910	99,10%					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	100,00%					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.000	4.000	100,00%					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100,00%					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.217.994	12.703.810	96,11%					
			Jumlah administrasi keuangan yang tersedia	Bulan	12	12	100,00%					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.170.854	12.657.203	96,10%					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	92	1104	1200,00%					
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			45.240	44.855	99,15%					
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00%					
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.900	1.752	92,21%					
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	9	9	100,00%					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			134.087	111.885	83,44%					

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah administrasi Umum yang tersedia	Bulan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.999	4.618	92,38%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26.800	25.898	96,63%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	38	38	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12.000	9.709	80,90%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	23	23	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.741	10.776	91,78%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.000	5.000	100,00%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200	4.200	100,00%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	24	100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.640	2.640	100,00%			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			66.707	49.045	73,52%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	11	11	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			916.705	907.607	99,01%			
			Jumlah BMD yang tersedia	Bulan	12	12	100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			114.201	112.087	98,15%			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	8	100,00%			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			783.379	777.263	99,22%			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			19.125	18.258	95,46%						
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100,00%						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			224.022	190.912	85,22%						
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	36	36	100,00%						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.500	3.332	95,20%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00%						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			124.210	91.663	73,80%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			96.312	95.917	99,59%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			509.616	501.019	98,31%						
			Jumlah BMD yang terpelihara	unit	65	65	100,00%						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			156.660	149.405	95,37%						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	14	100,00%						
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			46.554	46.300							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	100,00%						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			306.401	305.314	99,65%						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00%						
KECAMATAN JATI					4.310.277	4.310.277	93,08%				Kegiatan terlaksana tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan diawal perencanaan	capaian sudah tinggi, pertahankan di periode tahun selanjutnya	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.310.277	4.012.178	93,08%						
			Indeks kepuasan Masyarakat	Indeks	83	83,68	100,82%						

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.088	10.088	83,45%			
			jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja PD	Dokumen	10	10	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.000	9.000	81,82%			
			jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.088	1.088	100,00%			
			jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	4	4	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.773.679	2.556.638	92,17%			
			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	27	27	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.772.679	2.555.645	92,17%			
			jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	27	27	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.000	993	99,30%			
			Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	2	2	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			107.140	103.107	96,24%			
			Jumlah layanan pendukung perkantoran sesuai standart	%	100	100	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.900	1.900	100,00%			
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan	Jenis	3	3	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.000	9.984	99,84%			
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	Jenis	31	31	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.699	8.649				
			Jumlah peralatan Rumah tangga yg disediakan	Jenis	20	20	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			18.209	18.161	99,73%			
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	5	5	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12.390	12.387	99,98%			
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	Jenis	5	5	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.140	4.060	98,07%			
			Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang undangan yg disediakan	dokumen	24	24	100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.060	2.029	98,50%			
			Terfasilitasinya kunjungan tamu	Jenis	6	6	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			49.742	45.937	92,35%			
			Jumlah laporan penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD	laporan	7	7	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			131.235	130.374	99,34%			
			Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	unit	5	5	100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			131.235	130.374	99,34%			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			361.867	346.956	95,88%			
			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.500	2.500	100,00%			
			jumlah jasa laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			52.986	50.567	95,43%			
			jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	laporan	3	3	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			306.381	293.889				
			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	laporan	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			924.267	865.015	93,59%			
			Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	unit	28	28	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			82.261	79.164	96,24%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTAS E KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	11	11	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.032	10.032	100,00%			
			jumlah peralatan dan mesin lainya yg dipelihara	unit	16	16	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			816.974	760.819	93,13%			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100,00%			
			Honorarium tenaga kebersihan 2 orang	bulan	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			15.000	15.000	100,00%			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100,00%			
KECAMATAN UNDAAN					3.976.334	3.976.334	93,89%	Kegiatan terlaksana tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan	hasil sudah maksimal, pertahankan di periode tahun selanjutnya	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.976.334	3.733.461	93,89%			
			<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah(kec undaan)</i>	<i>Indeks</i>	81	90,35	111,54%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.403	12.423	75,73%			
			jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja yang tersusun	Dokumen	13	13	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.739	9.504	80,96%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.664	2.919	62,59%			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.561.942	2.369.705	92,50%			
			Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai standart	Laporan	4	4	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.559.857	2.368.464	92,52%			
			Jumlah Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	19	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.085	1.241	59,52%			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.374	91.623	91,28%			
			cakupan pelayanan administrasi umum	bulan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.000	4.985	99,70%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.205	18.058	89,37%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.650	8.389	96,98%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.100	9.834	97,37%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	2	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12.321	12.027	97,61%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800	1.800	100,00%			
			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	jenis	1	1	100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.100					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	2	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40.198	35.180	87,52%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			278.494	277.349	99,59%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	%	100	100	100,00%			
		Pengadaan Mebel			37.303	36.980	99,13%			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	7	7	100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			241.191	240.369	99,66%			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	17	17	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			174.062	155.252	89,19%			
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000	1.000	100,00%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			73.750	57.419	77,86%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			99.312	96.833	97,50%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			845.060	827.109	97,88%			
			cakupan baarang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (kec undaan)	bulan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			131.475	124.295	94,54%			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	14	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			694.057	688.798	99,24%			
			Rehabilitasi Gedung Aula PKK dan Sekretariat PKK	gedung	1	1	100,00%			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			jumlah tenaga honorer/tidak tetap kebersihan kantor dan premi asuransi yang terbayar	orang	1	1	100,00%			
			Jumlah honorarium tenaga pelaksana kegiatan keamanan kantor dan premi asuransi yang terbayar dan premi asuransi terbayar	orang	11	11	100,00%			
			Jumlah honorarium tenaga pelaksana kegiatan kebersihan kantor dan premi asuransi yang terbayar dan premi asuransi terbayar	orang	1	1	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			19.528	14.016	71,77%			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	jenis	4	4	100,00%			
KECAMATAN MEJOBO					4.226.131	4.226.131	94,27%	Fungsi Kecamatan sebagai Fasilitas menjadi penyebab tidak terserapnya anggaran secara maksimal karena tergantung dengan OPD Pengampu kegiatan.	capaian kinerja sudah tergolong tinggi, tingkatkan dan pertahankan di periode anggaran berikutnya	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.226.131	3.983.870	94,27%			
			<i>Indek Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah</i>	<i>Indeks</i>	83,5	92,31	110,55%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000	8.182				
			Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	Dokumen	15	15	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.000		59,54%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.000	2.228	74,25%			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.052.920	2.829.038	92,67%			
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.012.400	2.792.728				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	20	80,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			37.620	34.760	92,40%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.900	1.551	53,47%			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			76.647	73.039	95,29%			
			Jumlah laporan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.944	4.885	98,81%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			19.783	19.483	98,48%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	34	34	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.603	7.603	100,00%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	21	21	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.638	9.638	100,00%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			8.238	8.154	98,98%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	6	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200	4.200	100,00%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	100,00%			
		Fasilitas Kunjungan Tamu			2.961	2.961	100,00%			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	3	3	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			19.280	16.115	83,58%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			476.910	475.315	99,67%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan	Unit	64	64	100,00%			
		Pengadaan Mebel			211.339	211.074	99,87%			
			Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	7	7	100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			185.341	184.415	99,50%			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	15	100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			80.230	79.826	99,50%			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			150.436	146.749	97,55%			
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000	3.000	100,00%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			45.764	43.242	94,49%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			101.672	100.507	98,85%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			456.218	451.547	98,98%			
			Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	%	90	90	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			120.559	118.562	98,34%			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	16	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			316.853	315.270	99,50%			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Honorarium Tenaga Kontrak yang terbayar	Orang/bulan	5	5	100,00%	Fungsi Kecamatan sebagai Fasilitas menyebabkan sebagian Sub Kegiatan dalam capaian kinerja dan serapan anggaran tergantung dengan OPD Lain	tampak realisasi sudah termasuk tinggi, tingkatkan capaian di tahun-tahun mendatang	
			Terbayarnya Honorarium THL		0	0	0%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			18.806	17.715	94,20%			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	22	22	100,00%			
KECAMATAN JEKULO					4.010.019	4.010.019	95,49%			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.010.019	3.829.015	95,49%			
			<i>Indek Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jekulo</i>	<i>Indeks</i>	91	92,49	101,64%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.500	10.909	94,86%			
			Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai standar	Dokumen	14	14	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.000	9.753	97,53%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.500	1.156	77,08%			
			Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	dokumen	3	3	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.734.084	2.601.704				
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai standar	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.688.584	2.558.025	95,14%			
			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	17	23	135,29%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			45.000	43.460	96,58%			
			Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	12	12	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			500	220	43,92%			
			Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	12	12	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			85.431	72.263	84,59%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	%	100	100	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.500	2.500	100,00%			
			Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	7	7	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.700	20.034	96,78%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	39	39	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.399	7.587	90,33%			
			Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket	24	24	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.400	6.180	73,57%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	7	7	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.000	3.402	68,04%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	8	8	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200	3.000	71,43%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	24	100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.250	825	36,67%			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			33.982	28.735	84,56%			
			Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	20	20	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			153.729	143.623	93,43%			
			Jumlah BMD yang di adakan sesuai ketentuan	Unit	7	7	100,00%			
		Pengadaan Mebel			15.030	14.350	95,48%			
			Jumlah Paket mebel yang disediakan	paket	3	7	233,33%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			138.699	129.273	93,20%			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	8	80,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			216.344	197.491	91,29%			
			Jumlah Laporan Penggunaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000	3.000	100,00%			
			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			63.610	44.851	70,51%			
			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			149.734	149.640	99,94%			
			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			808.931	803.024	99,27%			
			Jumlah Unit BMD yang dipelihara sesuai standar	Unit	10	10	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			90.734	86.541	95,38%			
			Jumlah Kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	unit	10	10	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.678	12.595	99,35%			
			Jumlah jasa service peralatan kantor yang disediakan	unit	14	14	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			705.520	703.888	99,77%			
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	2	2	100,00%			
KECAMATAN BAE					3.649.266	3.649.266	90,33%	Kegiatan terlaksana tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan	capaian kinerja sudah tergolong tinggi, tingkatkan dan pertahankan di periode anggaran berikutnya	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.649.266	3.296.252	90,33%			
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Kec.Bae)	Indeks	85	90,01	105,89%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.229	14.019	98,52%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	7	7	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12.230	12.020				
			jumlah dokumen pelaporan keuangan	dokumen	7	7	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.999	1.999				
			jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	dokumen	4	4	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.600.166	2.364.872	90,95%			
			Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.555.426	2.321.062	90,83%			
			jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	bulan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			42.240	41.360	97,92%			
			jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	%	100	100	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.500	2.450	98,00%			
			jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	4	4	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			111.650	96.908	86,80%			
			jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.931	6.931	100,00%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			18.225	17.896	98,19%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	jenis	30	30	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.000	6.990	99,86%			
			jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis	10	10	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.114	9.864	97,53%			
			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	jenis	3	3	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			13.285	10.694	80,50%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	jenis	3	3	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200	4.200	100,00%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	jenis	2	2	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			51.895	40.333	77,72%			
			jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	OH	3	3	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			437.078	411.578	94,17%			
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	6	6	100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			147.014	145.690	99,10%			
			jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	7	7	100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			290.064	265.888	91,67%			
			jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	unit	7	7	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			187.994	145.407	77,35%			
			jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	%	100	100	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000	2.000	100,00%			
			Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	jenis	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			73.402	53.529	72,93%			
			Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan	jenis	4	4	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			112.592	89.878	79,83%			
			jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			298.150	263.468	88,37%			
			jumlah barang milik daerah yang terpelihara	%	100	100	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			109.385	99.700	91,15%			
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	unit	16	16	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			170.496	148.722	87,23%			
			Jumlah Tenaga Keamanan dan Kebersihan yang tersedia	orang	3	3	100,00%			
			Terbayarnya honorarium Tenaga Non PNS	bulan	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			18.269	15.045	82,35%			
			jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	unit	2	2	100,00%			
KECAMATAN GEBOG					3.874.623	3.874.623	95,49%	Kegiatan terlaksana tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan	capaian sudah 100%, pertahankan di tahun-tahun mendatang agar hasil maksimal	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.874.623	3.699.739	95,49%			
			<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Gebog)</i>	<i>Indeks</i>	83	88,09	106,13%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35.529	34.899	98,23%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja yang tersusun	dokumen	13	13	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.059	24.449	97,57%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.470	10.451	99,82%			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.690.003	2.559.507	95,15%			
			Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai standar dan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Kegiatan	3	3	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.644.212	2.513.719	95,06%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	19	100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			41.580	41.580	100,00%			
			Terbayarnya Honor PPTK, bendahara pengeluaran, bendahara tidak langsung, bendahara pembantu pengeluaran, bendahara barang	Orang/bulan	6	6	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			4.211	4.207	99,93%			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3	3	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			132.556	126.934	95,76%			
			Jumlah administrasi umum yang tersedia	kegiatan	7	7	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.541	1.541	100,00%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			29.308	29.271	99,87%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	33	33	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.001	6.999	99,97%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	30	30	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.086	15.014	99,52%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	9	9	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			8.004	7.999	99,94%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	7	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.800	4.800	100,00%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	dokumen	2	2	100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.000	2.000	100,00%			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			64.816	59.310	91,51%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			245.990	245.603	99,84%			
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah	nilai	44	44	100,00%			
		Pengadaan Mebel			52.748	52.663	99,84%			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	3	100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			193.242	192.940	99,84%			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	19	19	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			552.996	529.344	95,72%			
			Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan	3	3	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000	3.000	100,00%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	200	200	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			63.746	61.055	95,78%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik dan instalasi listrik yang disediakan	laporan	3	3	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			486.250	465.289	95,69%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	kegiatan	5	5	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			217.550	203.453	93,52%			
			Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	kegiatan	6	6	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			111.873	103.698	92,69%			
			jumlah jasa pemeliharaan Kendaraan, Suku Cadang, Servis, BBM, Olie dan Perizinan kendaraan Dinas	unit	14	14	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			92.748	89.654	96,66%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, jasa pengambilan sampah jumlah pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas yang tersedia dan Terbayarnya honor Tenaga Kontrak kebersihan	Laporan	3	3	100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12.929	10.101	78,13%			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	5	5	100,00%			
KECAMATAN DAWE					4.479.994	4.479.994	91,39%	Fungsi Kecamatan sebagai Fasilitas menjadi penyebab tidak terserapnya anggaran secara maksimal karena tergantung dengan OPD Pengampu kegiatan.	capaian sudah tergolong tinggi, namun ditahun mendatang diharapkan bisa ditingkatkan kembali	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.479.994	4.094.282	91,39%			
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah	indeks	86	86,16	100,19%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14.970	14.861	99,27%			
			Jumlah Daya / Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan Ketentuan	dokumen	8	8	100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.050	10.941	99,01%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	8	8	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.920	3.920	100,00%			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	6	6	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.337.807	2.979.743	89,27%			
			Jumlah Data/ Dokumen Administrasi dan Pelaporan Keuangan sesuai dengan ketentuan	%	90	87,05	96,72%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.335.681	2.977.744	89,27%			
			Jumlah Orang ang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	29	22	75,86%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.126	1.999	94,03%			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	4	4	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			136.291	132.260	97,04%			
			Jumlah Administrasi Umum yang tersedia	%	90	88,8	98,67%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.333	5.333	100,00%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disaediakan	jenis	5	5	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14.767	14.742	99,83%			
			Jumlah barang habis pakai penunjang administrasi kantor	jenis	32	32	100,00%			
			Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	jenis	6	6	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			14.773	14.579	98,69%			
			Belanja Alat Rumah Tangga	jenis	22	19	86,36%			
			Belanja Karangan Bunga	jenis	1	1	100,00%			
			Belanja Pengisian Tabung Gas	jenis	1	1	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.151	10.912	97,86%			
			Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	jenis	5	5	100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2.592	2.450	94,52%			
			Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	3	3	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200	3.900	92,86%			
			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	jenis	3	2	66,67%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			83.475	80.343	96,25%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	hari	200	140	70,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			85.100	84.800	99,65%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			85.100	84.800	99,65%			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	11	91,67%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			217.042	205.456	94,66%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.500	2.500	100,00%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jenis	1	1	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			58.520	48.559	82,98%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daa Air dan Listrik yang di sediakan	jenis	3	3	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			156.022	154.397	98,96%						
			Honorarium Non PNS (PHD)	orang	1	1	100,00%						
			Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan Pelayanan Umum (Tenaga Kontrak)	Orang	7	7	100,00%						
			Honor Tenaga Pelaksana Kegiatan Tenaga Administrasi	orang	2	2	100,00%						
			Jumlah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	orang	8	8	100,00%						
			Jumlah Premi Asuransi yang terbayar	dokumen	4	4	100,00%						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			688.784	677.163	98,31%						
			Jumlah Administrasi Umum yang tersedia	%	90	87,5	97,22%						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			109.987	106.484	96,82%						
			Jumlah BBM dan Olie	liter	6000	6000	100,00%						
			Jumlah Belanja Suku Cadang	unit	16	16	100,00%						
			Jumlah Jasa Operasional Kendaraan dan Perizinan Kendaraan Dinas	unit	16	16	100,00%						
			Jumlah Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas Operasional	unit	16	16	100,00%						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			566.426	560.384	98,93%						
			JUmlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya dipelihara/ rehabilitasi	unit	1	1	100,00%						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12.371	10.295	83,22%						
			JUmlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dioerihara/ rahabilitasi	unit	4	3	75,00%						
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					3.929.725	3.929.725	95,01%				Serapan pada kegiatan fasilitasi permasalahan kurang, karena penyelesaian permasalahan sering harus dilaksanakan mendadak dan diluar ruangan, serapan untuk perjalanan dinas dalam daerah juga kurang karena antara besaran yang diterima	Agar target program/kegiatan/sub kegiatan juga disesuaikan. Perlu dilaksanakan upaya untuk mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.929.725	3.733.518	95,01%						
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Kesbang)	indeks	85	90,54	106,52%						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.139	1.135	99,67%						

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	Dokumen	15	15	100,00%	dengan syarat administrasi yang harus dipenuhi justru dinilai menghambat pelaksanaan tugas yang harus dengan segera dan cepat dilaksanakan dan diselesaikan.		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			696	696	100,00%			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			443	439	99,14%			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.510.145	3.359.173	95,70%			
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	Laporan	29	29	100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.470.285	3.324.634	95,80%			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	20	105,26%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			39.360	34.080	86,59%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			500	459	91,84%			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	29	29	100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			149.915	130.086	86,77%			
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	%	100	100	100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			438	425	97,03%			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			23.594	23.504	99,62%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3	3	100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.690	1.685	99,70%			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			19.491	15.349	78,75%			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.757	12.206	77,46%			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	2	2	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200	2.820	67,14%			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			84.745	74.098	87,44%			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	35	35	100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			61.710	61.644	99,89%			
			Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan sesuai ketentuan	unit	7	7	100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			61.710	61.644	99,89%			
			Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	7	7	100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			97.912	86.236	88,07%			
			Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	Laporan	69	69	100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.800	1.800	100,00%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	45	45	100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			30.180	19.050	63,12%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			65.932	65.385	99,17%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			108.905	95.244	87,46%			
			Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	Unit	24	24	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			99.365	89.588	90,16%			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.540	5.656	59,29%			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14	14	100,00%			

3.1.6. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

(* dalam ribu rupiah)

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN					679.760	679.760	90,84%	-	Persiapkan timeline pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan secara rinci dan baik untuk tertib kinerja ke depannya. Lakukan pemantauan secara efektif dan efisien atas pelaksanaan kinerja agar terhindar dari kesalahan. Lakukan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan untuk memperbaiki kelemahan.	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			679.760	617.518	90,84%			
			<i>Persentase Fasilitasi Tata Pemerintahan</i>	<i>Persen</i>	100	100	100,00%			
			<i>Persentase fasilitasi kerja sama</i>	<i>Persen</i>	100	100	100,00%			
		Administrasi Tata Pemerintahan			667.401		90,80%			
			Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan	dokumen	32	32	100,00%			
		Penataan Administrasi Pemerintahan			179.950	138.175	76,79%			
			Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	dokumen	12	12	100,00%			
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			180.056	172.617	95,87%			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	dokumen	15	15	100,00%			
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			307.395	295.239	96,05%			
			Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	dokumen	5	5	100,00%			
		Fasilitasi Kerjasama Daerah			12.359	11.487	92,94%			
			Jumlah dokumen fasilitasi kerja sama	dokumen	6	8	133,33%			
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			8.449	7.647	90,50%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	dokumen	5	7	140,00%	Beberapa Lembaga tidak memenuhi persyaratan pencairan hibah , Sehingga penyerapan Anggaran belum maksimal	Penyusunan timeline program, kegiatan dan subkegiatan yang jelas dan baik agar tidak terulang keterlambatan capaian kinerja Keluaran/output subkegiatan yang berkaitan dengan hibah bansos agar dirumuskan dengan jelas mengingat besarnya alokasi anggaran bansos dan hibah.	
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			3.910	3.840	98,22%			
			Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	laporan	1	1	100,00%			
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					111.588.138	111.588.138	85,65%			
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			111.588.138	95.580.601	85,65%			
			<i>persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan (Bag Kesra)</i>	<i>persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00%</i>			
			<i>Persentase fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan zakat, infak, sodaqoh</i>	<i>persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00%</i>			
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			111.588.138	95.580.601	85,65%			
			Persentase pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat	persen	100	100	100,00%			
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			36.543.370	35.462.911	97,04%			
			Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	dokumen	34	34	100,00%			
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial			30.336.770	16.201.665	53,41%			
			Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	dokumen	7	7	100,00%			
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat			44.707.998	43.916.025	98,23%			
			Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	dokumen	22	22	100,00%			
BAGIAN HUKUM					452.790	452.790	93,27%	Dalam penyebarluasan dokumentasi hukum masih terkendala dari Perangkat Daerah dalam penyerahan minute Produk Hukum ke bagian Hukum, sehingga perlu di ubah dalam penyusunan SOP untuk Pendokumentasian dan Informasi Hukum	Data capaian kinerja sangat tinggi, aga keluaran/output kinerja di setiap tingkatan didokumentasikan secara digital sehingga masyarakat dapat mengakses. Capaian kinerja terkait RAN HAM agar dipersiapkan dengan baik. Persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan capaian kinerja tidak memenuhi target, agar diberi penjelasan/keterangan	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			452.790	422.326	93,27%			
			<i>Persentase Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum</i>	<i>%</i>	<i>97</i>	<i>327</i>	<i>337,11%</i>			
			<i>Persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan</i>	<i>%</i>	<i>97</i>	<i>91,3</i>	<i>94,12%</i>			
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			452.790	422.326	93,27%			
			Capaian kinerja terhadap pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	%	97	179	184,54%			
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			87.025	71.445	82,10%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah rancangan produk hukum daerah yang tersusun	draft	80	280	350,00%			
		Fasilitasi Bantuan Hukum			277.290	276.967	99,88%			
			Jumlah dokumen Ranham yang dilaporkan	dokumen	2	2	100,00%			
			Jumlah tertanganinya perkara Pemda	perkara	8	8	100,00%			
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			88.476	73.914	83,54%			
			Jumlah Himpunan produk hukum daerah yang dicetak dan dipublikasikan	buku	200	200	100,00%			
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan	Produk	150	137	91,33%			
BAGIAN PEREKONOMIAN					545.020	545.020	90,30%			
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			545.020	492.148	90,30%			
			<i>Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD</i>	%	9	7,5	83,33%			
			<i>Persentase Pelaksanaan Rekomendasi TPID</i>	%	85	100	117,65%			
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			45.000	43.900	97,56%			
			Jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian	dokumen	2	2	100,00%			
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			25.000	24.595	98,38%			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	5	5	100,00%			
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			20.000	19.305	96,52%			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	2	2	100,00%			
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			500.020	448.248	89,65%			
			Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam	dokumen	1	1	100,00%			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			500.020	448.248	89,65%			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	6	6	100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	Kali	19	0	0,00%	Perencanaan yang kurang akurat dalam perkiraan biaya pemeliharaan sarpras gedung kantor	Untuk membantu mempertahankan kinerja yang telah sesuai target, persiapkan timeline yang baik dan dimanfaatkan / dipatuhi. Efektifkan monitoring. Lakukan evaluasi dengan baik dan berikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.	
			Jumlah Operasi Bersama Pemberantasan BKC Ilegal	Kali	50	0	0,00%			
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					141.486	141.486	95,72%			
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			141.486	135.429	95,72%			
			<i>persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu</i>	<i>persen</i>	90	91,94	102,16%			
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			141.486	135.429	95,72%			
			Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi pembangunan	dokumen	15	15	100,00%			
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			19.037	19.003	99,82%			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	100,00%			
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			101.635	95.642	94,10%			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Dokumen	12	12	100,00%			
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			20.814	20.783	99,85%			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	2	2	100,00%			
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					1.437.434	1.437.434	85,58%	-	Optimalisasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemilihan penyedia dilakukan di awal tahun sehingga pelaksanaan pekerjaan cukup waktu	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			1.437.434	1.230.224	85,58%			
			<i>Persentase fasilitasi proses pengadaan barang dan jasa</i>	<i>Persen</i>	95	92,7	97,58%			
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.437.434	1.230.224	85,58%			
			<i>Persentase fasilitasi proses pengadaan barang dan jasa</i>	<i>Persen</i>	95	92,7	97,58%			
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			814.805	628.198	77,10%			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	90	51	56,67%			
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik			460.103	447.067	97,17%			
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	4	4	100,00%			
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			162.526	154.958	95,34%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	125	340	272,00%			
KECAMATAN KALIWUNGU					10.025	10.025	75,34%	Seiring dengan bertambahnya pekerjaan berbasis IT, kebutuhan kuota internet kantor terkadang over limit yang mengakibatkan kecepatan dalam mengakses software menjadi lebih lama. direncanakan pada tahun 2024 akan diajukan penambahan kuota internet yang pada ujungnya akan meningkatkan kinerja perkantoran.	capaian kinerja sudah tergolong tinggi, tingkatkan dan pertahankan di periode anggaran berikutnya	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			10.025	7.553	75,34%			
			cakupan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100,00%			
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			10.025	7.553	75,34%			
			Jumlah data sosial yang terfasilitasi	Dokumen	150	150	100,00%			
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			10.025	7.553	75,34%			
KECAMATAN KOTA KUDUS					11.075	11.075	96,45%	Kegiatan terlaksana tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan di awal perencanaan	capaian kinerja sudah mencapai 100%, pertahankan di periode anggaran berikutnya	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			11.075	10.683	96,45%			
			Cakupan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100,00%			
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			11.075	10.683	96,45%			
			Jumlah kegiatan fasilitasi MTQ dan bantuan sosial tingkat kecamatan	kegiatan	2	2	100,00%			
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			11.075	10.683	96,45%			
KECAMATAN JATI					12.650	12.650	97,04%	Kegiatan terlaksana tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan diawal perencanaan	capaian sudah tinggi, pertahankan di periode tahun selanjutnya	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			12.650	12.275	97,04%			
			Cakupan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100,00%			
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			12.650	12.275	97,04%			
			Jumlah evaluasi pelaksanaan kebijakan kesra	Kali	1	1	100,00%			
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			12.650	12.275	97,04%			
KECAMATAN UNDAAN					10.150	10.150	72,48%	Kegiatan terlaksana tidak sesuai dengan jadwal yang	hasil sudah maksimal, pertahankan di periode tahun selanjutnya	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			10.150	7.357	72,48%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<i>Cakupan kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</i>	%	100	100	100,00%	direncanakan			
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			10.150	7.357	72,48%				
		Jumlah pelaksanaan MTQ	Kegiatan		1	1	100,00%				
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			10.150	7.357	72,48%				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen		1	100,00%				
KECAMATAN MEJOB						13.707	13.707	79,39%	Fungsi Kecamatan sebagai Fasilitasi menjadi penyebab tidak terserapnya anggaran secara maksimal karena tergantung dengan OPD Pengampu kegiatan.	capaian kinerja sudah tergolong tinggi, tingkatkan dan pertahankan di periode anggaran berikutnya	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			13.707	10.882	79,39%				
		<i>Cakupan kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</i>	%		100	100	100,00%				
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			13.707	10.882	79,39%				
		Jumlah data sosial yang terfasilitasi	Dokumen		150	150	100,00%				
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			13.707	10.882	79,39%				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen		3	100,00%				
KECAMATAN JEKULO						10.000	10.000	95,56%	Fungsi Kecamatan sebagai Fasilitasi menyebabkan sebagian Sub Kegiatan dalam capaian kinerja dan serapan anggaran tergantung dengan OPD Lain	tampak realisasi sudah termasuk tinggi, tingkatkan capaian di tahun-tahun mendatang	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			10.000	9.556	95,56%				
		<i>Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</i>	%		100	100	100,00%				
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			10.000	9.556	95,56%				
		Jumlah Pelaksanaan MTQ dan Fasilitasi Kegiatan Sosial	Kegiatan		2	2	100,00%				
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			10.000	9.556	95,56%				
			Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	dokumen		1	100,00%				
			Jumlah laporan fasilitasi sosial yang difasilitasi	Laporan		3	100,00%				
KECAMATAN BAE						17.285	17.285	84,38%	Kegiatan terlaksana tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan	capaian kinerja sudah tergolong tinggi, tingkatkan dan pertahankan di periode anggaran berikutnya	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			17.285	14.585	84,38%				
		<i>Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kecamatan Bae)</i>	%		100	90,01	90,01%				
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			17.285	14.585	84,38%				
			Jumlah pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	kali		1	100,00%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			17.285	14.585	84,38%			
			jumlah laporan fasilitasi sosial yang difasilitasi	laporan	2	2	100,00%			
KECAMATAN GEBOG					12.550	12.550	99,66%	Kegiatan terlaksana tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan	capaian sudah 100%, pertahankan di tahun-tahun mendatang agar hasil maksimal	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			12.550	12.508	99,66%			
			<i>Cakupan fasilitasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat</i>	desa	11	11	100,00%			
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			12.550	12.508	99,66%			
			Jumlah kegiatan Pelaksanaan Kesejahteraan rakyat	kegiatan	2	2	100,00%			
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			12.550	12.508	99,66%			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dan jumlah data sosial yang tertangani	Dokumen	2	2	100,00%			
KECAMATAN DAWE					17.696	17.696	98,58%	Fungsi Kecamatan sebagai Fasilitasi menjadi penyebab tidak terserapnya anggaran secara maksimal karena tergantung dengan OPD Pengampu kegiatan.	capaian sudah tergolong tinggi, namun ditahun mendatang diharapkan bisa ditingkatkan kembali	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			17.696	17.445	98,58%			
			<i>Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</i>	%	100	92,71	92,71%			
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			17.696	17.445	98,58%			
			Pelaksanaan MTQ, LSS tingkat Kecamatan	Kegiatan	1	1	100,00%			
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			17.696	17.445	98,58%			
			Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	kali	1	1	100,00%			
SEKRETARIAT DPRD					39.033.526	39.033.526	61,39%	Target kinerja dicapai dengan kerjasama antar bagian yang menyesuaikan dinamika jadwal kegiatan DPRD	Susun perencanaan program kegiatan yang adaptif dan akomodatif dengan dinamika jadwal kegiatan DPRD	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			39.033.526	23.961.878	61,39%			
			<i>Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD yang telah disahkan</i>	persen	100	80	80,00%			
			<i>Presentase Fasilitasi Pembahasan Ranperda</i>	persen	100	100	100,00%			
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			5.557.144	3.356.187	60,39%			
			Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Kali	28	27	96,43%			
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			822.192	495.396	60,25%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	8	7	87,50%			
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			1.592.804	418.716	26,29%			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	7	7	100,00%			
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			2.542.148	1.850.463	72,79%			
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Dokumen	7	7	100,00%			
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik			600.000	591.611	98,60%			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	6	6	100,00%			
		Pembahasan Kebijakan Anggaran			1.715.666	709.380	41,35%			
			Jumlah Fasilitasi tugas Badan Anggaran yang terealisasi	Kali	8	6	75,00%			
		Pembahasan APBD			1.715.666	709.380	41,35%			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	8	6	75,00%			
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.648.866	4.391.397	57,41%			
			Jumlah fasilitasi kegiatan pengawasan Pemerintahan yang dilakukan DPRD	Kali	72	72	100,00%			
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum			7.648.866	4.391.397	57,41%			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	72	72	100,00%			
		Peningkatan Kapasitas DPRD			10.308.390	8.908.467	86,42%			
			Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Laporan	694	684	98,56%			
		Pendalaman Tugas DPRD			2.961.334	1.861.664	62,87%			
			Jumlah fasilitasi kegiatan BinteK DPRD	Laporan	27	27	100,00%			
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	16	16	100,00%			
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan			6.630.206	6.528.029	98,46%			
			Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	624	624	100,00%			
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			398.850	212.774	53,35%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	orang	36	10	27,78%			
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			318.000	306.000	96,23%			
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	orang	7	7	100,00%			
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			1.926.249	1.708.274	88,68%			
			Jumlah Fasilitas Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Kali	11	11	100,00%			
		Kunjungan Kerja dalam Daerah			3.750	0	0,00%			
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	8	8	100,00%			
		Pelaksanaan Reses			1.922.499	1.708.274	88,86%			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	3	100,00%			
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			350.634	151.508	43,21%			
			Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	Laporan	6	6	100,00%			
		Pengawasan Kode Etik DPRD			350.634	151.508	43,21%			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	8	6	75,00%			
		Fasilitasi Tugas DPRD			11.526.577	4.736.666	41,09%			
			Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	Dokumen	160	136	85,00%			
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			2.220.168	861.272	38,79%			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Laporan	34	16	47,06%			
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			3.066.074	1.388.216	45,28%			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	14	12	85,71%			
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			6.240.335	2.487.179	39,86%			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	112	108	96,43%			

3.1.7. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTAS E KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH					1.122.616	1.122.616	80,15%	Penyerapan anggaran pada sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Fasilitasi Pengawasan di bawah 50% karena dilakukan efisiensi anggaran.	Agar dilakukan Evaluasi atas kelemahan-kelemahan kinerja yang menyebabkan capaian masih di bawah 90% pada minggu ketiga bulan Desember 2023. Agar dipersiapkan timeline pelaksanaan kegiatan untuk kejelasan kinerja yang akan dilakukan termasuk menyesuaikan dengan PKPT APIP		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			429.349	322.851	75,20%				
				Persentase PD dengan Capaian Kinerja >90%	persen	76	76	100,00%				
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal			292.828	207.072	70,71%				
				Persentase LHP Internal Tepat Waktu	Persen	0	0	0%				
				Rasio Temuan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti	Persen	0	0	0%				
				Rasio Temuan BPKP yang selesai ditindaklanjuti	Persen	0	0	0%				
				Rasio Temuan Inspektorat Provinsi yang selesai ditindaklanjuti	Persen	0	0	0%				
				Rasio Temuan Inspektorat Daerah yang selesai ditindaklanjuti	Persen	0	0	0%				
				Persentase LHP Internal Tepat Waktu, Rasio Temuan BPK, BPKP, Inspektorat Prov dan Inspektorat Daerah yang selesai di tindaklanjuti	Persen	100	100	100,00%				
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			63.261	33.824	53,47%				
				Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Laporan	12	12	100,00%				
			Reviu Laporan Kinerja			69.036	52.020	75,35%				
				Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Laporan	15	15	100,00%				
			Reviu Laporan Keuangan			31.991	31.633	98,88%				
				Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Laporan	12	12	100,00%				
			Pengawasan Desa			64.924	35.348	54,45%				
				Jumlah laporan hasil pengawasan desa	Laporan	12	12	100,00%				
			Kerjasama Pengawasan Internal			6.400	4.210	65,78%				
				Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Kesepakatan an	2	2	100,00%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			57.218	50.036	87,45%			
				Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	12	12	100,00%			
				Jumlah Laporan MCP	Kali	4	4	100,00%			
				Jumlah Laporan Penanganan Gratifikasi dan WBS	Laporan	4	4	100,00%			
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			136.521	115.779	84,81%			
				Persentase Aduan masyarakat dan TP/TGR yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00%			
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			9.532	7.237	75,93%			
				Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	Laporan	4	4	100,00%			
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			126.989	108.542	85,47%			
				Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	24	24	100,00%			
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			693.267	576.908	83,22%			
				Persentase Elemen Kapabilitas Level 4	%	50	50	100,00%			
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			106.180	78.887	74,30%			
				Persentase elemen Kapabilitas APIP yang level 4	Persen	0	0	0%			
				Jumlah Elemen Kapabilitas APIP Level 4	Persen	50	50	100,00%			
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			96.870	75.658	78,10%			
				Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Rekomendasi	2	2	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			9.310	3.229	34,69%			
				Jumlah rekomendasi kebijakan teknis d bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	Rekomendasi	0	0	0%			
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	2	100,00%			
			Pendampingan dan Asistensi			587.087	498.021	84,83%			
				Cakupan pendampingan dan asistensi SPIP/MR	Persen	0	0	0%			
				Persentase perangkat daerah dengan nilai RB pada area pengawasan > 3	Persen	0	0	0%			
				Nilai MCP	Nilai	0	0	0%			
				Persentase ketaatan pelaporan LHKPN dan LHKASN	Persen	0	0	0%			
				Jumlah Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP>3	%	50	50	100,00%			
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			27.149	18.865	69,49%			
				Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah (SPIP)	perangkat daerah	34	34	100,00%			
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			25.964	17.061	65,71%			
				Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi (PMPRB dan Pembangunan Z1)	perangkat daerah	34	34	100,00%			
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			517.847	450.639	87,02%			
				Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	12	12	100,00%			
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			16.127	11.456	71,04%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas (LHKASN, LHKPN, SPI)	perangkat daerah	34	34	100,00%			

3.1.8. Unsur Kewilayahan

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KECAMATAN											
	KECAMATAN KALIWUNGU					1.293.519	1.293.519	96,22%	Seiring dengan bertambahnya pekerjaan berbasis IT, kebutuhan kuota internet kantor terkadang over limit yang mengakibatkan kecepatan dalam mengakses software menjadi lebih lama. direncanakan pada tahun 2024 akan diajukan penambahan kuota internet yang pada ujungnya akan meningkatkan kinerja perkantoran.	capaian kinerja sudah tergolong tinggi, tingkatkan dan pertahankan di periode anggaran berikutnya	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.180	2.924	47,31%			
				Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	indeks	84	84	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			6.180	2.924	47,31%			
				Jumlah Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	desa	15	15	100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			6.180	2.924	47,31%			
				Jumlah desa terlayani administrasi kependudukan	Desa	15	15	100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			551.993	531.745	96,33%			
				Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kali	1	1	100,00%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			551.993	531.745	96,33%			
				Jumlah fasilitasi dan pemangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan	Desa	15	15	100,00%			
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			65.040	63.755	98,02%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah pameran pembangunan yang dilaksanakan	Kali	1	1	100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			486.953	467.990	96,11%			
				Jumlah kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	kegiatan	5	4	80,00%			
				monev	desa	15	15	100,00%			
				lomba desa	desa	1	1	100,00%			
				pembinaan organisasi perempuan	organisasi	1	1	100,00%			
				pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan	organisasi	1	1	100,00%			
				pembinaan posyandu	kegiatan	1	0	0,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			70.102	69.556	99,22%			
				<i>Cakupan Kegiatan Koordinasi Trantib Umum</i>	%	100	100	100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			70.102	69.556	99,22%			
				Jumlah posko terpantau dan piket bencana alam	Posko	1	1	100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			70.102	69.556	99,22%			
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Posko	1	1	100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			118.042	117.380	99,44%			
				<i>Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan</i>	<i>persen</i>	100	100	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			118.042	117.380	99,44%			
				Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dn ketertiban umum	Desa	15	15	100,00%			
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			118.042	117.380	99,44%			
				Jumlah piket kantor	Orang	5	5	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			547.202	523.028	95,58%			
				<i>Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>	%	100	100	100,00%			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			547.202	523.028	95,58%			
				Jumlah fasilitasi desa dan koordinasi pembinaan pengawasan pemerintahan desa yang terfasilitasi	Desa	15	15	100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			17.228	20.568	119,39%			
				Jumlah evaluasi penyusunan rancangan APBDes	Kali	1	1	100,00%			
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			520.803	496.940	95,42%			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	15	15	100,00%			
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			9.171	5.520	60,19%			
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	15	15	100,00%			
	KECAMATAN KOTA KUDUS					2.331.152	2.331.152	96,95%	Kegiatan terlaksana tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan di awal perencanaan	capaian kinerja sudah mencapai 100%, pertahankan di periode anggaran berikutnya	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.805	9.114	84,36%			
				<i>Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</i>	%	100	100	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			10.805	9.114	84,36%			
				Jumlah pelayanan publik yang tersedia	Bulan	12	12	100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			10.805	9.114	84,36%			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Laporan	1	1	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kecamatan							
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			2.080.681	2.037.325	97,92%			
				Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100,00%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			430.682	408.618	94,88%			
				Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100,00%			
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			15.000	8.000	53,33%			
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	1	100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			415.682	400.618	96,38%			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	5	100,00%			
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.649.999	1.628.707	98,71%			
				Jumlah kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	kegiatan	2	2	100,00%			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.400.000	1.381.007	98,64%			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	9	9	100,00%			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			250.000	247.700	99,08%			
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4	4	100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			13.943	13.929	99,90%			
				Cakupan koordinasi trantib umum	%	100	100	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			13.943	13.929	99,90%			
				Jumlah Posko Bencana Alam	Posko	1	1	100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			13.943	13.929	99,90%			
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			51.500	51.403	99,81%			
				Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			51.500	51.403	99,81%			
				Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kegiatan	3	3	100,00%			
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			51.500	51.403	99,81%			
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	12	12	100,00%			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			174.224	148.295	85,12%			
				Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100,00%			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			174.224	148.295	85,12%			
				Jumlah Fasilitasi dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kegiatan	3	3	100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			12.939	10.476	80,97%			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	96	96	100,00%			
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			152.931	129.536	84,70%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	16	16	100,00%	Penyederhanaan Birokrasi sistem penatausahaan keuangan	sudah mendekati target 100%, pertahankan di tahun-tahun mendatang	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			8.354	8.283	99,14%			
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	100,00%			
	KELURAHAN PURWOSARI					1.014.369	1.014.369	98,30%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			884.339	870.378	98,42%			
				<i>cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (kota)</i>	%	100	100	100,00%			
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			884.339	870.378	98,42%			
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan	3	3	100,00%			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			4.000	3.993	99,81%			
				Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	Kali	1	1	100,00%			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			599.596	591.618	98,67%			
				Jumlah Rehabilitasi Jalan	Paket	3	3	100,00%			
				Jumlah Rehabilitasi Saluran dan Pembuatan Sumur Resapan	Paket	1	1	100,00%			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	4	100,00%			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			280.743	274.767	97,87%			
				Jumlah Honorarium Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Orang	1	1	100,00%			
				Jumlah Honorarium Kader Posyandu	Orang	51	51	100,00%			
				Jumlah Honorarium Tim Penggerak PKK	Orang	8	8	100,00%			
				Jumlah Kegiatan HUT Kemerdekaan RI	kegiatan	1	1	100,00%			
				Jumlah Kegiatan Pelatihan	kegiatan	2	2	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Kegiatan Program Kampung Iklim	kegiatan	1	1	100,00%			
				Jumlah Kegiatan Sosialisasi	kegiatan	2	2	100,00%			
				Jumlah Pembinaan Karangtaruna	Organisasi	1	1	100,00%			
				Jumlah PMT Posyandu Balita dan Posyandu Lansia	posyandu	18	18	100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			40.030	37.749	94,30%			
				<i>cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (kota)</i>	%	100	100	100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			40.030	37.749	94,30%			
				Jumlah Kegiatan Pembinaan KST dan Linmaas	organisasi	1	1	100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			40.030	37.749	94,30%			
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			90.000	89.027	98,92%			
				<i>cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kota)</i>	%	100	100	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			90.000	89.027	98,92%			
				Jumlah Kegiatan Pembinaan LPMK	organisasi	1	1	100,00%			
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			90.000	89.027	98,92%			
				Jumlah Kegiatan Pembinaan LPMK	Organisasi	1	1	100,00%			
				Jumlah Kegiatan Pembinaan RT/RW	Organisasi	1	1	100,00%			
				Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	12	12	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KELURAHAN SUNGGINGAN					946.972	946.972	99,07%	Ada beberapa kegiatan (Sub Kegiatan) dengan capaian 90 % s/d 95 % namun target Fisik kegiatan sudah tercapai 100 %, Namun untuk nilai total capaian kinerja rata-rata sebesar 98,7 %	tampak serapan kinerja sudah mendekati maksimal, tingkatkan dan pertahankan dan diperiode tahun berikutnya	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			821.210	814.857	99,23%			
				Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kec Kota)	%	100	100	100,00%			
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			821.210	814.857	99,23%			
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	16	16	100,00%			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3.116	3.113	99,88%			
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	10	10	100,00%			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			649.378	644.810	99,30%			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	5	100,00%			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			168.716	166.935	98,94%			
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	14	14	100,00%			
				Jumlah Honorarium TP PKK yang Dibayarkan	Orang	8	8	100,00%			
				Jumlah Honorarium Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang Dibayarkan	Orang	1	0	0,00%			
				Jumlah Honorarium Kader Posyandu yang Dibayarkan	Orang	36	36	100,00%			
				Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang Dilaksanakan	kali	4	4	100,00%			
				Jumlah Pembinaan Organisasi Perempuan yang Dilaksanakan	kali	2	2	100,00%			
				Jumlah Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang Dilaksanakan	kali	4	4	100,00%			
				Jumlah Posyandu Balita yang Dilaksanakan	Posyandu	6	6	100,00%			
				Jumlah Rapat Organisasi Kepemudaan yang Dilaksanakan	Kali	4	4	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Rapat Organisasi Perempuan yang Dilaksanakan	kali	11	11	100,00%			
				Jumlah Pelatihan-Pelatihan yang Dilaksanakan	kegiatan	3	3	100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			58.983	56.892	96,46%			
				Cakupan Kegiatan Koordinasi Trantib Umum (Kota)	%	100	100	100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			58.983	56.892	96,46%			
				Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kali	12	12	100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			58.983	56.892	96,46%			
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100,00%			
				Jumlah Honorarium FKPM, KST dan Linmas yang Dibayarkan	Orang	38	38	100,00%			
				Jumlah Pakaian Anggota Satlinmas yang disediakan	set	11	11	100,00%			
				Jumlah Rapat Koordinasi FKPM, KST dan Linmas yang Dilaksanakan	kali	12	12	100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			66.779	66.449	99,51%			
				Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kota)	%	100	99	99,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			66.779	66.449	99,51%			
				Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kali	12	12	100,00%			
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			66.779	66.449	99,51%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	12	12	100,00%	Adanya sistem pemerintahan yang selalu dinamis, banyaknya peraturan - peraturan baru, sehingga membutuhkan banyak waktu untuk mengadakan penyesuaian	capaian pagu sudah tinggi, namun capaian kinerja masih rendah,cek lagi apakah memang target kinerja tidak tercapai diatas 90%			
				Jumlah Honorarium Ketua RT, Ketua RW dan LPMK yang Dibayarkan	Orang	34	34	100,00%					
				Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	kali	8	7	87,50%					
	KELURAHAN PANJUNAN					944.655	944.655	91,30%					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			804.656	750.379	93,25%					
				<i>Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (kec. Kota)</i>	%	100	100	100,00%					
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			804.656	750.379	93,25%					
				Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah(kec.kota)	indeks	86	86	100,00%					
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			4.990	3.598	72,09%					
				Jumlah Musrenbang Kelurahan yang terlaksana	kali	1	1	100,00%					
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			623.509	596.737	95,71%					
				jumlah Rehabilitasi Drainase yang terlaksana	paket	2	2	100,00%					
				Jumlah Pengaspalan Jalan yang terlaksana	paket	1	1	100,00%					
				Jumlah Pavingisasi yang terlaksana	paket	1	1	100,00%					
				Jumlah Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang terbayarkan	orang	4	4	100,00%					
				Jumlah Tenaga Ahli Konsultasi Perencanaan yang terbayarkan	orang	4	4	100,00%					
				Jumlah Tenaga Ahli Konsultasi \Pengawasan yang terbayarkan	orang	0	0	0%					
				Jumlah Rapat Koordinasi yang terselenggara	kali	12	12	100,00%					
				Jumlah Tenaga Ahli Konsultasi Pengawasan yang terbayarkan	orang	4	4	100,00%					
				Jumlah CCTV yang tersedia	Unit	1	1	100,00%					

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			176.156	150.045	85,18%			
				Jumlah Honorarium Pengurus Tim Penggerak PKK yang terbayarkan	orang	4	4	100,00%			
				Jumlah Kegiatan Pelatihan Organisasi Perempuan yang terselenggara	kegiatan	3	3	100,00%			
				Jumlah Kegiatan Organisasi Kepemudaan yang terselenggara	kegiatan	4	4	100,00%			
				Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan yang terselenggara	kegiatan	1	1	100,00%			
				Jumlah Penyuluhan Germas yang terselenggara	kegiatan	2	2	100,00%			
				Jumlah Pembinaan Komunitas dan Pelaku Usaha Pangan Kelurahan yang terselenggara	keg	1	1	100,00%			
				Jumlah Kegiatan FKD yang terselenggara	kegiatan	2	2	100,00%			
				Jumlah Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Kelurahan yang terselenggara	kegiatan	1	1	100,00%			
				Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keamanan Pangan Kelurahan yang terselenggara	kegiatan	6	6	100,00%			
				Jumlah Pe;atihan Kader Keamanan Pangan (KKPD) Desa/Kelurahan yang terselenggara	keg	1	1	100,00%			
				Jumlah Rapat Koordinasi yang terselenggara	kali	24	20	83,33%			
				Jumlah Honorarium Modin yang terbayarkan	orang	1	1	100,00%			
				Jumlah Honorarium Instruktur senam yang terbayarkan	orang	2	2	100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			70.000	53.718	76,74%			
				Cakupan kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (kec. Kota)	%	100	100	100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			70.000	53.718	76,74%			
				Jumlah pembinaan FKPM, KST, Linmas dan PKL	kegiatan	10	10	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			70.000	53.718	76,74%			
				Jumlah penyelenggaraan kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (kec Kota) yang terlaksana	kegiatan	10	10	100,00%			
				Jumlah Honorarium FKPM, KST dan Linmas yang terbayarkan	orang	13	13	100,00%			
				Jumlah Pembinaan Bidang Perijinan yang terselenggara	kali	2	2	100,00%			
				Jumlah Pembinaan PKL yang terselenggara	kali	3	3	100,00%			
				Jumlah Sosialisasi FKUB yang terselenggara	kali	1	1	100,00%			
				Jumlah Sosialisasi Trantibmas	kali	3	3	100,00%			
				Jumlah Rapat Koordinasi yang terselenggara	kali	24	24	100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			70.000	58.395	83,42%			
				Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kota)	%	100	100	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			70.000	58.395	83,42%			
				Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan yang terlaksana	kegiatan	12	12	100,00%			
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			70.000	58.395	83,42%			
				jumlah penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan umum yang terlaksana	kegiatan	17	14	82,35%			
				Jumlah Rapat Koordinasi yang terselenggara	kali	5	5	100,00%			
				Jumlah Pembinaan RT/RW yang terselenggara	kegiatan	3	3	100,00%			
				Jumlah Sosialisasi Bidang Aset Daerah yang terselenggara	kegiatan	2	2	100,00%			
				Jumlah Sosialisasi Bidang Kependudukan yang terselenggara	kegiatan	3	3	100,00%			
				Jumlah Sosialisasi Bidang Pertanahan yang	kegiatan	2	2	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				terselenggara							
	KELURAHAN WERGU WETAN					996.705	996.705	97,30%	Beberapa kegiatan (4 Sub Kegiatan) dengan capaian 90 % s/d 95 % namun target Fisik kegiatan sudah tercapai 100 %, Namun Secara Umum capaian kinerja Rata-rata sebesar 97,52 %	capaian sudah termasuk tinggi, mendekati 100%, pertahkan di periode anggaran berikutnya	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			863.007	842.588	97,63%			
				<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah(kec.kota)</i>	<i>Indeks</i>	85	86,35	101,59%			
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			863.007	842.588	97,63%			
				Jumlah penyelenggaraan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kec. Kota)	kegiatan	8	8	100,00%			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			5.000	4.824	96,48%			
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	6	6	100,00%			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			728.135	720.559	98,96%			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	5	100,00%			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			129.872	117.205	90,25%			
				Jumlah Honorarium KPM	Orang	1	1	100,00%			
				Jumlah Honorarium Tim PKK	Orang	10	10	100,00%			
				Jumlah Posyandu yang Terlaksana	Unit	5	5	100,00%			
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2	2	100,00%			
				Jumlah Honorarium Modin	Orang	2	2	100,00%			
				Jaringan Sambungan Listrik Bangunan Bank Sampah	Paket	1	1	100,00%			
				Meja Kerja Bangunan Bank Sampah	Unit	1	1	100,00%			
				Kursi Rapat Bangunan Bank Sampah	Unit	3	3	100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			42.139	42.139	100,00%			
				<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat</i>	<i>Indeks</i>	85	86,35	101,59%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<i>daerah(kec.kota)</i>							
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			42.139	42.139	100,00%			
			Jumlah koordinasi dan penyelenggaraan Trantibum	Laporan		10	10	100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			42.139	42.139	100,00%			
			Jumlah Pembinaan FKPM, KST dan Linmas yang Dilaksanakan	Kali		10	10	100,00%			
			Jumlah Honorarium FKPM, KST dan Linmas yang Dibayarkan	Orang		41	41	100,00%			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		10	10	100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			91.558	85.068	92,91%			
			Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (kec kota)	Indeks		85	86,35	101,59%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			91.558	85.068	92,91%			
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		7	7	100,00%			
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			91.558	85.068	92,91%			
			Jumlah Banner Monografi	Set		1	1	100,00%			
			Jumlah Cetak Buku Profil	Buku		6	6	100,00%			
			Jumlah LPMK yang terbina	Organisasi		1	1	100,00%			
			Jumlah RT/RW yang terbina	Orang		28	28	100,00%			
			Petugas Input / Entry Data	Orang		30	30	100,00%			
			Rambu Papan Tambahan (Nama Jalan)	Buah		30	30	100,00%			
			Tenaga pencacah Lapangan / survey / Sensus	Dokumen		5500	5500	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	7	7	100,00%			
	KELURAHAN WERGU KULON					1.041.036	1.041.036	97,43%	Ada beberapa belanja yang tidak terealisasi keuangannya sesuai target karena : 1. realisasi harga yang lebih rendah dari indeks harga yang tersedia 2. pekerjaan kontruksi keuangannya tidak sesuai target karena ada penawaran harga	tampak serapan sudah tergolong tinggi, untuk tahun selanjutnya diharapkan dapat lebih dari tahun ini	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			892.065	866.659	97,15%			
			<i>Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kec Kota)</i>	%		100	91,65	91,65%			
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			892.065	866.659	97,15%			
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan		21	21	100,00%			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3.075	3.070	99,85%			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga		10	10	100,00%			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			681.531	665.023	97,58%			
			Jumlah CCTV yang Disediakan	Buah		6	6	100,00%			
			Jumlah Cermin Tikungan Cembung yang Disediakan	Buah		5	5	100,00%			
			Jumlah Papan Nama Jalan yang Disediakan	Buah		40	40	100,00%			
			Jumlah Rehabilitasi Jalan (Paving) yang Dilaksanakan	Kegiatan		1	1	100,00%			
			Jumlah Rehabilitasi Saluran yang Dilaksanakan	Kegiatan		1	1	100,00%			
			Jumlah Tempat Sampah yang Disediakan	Buah		10	10	100,00%			
			Jumlah Rehabilitasi Saluran/Sumur Resapan yang Dilaksanakan	Kegiatan		1	1	100,00%			
			Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pengaspalan) yang dilaksanakan	Kegiatan		1	1	100,00%			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		64	64	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pengaspalan) yang dilaksanakan Jl. Tutut dan Jl. Al Bayan	Kegiatan	1	1	100,00%			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			207.459	198.566	95,71%			
				Jumlah Honorarium TP PKK yang Dibayarkan	Orang	10	10	100,00%			
				Jumlah Honorarium Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang Dibayarkan	Orang	1	1	100,00%			
				Jumlah Honorarium Kader Posyandu yang Dibayarkan	Orang	20	20	100,00%			
				Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang Dilaksanakan	Kegiatan	1	1	100,00%			
				Jumlah Pembinaan Organisasi Perempuan yang Dilaksanakan	Kegiatan	1	1	100,00%			
				Rapat Kader Posyandu Balita	Kali	8	8	100,00%			
				Jumlah Posyandu Balita yang Dilaksanakan	Kegiatan	10	10	100,00%			
				Jumlah Posyandu Lansia yang Dilaksanakan	Kegiatan	10	10	100,00%			
				Jumlah Rapat Organisasi Kepemudaan yang Dilaksanakan	Kegiatan	2	2	100,00%			
				Jumlah Rapat Organisasi Perempuan yang Dilaksanakan	Kegiatan	11	11	100,00%			
				Jumlah Seragam Karang Taruna yang Disediakan	Stel	40	40	100,00%			
				Jumlah Pelatihan-Pelatihan yang Dilaksanakan	Kegiatan	2	2	100,00%			
				Rapat Kader Posyandu Lansia	Kali	8	8	100,00%			
				Jumlah Honorarium Modin	Orang	1	1	100,00%			
				PMT Balita KEP 1 Orang Anak yang dilaksanakan	Kegiatan	6	6	100,00%			
				Jumlah Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang Dilaksanakan	Kali	4	4	100,00%			
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	14	14	100,00%			
				Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan	1	1	100,00%			
				Jumlah Kegiatan Pelatihan Bagi Kelompok Proklm	Kegiatan	1	1	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			80.288	80.280	99,99%			
				<i>cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (kota)</i>	%	100	100	100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			80.288	80.280	99,99%			
				Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kali	12	12	100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			80.288	80.280	99,99%			
				Jumlah Honorarium FKPM, KST dan Linmas yang Dibayarkan	Orang	39	39	100,00%			
				Jumlah Pembinaan FKPM, KST dan Linmas yang Dilaksanakan	Kali	1	1	100,00%			
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			68.683	67.364	98,08%			
				<i>cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kota)</i>	%	100	100	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			68.683	67.364	98,08%			
				Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kali	12	12	100,00%			
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			68.683	67.364	98,08%			
				Jumlah Honorarium Ketua RT, Ketua RW dan LPMK yang Dibayarkan	Orang	38	38	100,00%			
				Jumlah Pembinaan RT, RW dan LPMK yang Dilaksanakan	Kali	1	1	100,00%			
				Jumlah Rapat RT, RW dan LPMK yang Dilaksanakan	kali	2	2	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Pendataan Profil Kelurahan yang Dilaksanakan	Kegiatan	1	1	100,00%	1. Pergantian Pemimpin di Triwulan IV sehingga ada kegiatan yang terbentur waktu pelaksanaannya; 2. Ada beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan;	tampak serapan besar pagunya daripada kinerjanya, ting dicek lagi , dan tingkatkan serapan pada periode tahun selanjutnya	
				Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	12	12	100,00%			
	KELURAHAN MLATI KIDUL					716.487	716.487	94,59%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			611.127	591.572	96,80%			
				Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (kota)	%	100	96,49	96,49%			
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			611.127	591.572	96,80%			
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	13	12	92,31%			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			5.011	4.858	96,95%			
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	10	10	100,00%			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			399.856	395.681	98,96%			
				Jumlah Tiang Lampu Penerangan Jalan yang disediakan	Unit	393	0	0,00%			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			206.260	191.034	92,62%			
				Jumlah Honorarium Kader Posyandu yang Dibayarkan	Orang	20	20	100,00%			
				Jumlah Honorarium Petugas KPM yang Dibayarkan	Orang	1	1	100,00%			
				Jumlah Honorarium TP PKK yang Dibayarkan	Orang	15	15	100,00%			
				Jumlah Kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan	Kegiatan	4	3	75,00%			
				Jumlah Perayaan Kegiatan Budaya Keagamaan Haul Raden Ayu Mlati yang dilaksanakan	Paket	1	1	100,00%			
				Jumlah PMT Posyandu Balita	Posyandu	4	4	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2	2	100,00%			
				Jumlah Honorarium Modin yang dibayarkan	Orang	4	1	25,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			40.000	38.856	97,14%			
				<i>Cakupan Kegiatan Koordinasi trantib umum (kota)</i>	%	100	100	100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			40.000	38.856	97,14%			
				Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	Kegiatan	3	3	100,00%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		40.000	38.856	97,14%			
				Jumlah Honorarium FKPM, KST dan Linmas yang Dibayarkan	Orang	17	17	100,00%			
				Jumlah Pembinaan FKPM, KST dan Linmas yang Dilaksanakan	Organisasi	2	2	100,00%			
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			65.360	47.310	72,38%			
				<i>Cakupan Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (Kec Kota)</i>	%	100	72,38	72,38%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			65.360	47.310	72,38%			
				Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	5	3	60,00%			
				Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		65.360	47.310	72,38%			
				Jumlah Honorarium Ketua RT/RW dan Ketua LPMK yang dibayarkan	Orang	23	23	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Rapat dan Pembinaan RT/RW dan LPMK yang dilaksanakan	Organisasi	1	1	100,00%	Perencanaan suatu kegiatan serta pelaksanaan dan penetapan jadwal waktu pelaksanaan yang kurang tepat adalah merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan .	capaian sudah relatif tinggi namun masih bisa ditingkatkan lagi, tingkatkan di periode tahun selanjutnya	
				Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	12	12	100,00%			
				Jumlah Pendataan Profil Kelurahan yang dilaksanakan	Kegiatan	2	0	0,00%			
	KELURAHAN MLATINOROWITO					1.253.498	1.253.498	95,95%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.118.364	1.072.418	95,89%			
				<i>Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kec Kota)</i>	%	100	100	100,00%			
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.118.364	1.072.418	95,89%			
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	22	22	100,00%			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3.000	2.376	79,21%			
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	10	10	100,00%			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			932.254	923.704	99,08%			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	3	100,00%			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			183.110	146.338	79,92%			
				Jumlah Honorarium Kader Posyandu	orang	50	50	100,00%			
				Jumlah Honorarium KPM	orang	1	0	0,00%			
				Jumlah Honorarium TP PKK	orang	8	8	100,00%			
				Jumlah Pelatihan-Pelatihan	Kegiatan	3	3	100,00%			
				Jumlah Pembinaan Kepemudaan	Kali	2	2	100,00%			
				Jumlah Pembinaan organisasi perempuan	Kali	2	2	100,00%			
				Posyandu Balita	kali	8	8	100,00%			
				Posyandu Lansia	kali	8	8	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	9	9	100,00%			
				Jumlah Honorarium Modin	Orang	2	2	100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			61.640	59.584	96,66%			
				Cakupan Kegiatan Koordinasi Trantib Umum (Kota)	%	100	100	100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			61.640	59.584	96,66%			
				Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kali	12	12	100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			61.640	59.584	96,66%			
				Jumlah Honor KST	orang	9	9	100,00%			
				Jumlah Kegiatan Pembinaan Trantib	Kali	1	1	100,00%			
				Jumlah Rakor Trantib	kali	1	1	100,00%			
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			73.495	70.695	96,19%			
				Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kota)	%	100	96,19	96,19%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			73.495	70.695	96,19%			
				Jumlah Pembinaan / Honorarium RT/RW?LPMK	Orang	15	15	100,00%			
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			73.495	70.695	96,19%			
				Honorarium Ketua RT dan Ketua RW	Orang	42	42	100,00%			
				Jumlah Pembinaan RT/RW yang dilaksanakan	Kali	1	1	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	12	12	100,00%			
	KELURAHAN KERJASAN					932.153	932.153	99,35%	1.Laporan realisasi anggaran/keuangan masih input karena belum terintegrasinya SIMDAFMIS dan SIPEPAK	capaian sudah relatif tinggi, pertahankan di tahun-tahun mendatang	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			621.195	615.358	99,06%			
				Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kec Kota)	%	100	100	100,00%			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		621.195	615.358	99,06%			
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	26	26	100,00%			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		5.000	5.000	100,00%			
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	Lembaga	10	10	100,00%			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			342.256	336.999	98,46%			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	20	0	0,00%			
				Jumlah peralatan/material jambanisasi yang diserahkan	unit	6	0	0,00%			
				Jumlah peralatan KUBE yang diserahkan	unit	3	0	0,00%			
				Jumlah sumur peresapan air hujan yang terlaksana	unit	10	10	100,00%			
				Jmlah cermin tikung yang terlaksana	unit	10	10	100,00%			
				Jumlah penataan lingkungan kawasan wisata Menara Kudus	Paket	1	1	100,00%			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			273.939	273.359	99,79%			
				Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana	kegiatan	2	2	100,00%			
				Jumlah kegiatan pembinaan organisasi perempuan	kegiatan	5	5	100,00%			
				Jumlah kegiatan pembinaan organisasi pemuda	kegiatan	5	5	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah kegiatan pembedayaan masyarakat	organisasi	2	2	100,00%			
				Jumlah sarasehan nilai kepahlawanan yang terlaksana	kegiatan	1	1	100,00%			
				Jumlah pelatihan life skill	organisasi	2	2	100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			66.628	66.620	99,99%			
				<i>cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (kota)</i>	%	100	100	100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			66.628	66.620	99,99%			
				Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kali	12	12	100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			66.628	66.620	99,99%			
				Jumlah pembinaan FKPM, KST dan Linmas	organisasi	3	3	100,00%			
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			244.330	244.126	99,92%			
				<i>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kota)</i>	%	100	100	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			244.330	244.126	99,92%			
				Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kali	12	12	100,00%			
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			175.000	174.796	99,88%			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	50	50	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			69.330	69.330	100,00%	Ada beberapa kegiatan capaian keuangannya dibawah 100 % kaena adanya sisa kontrak namum kegiatan Fisik terlaksana 100%	capaian kinerja sudah tergolong tinggi, tingkatkan dan pertahankan di periode anggaran berikutnya			
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	3	3	100,00%						
			Jumlah Honorarium Ketua RT, Ketua RW dan LPMK yang Dibayarkan	Orang	11	11	100,00%						
			Jumlah Pembinaan RT, RW dan LPMK yang Dilaksanakan	Kali	3	3	100,00%						
	KELURAHAN KAJEKSAN					991.370	991.370	98,61%					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			891.370	880.077	98,73%					
			<i>Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan</i>	%		100	100	100,00%					
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			891.370	880.077	98,73%					
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	kegiatan		21	21	100,00%					
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3.120	3.120	100,00%					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	10	10	100,00%						
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			752.079	744.511	98,99%					
			Jumlah Sarana dan Prasarana atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Paket	4	4	100,00%						
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			136.171	132.447	97,26%					
			Jumlah Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jenis	4	4	100,00%						
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2	2	100,00%						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			50.000	47.755	95,51%					

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Cakupan kegiatan koordinasi Tramtibum	%	100	100	100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			50.000	47.755	95,51%			
			Jumlah pembinaan / honorarium untuk FKPM, KST dan Linmas	Orang		29	29	100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			50.000	47.755	95,51%			
			Jumlah Pembinaan dan Honorarium KST, Linmas dan FKPM	Orang		29	29	100,00%			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		1	1	100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			50.000	49.775	99,55%			
			Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kota)	%		100	100	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			50.000	49.775	99,55%			
			Jumlah Pembinaan dan Honorarium Untuk RT/RW/LPMK	Orang		15	15	100,00%			
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			50.000	49.775	99,55%			
			Jumlah Pembinaan dan Honorarium RT/RW/LPMK	Orang		15	15	100,00%			
	KECAMATAN JATI					997.338	997.338	97,67%	Kegiatan terlaksana tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan diawal perencanaan	capaian sudah tinggi, pertahankan diperiode tahun selanjutnya	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			152.381	149.963	98,41%			
			Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%		100	100	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			152.381	149.963	98,41%			
			Jumlah fasilitasi dan dan penyelenggaraan pelayanan umum	desa		14	14	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			152.381	149.963	98,41%			
				persentasi pelayanan kepada masyarakat sesuai standard	kali	1	1	100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			449.656	433.463	96,40%			
				Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	%	100	100	100,00%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			449.656	433.463	96,40%			
				Jumlah fasilitasi ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan yg dilaksanakan	kegiatan	3	3	100,00%			
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			110.262	108.072	98,01%			
				jumlah pameran pembangunan yg dilaksanakan	kegiatan	1	1	100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			339.394	325.391	95,87%			
				jumlah desa yang mengikuti lomba desa, pembinaan organisasi perempuan, pembinaan organisasi pemuda	kegiatan	4	4	100,00%			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			33.000	32.988	99,96%			
				Cakupan Kegiatan Koordinasi Trantibum	%	100	100	100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			33.000	32.988	99,96%			
				jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yg terlaksana	posko	1	1	100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			33.000	32.988	99,96%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Presentase bencana di desa tertangani	persen	100	100	100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			124.511	124.474	99,97%			
				Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			124.511	124.474	99,97%			
				Jumlah urusan penyelenggaraan pemerintahan umum	desa	14	14	100,00%			
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			124.511	124.474	99,97%			
				Persentasi penurunan pelanggaran hukum di Kecamatan	persen	100	100	100,00%			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			237.790	233.181	98,06%			
				Cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100,00%			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			237.790	233.181	98,06%			
				Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Pemdes yg terfasilitasi	desa	14	14	100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			28.416	26.407	92,93%			
				jumlah RAPBdes terevaluasi	desa	14	14	100,00%			
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			201.442	198.893	98,73%			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	14	14	100,00%			
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			7.931	7.881	99,37%			
				jumlah musrenbang tingkat Kecamatan	kali	1	1	100,00%			
	KECAMATAN UNDAAN					1.128.662	1.128.662	93,13%	Kegiatan terlaksana tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan	hasil sudah maksimal, pertahankan di periode tahun selanjutnya	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.000	6.103	87,19%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<i>cakupan penyelenggaraan pemerintahan</i>	%	100	100	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			7.000	6.103	87,19%			
				Jumlah fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	Desa	16	16	100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			7.000	6.103	87,19%			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			497.099	476.764	95,91%			
				<i>cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (kec undaan)</i>	%	100	100	100,00%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			497.099	476.764	95,91%			
				Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	desa	16	16	100,00%			
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			12.000	6.826	56,88%			
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	1	100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			485.100	469.938	96,87%			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	7	7	100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			39.450	38.840	98,45%			
				<i>cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (kec undaan)</i>	%	100	100	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			39.450	38.840	98,45%			
				Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	desa	16	16	100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			39.450	38.840	98,45%			
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2	100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			80.900	79.467	98,23%			
				cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (undaan)	%	100	100	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			80.900	79.467	98,23%			
				jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	desa	16	16	100,00%			
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			80.900	79.467	98,23%			
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	4	4	100,00%			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			504.213	449.929	89,23%			
				Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa(undaan)	%	100	100	100,00%			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			504.213	449.929	89,23%			
				cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Desa	16	16	100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			7.956	7.691	96,67%			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	16	16	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			489.076	436.195	89,19%	Fungsi Kecamatan sebagai Fasilitas menjadi penyebab tidak terserapnya anggaran secara maksimal karena tergantung dengan OPD Pengampu kegiatan.	capaian kinerja sudah tergolong tinggi, tingkatkan dan pertahankan di periode anggaran berikutnya	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	4	4	100,00%			
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			7.181	6.043	84,15%			
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	100,00%			
	KECAMATAN MEJOBLO					785.054	785.054	86,97%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.272	11.379	92,72%			
				<i>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Mejolo)</i>	%	100	100	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			12.272	11.379	92,72%			
				Jumlah Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	layanan	6	6	100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12.272	11.379	92,72%			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	3	100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			308.992	288.968	93,52%			
				<i>Cakupan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan</i>	%	100	100	100,00%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			308.992	288.968	93,52%			
				Jumlah Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa Yang terlaksana	Kegiatan	5	5	100,00%			
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			14.177	7.951	56,08%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	1	100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			294.815	281.017	95,32%			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			23.250	23.023	99,02%			
				<i>Cakupan kegiatan Koordinasi Trantib Umum</i>	%	100	100	100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			23.250	23.023	99,02%			
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2	100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			23.250	23.023	99,02%			
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2	100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			46.320	46.200	99,74%			
				<i>Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</i>	%	100	100	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			46.320	46.200	99,74%			
				Jumlah laporan kasus yang ditangani sesuai ketentuan	Kasus	5	2	40,00%			
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			46.320	46.200	99,74%			
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	5	5	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			394.220	313.226	79,45%				
				<i>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	%	100	100	100,00%				
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			394.220	313.226	79,45%				
				Jumlah Dokumen yang terfasilitasi sesuai standar	Dokumen	11	11	100,00%				
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			10.000	2.159	21,59%				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	44	44	100,00%				
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			375.734	303.191	80,69%				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2	2	100,00%				
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			8.486	7.876	92,81%				
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	100,00%				
	KECAMATAN JEKULO					912.871	912.871		Fungsi Kecamatan sebagai Fasilitasi menyebabkan sebagian Sub Kegiatan dalam capaian kinerja dan serapan anggaran tergantung dengan OPD Lain	tampak realisasi sudah termasuk tinggi, tingkatkan capaian di tahun-tahun mendatang		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			17.017	14.564	85,59%				
				<i>Cakupan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Jekulo</i>	%	100	100	100,00%				
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			17.017	14.564	85,59%				
				Rakor Administrasi Kependudukan, sosialisasi Kependudukan dan Sosialisasi FKP	Kegiatan	3	3	100,00%				
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			17.017	14.564	85,59%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	laporan	4	4	100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			293.627	279.991	95,36%			
				<i>Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan</i>	%	100	100	100,00%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			293.627	279.991	95,36%			
				Jumlah Money Pelaporan Dana Desa, Jumlah Pameran Pembangunan, Pembinaan Lomba Desa, Pembinaan Organisasi Perempuan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	keg	5	5	100,00%			
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		8.500	4.000	47,06%			
				Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	dokumen	1	1	100,00%			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		285.127	275.991	96,80%			
				Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	laporan	6	6	100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			29.381	29.248	99,55%			
				<i>Cakupan Kegiatan Koordinasi Trantib Umum Kec. Jekulo</i>	%	100	100	100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			29.381	29.248	99,55%			
				Jumlah Piket Bencana alam	Hari	20	20	100,00%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		29.381	29.248	99,55%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			59.624	57.727	96,82%			
			Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		%	100	100	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			59.624	57.727	96,82%			
				ajumlah laporan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Lpaoran	12	12	100,00%			
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			59.624	57.727	96,82%			
				Jumlah laporan konflik sosial yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	laporan	12	12	100,00%			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			513.222	473.584	92,28%			
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100,00%			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			513.222	473.584	92,28%			
				Jumlah Evaluasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes, Monev dan pelaksanaan Musrenbang Tk. Kecamatan	keg	3	3	100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			11.000	9.257	84,15%			
				Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	dokumen	48	48	100,00%			
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			492.397	455.003	92,41%			
				Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	dokumen	12	12	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			9.825	9.324	94,90%			
				Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dokumen	1	1	100,00%			
	KECAMATAN BAE					578.196	578.196	91,21%	Kegiatan terlaksana tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan	capaian kinerja sudah tergolong tinggi, tingkatkan dan pertahankan di periode anggaran berikutnya	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.190	10.802	76,12%			
				<i>Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Kec. Bae)</i>	<i>Indeks</i>	85	90,01	105,89%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			14.190	10.802	76,12%			
				Jumlah pelaksanaan rakor pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan	kegiatan	1	1	100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			14.190	10.802	76,12%			
				jumlah pelaksanaan rakor pelayanan administrasi kependudukan	kegiatan	2	2	100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			303.543	287.633	94,76%			
				<i>Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Bae)</i>	%	100	90,01	90,01%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			303.543	287.633	94,76%			
				Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa dan	%	100	100	100,00%			
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			6.060	5.236	86,41%			
				Terfasilitasinya kegiatan pameran UMKM	kegiatan	1	1	100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			297.484	282.397	94,93%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	laporan	6	6	100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			43.055	41.738	96,94%			
				Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Bae)	%	100	90,01	90,01%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			43.055	41.738	96,94%			
				Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Bae)	%	100	100	100,00%			
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			43.055	41.738	96,94%			
				jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan	kegiatan	3	3	100,00%			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			217.407	187.228	86,12%			
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bae)	%	100	90,01	90,01%			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			217.407	187.228	86,12%			
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bae)	%	100	100	100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			4.000	3.780	94,50%			
				jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen	30	30	100,00%			
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			203.408	174.868	85,97%			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	20	20	100,00%			
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			9.999	8.580	85,81%			
				jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dokumen	20	20	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN GEBOG					630.758	630.758	96,47%	Kegiatan terlaksana tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan	capaian sudah 100%, pertahankan di tahun-tahun mendatang agar hasil maksimal	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.000	6.840	97,71%			
				Cakupan Fasilitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	desa	11	11	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			7.000	6.840	97,71%			
				Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan umum	desa	11	11	100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			7.000	6.840	97,71%			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	11	11	100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			305.221	295.736	96,89%			
				Cakupan fasilitas dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	desa	11	11	100,00%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			305.221	295.736	96,89%			
				Jumlah Fasilitas ekonomi dan Pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan	desa	11	11	100,00%			
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			11.936	11.887	99,59%			
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	1	100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			293.285	283.849	96,78%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5.500	4.775	86,82%			
				<i>Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>	desa	11	11	100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			5.500	4.775	86,82%			
				Jumlah Posko pemantauan piket bencana alam dan Jumlah Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	desa	11	11	100,00%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		5.500	4.775	86,82%			
				Jumlah Posko yang terpantau dan Piket bencana alam	posko	3	3	100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			46.310	45.659	98,59%			
				<i>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</i>	desa	11	11	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			46.310	45.659	98,59%			
				jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	desa	11	11	100,00%			
				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		46.310	45.659	98,59%			
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	11	11	100,00%			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			266.727	255.475	95,78%			
				<i>cakupan kegiatan desa yang terbina</i>	desa	11	11	100,00%			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			266.727	255.475	95,78%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa yang terfasilitasi	desa	11	11	100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			10.000	6.904	69,04%			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	11	11	100,00%			
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			246.727	238.981	96,86%			
				Jumlah money dan pelaporan bidang pemerintahan desa yang terlaksana dan Jumlah pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	desa	11	11	100,00%			
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			10.000	9.590	95,90%			
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	100,00%			
	KECAMATAN DAWE					1.209.879	1.209.879	96,13%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.900	9.800	98,99%			
				Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	98,99	98,99%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			9.900	9.800	98,99%			
				Jumlah Pelaksanaan Rakor Pelayanan Administrasi Kependudukan	kegiatan	2	2	100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			9.900	9.800	98,99%			
				Jumlah pelaksanaan Rakor Pelayanan Administrasi Kependudukan	kali	2	2	100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			519.232	495.480	95,43%			
				Cakupan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat	%	100	91,78	91,78%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<i>Desa Dan kelurahan</i>							
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			519.232	495.480	95,43%			
				Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	kali	1	1	100,00%			
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			17.668	13.959	79,01%			
				Jumlah Pameran Pembangunan yang dilaksanakan	kali	1	1	100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			501.563	481.521	96,00%			
				JUmlah Desa ang mengikuti lomba	desa	1	1	100,00%			
				Jumlah Organisasi Kepemudaan yang melaksanakan pembinaan	organisasi	1	1	100,00%			
				Jumlah Organisasi perempuan ang melaksanakan pembinaan	organisasi	1	1	100,00%			
				Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosial	kali	1	1	100,00%			
				JUmlah pelaksanaan monev dan pelaporan dana desa	desa	18	18	100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			11.075	11.003	99,35%			
				1 Posko	posko	1	1	100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			11.075	11.003	99,35%			
				Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	posko	1	1	100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			11.075	11.003	99,35%			
				Jumlah Posko terpantau dan piket bencana alam	posko	1	1	100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			64.534	63.323	98,12%			
				Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	92,3	92,30%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			64.534	63.323	98,12%			
				Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	bulan	12	12	100,00%			
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			64.534	63.323	98,12%			
				Honorarium Linmas	bulan	12	0	0,00%			
				Honorarium piket kantor	bulan	12	12	100,00%			
				Honor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	bulan	12	0	0,00%			
				Jumlah kasus Konflik Sosial yang tertangani	kasus	12	0	0,00%			
				Rakor Linmas	kali	12	12	100,00%			
				Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	kali	12	12	100,00%			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			605.139	583.491	96,42%			
				Jumlah Rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	desa	18	18	100,00%			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			605.139	583.491	96,42%			
				Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa yang terlaksana	desa	18	18	100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			10.300	9.771	94,87%			
				Evaluasi penusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes	Desa	18	18	100,00%			
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			586.659	566.916	96,63%			
				Monev dan pelaporan bidang pemerintah desa	desa	18	18	100,00%			
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			8.180	6.804	83,18%			
				Jumlah Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	kali	1	1	100,00%			

3.1.9. Unsur Pemerintahan Umum

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTAS E KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					24.816.506	24.816.506	97,98%	Serapan pada kegiatan fasilitasi permasalahan kurang, karena penyelesaian permasalahan sering harus dilaksanakan mendadak dan diluar ruangan, serapan untuk perjalanan dinas dalam daerah juga kurang karena antara besaran yang diterima dengan syarat administrasi yang harus dipenuhi justru dinilai menghambat pelaksanaan tugas yang harus dengan segera dan cepat dilaksanakan dan diselesaikan.	Agar target program/ kegiatan/ sub kegiatan juga disesuaikan. Perlu dilaksanakan upaya untuk mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah.	
			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			2.719.577	2.495.816	91,77%			
				Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani	%	100	100	100,00%			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			2.719.577	2.495.816	91,77%			
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen	8	8	100,00%			
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			2.719.577	2.495.816	91,77%			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	990	990	100,00%			
			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			20.981.524	20.757.872	98,93%			
				Persentase pendidikan politik masyarakat	%	100	100	100,00%			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			20.981.524	20.757.872	98,93%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen	17	17	100,00%			
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
				Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Dae	Dokumen	10	10	100,00%			
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			17.100.000	17.100.000	100,00%			
				Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Di	Dokumen	2	2	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			1.525.489	1.301.837	85,34%			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Po	Orang	3260	3260	100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			247.139	225.356	91,19%			
				<i>Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif</i>	%	100	100	100,00%			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			247.139	225.356	91,19%			
				Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	13	10	76,92%			
			Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			247.139	225.356	91,19%			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang	610	491	80,49%			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			436.464	413.860	94,82%			
				<i>Persentase potensi konflik SARA yang tertangani</i>	%	100	100	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			436.464	413.860	94,82%			
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen	20	20	100,00%			
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			436.464	413.860	94,82%			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	1124	974	86,65%			
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			431.802	421.313	97,57%			
				<i>Persentase potensi konflik sosial yang tertangan</i>	%	100	100	100,00%			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			431.802	421.313	97,57%			
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen	28	28	100,00%			
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			288.402	277.913	96,36%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN / TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTAS E KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Orang	1080	1012	93,70%			
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			143.400	143.400	100,00%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	100,00%			

3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan Strategis yang diambil meliputi pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus yang dituangkan baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati maupun tindakan yang diambil oleh Bupati Kudus dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kudus	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi dan daerah Kab/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	- Tindak Lanjut dari rekomendasi Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah tentang Berita Acara Fasilitasi Pembahasan Ranperda Perubahan SOTK - Penyesuaian dan penataan SOT BKPP menjadi BKPSDM sesuai Permendagri Nomor 5 Tahun 2017
2.	Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/228/2023 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023-2024	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024	Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian pelaksanaan RB
3.	Penegakan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.	UU 23 Tahun 2014 Permendagri 90 Tahun 2019 Permendagri 26 Tahun 2020	Mengurangi Gangguan Tibum Tranmas Di Kabupaten/ Kota

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
4.	Pelaksanaan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Standarisasi Penanganan dan Penyelamatan Kebakaran di Kabupaten/Kota.	Permendagri 114 Tahun 2018 Permendagri 16 Tahun 2020	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
5.	Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor : 620/242/2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten Di Kabupaten Kudus	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 233)	Menetapkan Keputusan Bupati Kudus Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten Di Kabupaten Kudus
6.	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kudus.	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;	1. Masa berlaku KTP berlaku seumur hidup; 2. Pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya (GRATIS).
7.	Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Kudus.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Kudus.	1. Penerbitan data kependudukan secara cepat, mudah, gratis dan terukur sesuai ketentuan perundang-undangan; 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan adm kependudukan secara daring di Kab. Kudus.
8.	Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kudus tahun 2022 - 2025	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012	Tujuan: Untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas bagi pengembangan Penanaman Modal di Daerah.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
9.	Standar operasional prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus	Keputusan Bupati Kudus Nomor 067.1/385/2021 tanggal 15 September 2021	Tujuan: Sebagai pedoman pelaksanaan tugas berupa petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
10.	Standar Pelayanan (SP) Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus	Keputusan Bupati Kudus Nomor: 067/384/2021 tanggal 15 September 2021	Tujuan: Sebagai pedoman dan acuan yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus dalam melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan.
11.	Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Sentra Industri Kerajinan Rumah Adat Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359); - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36); - Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 45); 	Tujuan : Memadukan Pembangunan antar Desa untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa, melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Percepatan Pembangunan Berbasis Kewilayahan; - Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan melalui Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan dan BUMDes Bersama; - Pengembangan Kapasitas dan Kemitraan di Kawasan Perdesaan; - Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; - Bantuan Keuangan kepada Pemdes untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			<p>Masalah yang diselesaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keberlanjutan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam rangka Penguatan Ekonomi Berbasis Kewilayahan dan upaya Penanggulangan Kemiskinan; - Sinkronisasi program/kegiatan dari seluruh OPD Kabupaten Kudus dan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan; - Komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan; - Adanya kemitraan dengan pihak Ketiga/Swasta/Perguruan Tinggi dengan Pelaku di Kawasan Perdesaan guna mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perdesaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. 3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten / Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2. Meningkatnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat. 3. Meningkatnya pengunjung perpustakaan per tahun 4. Meningkatnya koleksi bahan pustaka 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai jenis perpustakaan
13.	Meningkatnya tertib arsip perangkat daerah	1. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip di Kabupaten Kudus	1. Sebagai pedoman bagi pencipta arsip dalam melaksanakan pemberkasan dan penyimpanan Arsip Aktif, penataan dan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2022 tentang tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	<p>penyimpanan Arsip Inaktif, serta alih media Arsip.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan petunjuk /pedoman bagi Perangkat Daerah/BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus 3. Sebagai pedoman bagi Pencipta Arsip dalam melaksanakan kegiatan penyusutan arsip 4. Sebagai pedoman penyusutan arsip (meliputi pemindahan arsip dinamis in aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis dari Perangkat Daerah ke Dinas Kearsipan selaku LKD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
14.	Tersalurkannya Hibah Uang untuk Bantuan Modal Usaha kepada Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/1087/16.00/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah Uang untuk Bantuan Modal Usaha kepada Wirausaha yang dialokasikan dalam APBD Kab. Kudus Tahun 2023 pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus (Tahap 1 tersalurkan sebanyak 350 pelaku UMKM) - Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/303/2023 tanggal 05 Desember 2023 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah Uang untuk Bantuan 	Sebagai stimulus yang diberikan kepada UMKM untuk mendukung pengembangan dan peningkatan daya saing usaha UMKM agar terus berkembang sebagai usaha ekonomi produktif di Kabupaten Kudus.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		<p>Modal Usaha kepada Wirausaha yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus (Tahap 2 tersalurkan sebanyak 350 pelaku UMKM)</p>	
15.	Penerapan Manajemen Talenta	<p>Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</p>	<p>Sebagai salah satu syarat terwujudnya pelaksanaan sistem merit, manajemen talenta PNS bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan kesempatan yang sama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mengembangkan karier berdasarkan pola karir, kinerja dan kompetensi sesuai core bisnis masing-masing perangkat daerah guna pencapaian tujuan jangka menengah dan jangka panjang daerah b. memperkuat program Manajemen Talenta ASN Nasional dalam rangka pelaksanaan prinsip Sistem Merit berdasarkan peraturan perundang-cundangan yang ada <p>Manfaat manajemen talenta :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan pola karir PNS di instansi pemerintah daerah b. Pengembangan sistem manajemen kinerja PNS di instansi pemerintah daerah yang terukur dan objektif

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			<p>c. Penilaian dan pengembangan kompetensi PNS di instansi pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi jabatan</p> <p>d. Penguatan mekanisme pengisian jabatan struktural yang sesuai dengan kriteria sistem merit.</p>
16.	Penerapan Pola Karier PNS	Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pola Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	Bertujuan menjamin keselarasan potensi dan kompetensi yang dimiliki PNS dalam pengembangan karier di masa depan demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
17.	Pemberian Tambahan Penghasilan ASN	Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	Memberikan kejelasan kondisi ASN yang tidak berhak menerima TPP, Kondisi yang menyebabkan Pengurangan TPP akibat tidak dipenuhi kewajiban
18.	Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jangka pendek	Perbup RKPD 2024 Perbup P RKPD 2023	Memberikan dasar awal pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan bagi perangkat daerah.
19.	Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jangka Menengah	Perbup RPD 2024-2026 Perbup Renstra 2024-226	Memberikan arahan perencanaan jangka pendek daerah dan perangkat daerah
20.	Kebijakan Pengawasan Tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023	Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (diundangkan tanggal 26 Juli 2023).	Kebijakan Pengawasan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
21.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup Nomor 59 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. 2. Perbup Nomor 60 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. 3. Perbup Nomor 61 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir. 4. Perbup Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 5. Perbup Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 40 Tahun 2017 tentang harga Dasar Air Tanah dan Nilai Perolehan Air Tanah. 6. Perbup Nomor 42 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2025. 7. Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pajak Restoran 8. Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan ke 2 atas Perda Kab. Kudus No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) 	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
22.	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Daerah	9. Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 10. Perbup Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023 11. Perbup Nomor 57 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 12. Perbup Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus. 13. Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. 14. Perbup Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022. 15. Perbup Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus TA 2023 16. Perbup Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus TA 2024 17. Perbup Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 18 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja .	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
23.	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2022 ttg Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Undang - Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya - Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar - Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah untuk menetapkan peringkat dan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		<ul style="list-style-type: none"> - Permendikbudristek No. 36 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya - Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2013 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah 	status Cagar Budaya
24.	Keputusan Bupati Kudus No. 432/79/2022 ttg Penetapan Sebagian Bangunan pada SD Muhammadiyah 1 Kudus sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Undang - Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya - Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya - Permendikbudristek No. 36 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya - Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2013 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya - Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah untuk menetapkan peringkat dan status Cagar Budaya
25.	Keputusan Bupati Kudus No. 432/78/2022 ttg Penetapan Sebagian Bangunan pada SMP 1 Kudus sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Undang - Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya - Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya - Permendikbudristek No. 36 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya - Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2013 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya - Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah untuk menetapkan peringkat dan status Cagar Budaya

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
26.	Keputusan Bupati Kudus No. 432/77/2022 ttg Penetapan Sebagian Bangunan pada SMP 2 Kudus sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Undang - Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya - Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya - Permendikbudristek No. 36 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya - Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2013 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah 	Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan a Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah untuk menetapkan peringkat dan status Cagar Budaya
27.	Keputusan Bupati Kudus No. 432/80/2022 ttg Penetapan Sebagian Bangunan pada E ks Omah Mode Kudus sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Undang - Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya - Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya - Permendikbudristek No. 36 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya - Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2013 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah - Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya - Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah untuk menetapkan peringkat dan status Cagar Budaya
28.	Keputusan Bupati Kudus No. 432.2/220/2023 ttg Penetapan Rumah Adat Kudus Milik Keluarga Ibu Fatkhawati di Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 ttg Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya - Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya - Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah untuk menetapkan peringkat dan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		<ul style="list-style-type: none"> - Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 tahun 2013 ttg Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah 	status Cagar Budaya
29.	Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/81/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah Uang untuk Peningkatan Pengembangan Kesenian yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 - Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 	Untuk meningkatkan sarana dan prasarana organisasi kesenian di Kabupaten Kudus
30.	SK Bupati Nomor 556/229/2023 tentang Penetapan Desa Wisata Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu	<ul style="list-style-type: none"> - Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah - Undang _ undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46) - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di 	Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Provinsi Jawa Tengah - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 232)	
31.	SK Bupati Nomor 556/230/2023 tentang Penetapan Desa Wisata Kesambi Kecamatan Mejobo Sebagai Desa Wisata Klarifikasi Rintisan di Kabupaten	- Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah– Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah - Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi Kepariwisata dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga Pemerintah Daerah kelestarian alam - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10,	Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		<p>Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035. 	

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Sedangkan pelaksanaan dan tindaklanjut atas rekomendasi DPRD Kabupaten Kudus sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 130/03 Tahun 2023 tanggal 18 April 2023, adalah sebagai berikut :

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Urusan Pendidikan		
1.	Anggaran yang bersumber dari APBN (yaitu BOP PAUD, Dikmas, BOS sd dan SMP) pencairannya langsung ke sekolah/ lembaga sehingga dalam peng-spj-an menunggu rekonsiliasi dari Pemerintah Pusat. Untuk itu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga agar lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait	BOS SD/SMP : Menyesuaikan aturan yang berlaku	BOS SD/SMP: 1. Rekonsiliasi dilaksanakan setelah sekolah melakukan realisasi atau belanja yang bersumber dari Dana BOSP, untuk Kabupaten Kudus rekonsiliasi dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, atau per semester. 2. Saat rekonsiliasi kelengkapan yang sekolah antara lain, BKU, BKT, buku bantu Pajak, SPJ, SPTJM Kepala Sekolah, Rekening BOS.
		BOP PAUD : Mengoptimalkan peng-SPJ-an tepat waktu sesuai juknis Tahun 2023 tentang pengelolaan dana BOS P dan Permedagri no 3 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana BOS pada Pemda.	BOP PAUD : Agar pencairan/transfer ke lembaga-lembaga untuk Tahun berikutnya tepat waktu.
		BOP DIKMAS (Kesetaraan) : Mengoptimalkan pertanggungjawaban dana BOP P tepat waktu sesuai juknis No. 63 Tahun 2022 Permendagri No. 3 Tahun 2023	BOP DIKMAS (Kesetaraan) : Dari transfer ke Satuan Pendidikan sebaiknya dpt dilaksanakan awal tahun.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
2.	Capaian kinerja agar dipertahankan seimbang dengan realisasi anggaran untuk tahun selanjutnya	Menjadi catatan kami untuk ke depannya, agar lebih baik	Agar capaian kinerja cepat terealisasi.
Urusan Kesehatan			
1.	BLUD harus mempunyai dana SiLPA untuk menjamin liquiditas BLUD	Digunakan untuk penambahan biaya operasional dan belanja modal tahun 2023 dengan mempertimbangkan liquiditas BLUD	Telah terpenuhinya kebutuhan operasional dan belanja modal tahun 2023
2.	Pembangunan IBS dan Penyerapannya harus lebih dimaksimalkan	Nilai kontrak pembangunan IBS sebesar Rp. 57.728.132.881 dibawah Harga Perkiraan sendiri sebesar Rp. 58.441.191.533 dan dibawah pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000.000,- sehingga terjadi efisiensi.	Telah terbangunnya gedung IBS sesuai standar kementerian kesehatan dan kamar operasi yg baru menggunakan sistem MOT yang menghasilkan pelayanan yang lebih baik, diantaranya: waktu pelaksanaan operasi lebih cepat, waktu tunggu pasien untuk operasi lebih cepat, jumlah kumulatif operasi lebih banyak, pendapatan pelayanan IBS meningkat.
3.	RSUD melaporkan telah menyelesaikan programnya dari program kerja yang direncanakan pada tahun 2022, namun belum tertangani dan masih terdapat banyak kekurangan	Melakukan persiapan pengadaan lebih awal. Sehingga masa pelaksanaan pekerjaan akan lebih panjang guna mendapatkan alat kesehatan yang diinginkan	Telah dilaksanakan pengadaan Barang/Jasa lebih awal pada tahun anggaran
4.	Peningkatan pelayanan pada RSUD sudah baik, namun untuk lebih meningkatkan pelayanan agar poliklinik yang selalu antri diharap ada alternatif poli buka di sore hari	Pelayanan sore hari sedang dalam mapping, karena keterbatasan jumlah SDM baik perawat maupun Farmasi. Jumlah kebutuhan Perawat : 496 org	- Untuk peningkatan pelayanan, dengan memberi kesejahteraan yang lebih baik kepada dokter spesialis, telah dilakukan visit pasien Rawat Inap pada hari libur / cuti bersama.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Jumlah Perawat yang ada : 426 org Jumlah kebutuhan SDM Farmasi : 58 orang Jumlah SDM Farmasi yang ada : 40 orang	- Juga telah membuka poliklinik pada hari libur / cuti bersama, antara lain klinik : Jantung, Penyakit Dalam, Kulit dan Kelamin, Gardenia, Rehabilitasi Medik.
5.	Kegiatan yang bersumber anggaran dari DBHCHT ada penundaan pelaksanaan karena menunggu penetapan DPPA hasil desk/ verifikasi sesuai dengan PMK 215/PMK.07/2021 sehingga baru bisa mulai dilaksanakan pada Bulan Mei (triwulan II). Sehubungan hal tersebut maka ketersediaan barang agar disesuaikan dengan standar/ spesifikasi dari Kemenkes	Pengadaan barang di Dinas Kesehatan disesuaikan dengan standar/ spesifikasi dari Kemenkes	Kualitas kesehatan meningkat di dukung penggunaan alat kesehatan sesuai standar yang ditetapkan Kemenkes
6.	Ada rincian kegiatan yang dialokasikan anggaran lebih dari dua sumber mata anggaran sehingga tidak bisa direalisasikan sehingga mempengaruhi dalam pencapaian target realisasi keuangan. Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan akan dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.	Terbatasnya anggaran dan cuaca yang tidak menentu di akhir tahun, membuat jalan-jalan rusak, maka perlu penambahan anggaran untuk pemeliharaan jalan dan peningkatan kapasitas SDM dalam menunjang kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kudus memaksimalkan penanganan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap walaupun terdapat kendala dalam keterbatasan anggaran dan SDM Dinas PUPR mengusulkan penambahan anggaran untuk ruas-ruas jalan yang belum tertangani dan penambahan SDM dalam peta jabatan DPUPR	Meningkatkan pemeliharaan dan kualitas serta kapasitas jalan Kabupaten
2.	Terkait jalan-jalan di Kabupaten Kudus, perlu dilakukan pelebaran jalan dan peningkatan mutu jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang akan melakukan pelebaran dan peningkatan mutu jalan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus setiap tahun anggaran telah melakukan pelebaran dan peningkatan jalan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas penanganan ruas jalan	Meningkatkan pemeliharaan dan kualitas serta kapasitas jalan Kabupaten
3.	Jalan yang berada di Bulungcangkring (perbatasan Kudus-Pati), sepanjang jalan daerah Menawan sampai Rahtawu, sepanjang jalan dr. Loekmonohadi sampai dr. Ramelan perlu untuk menjadi perhatian karena kurang bagusnya kualitas material untuk pengerasan jalan. Sehingga dapat menimbulkan kecelakaan.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan kegiatan akan lebih teliti dalam pelaksanaan kegiatan dengan memedomani pada spesifikasi Umum pekerjaan jalan dan Jembatan Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan Kabupaten

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Padahal kondisi jalan masih baik, namun secara fisik terkait kualitas material jalan perlu dilakukan perbaikan	Kudus berpedoman pada Spesifikasi Umum Pekerjaan Jalan dan Jembatan Tahun 2018 dan perubahannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	
4.	Sepanjang sisi bahu jembatan Blimbing Kidul perlu diadakan pemotongan rumput-rumput liar karena dapat mengganggu lalu lintas jalan serta aspal yang ada di jembatan tersebut perlu untuk diperbaiki dan ditambal lagi karena aspalnya sudah rusak padahal kondisi aspal masih baru	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus sudah melakukan Pemotongan rumput secara rutin oleh tenaga kontrak sesuai dengan schedule Penanganan pemotongan rumput oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kudus dilakukan secara rutin oleh tenaga kontrak sesuai dengan schedule yang direncanakan berdasarkan skala prioritas penanganan	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan Kabupaten
5.	Sepanjang bahu jembatan Bulungcangkring yang digunakan untuk pejalan kaki perlu diperhatikan ukuran fondasinya karena sudah banyak terjadi kecelakaan sepeda motor	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan kegiatan akan lebih teliti dalam pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada spesifikasi Umum pekerjaan jalan dan Jembatan - Dalam perencanaan trotoar/bahu jembatan Bulungcangkring, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus telah berpedoman pada peraturan 	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan Kabupaten

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		pembangunan jembatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	
6.	Mengingat setiap tahun terjadi bencana banjir, untuk itu Dinas PUPR diminta terlibat aktif dalam hal koordinasi dengan Pemerintah Pusat	Kami selalu berkoordinasi dengan BBWS Pemali Juana terkait kondisi sungai-sungai di Kabupaten Kudus yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. BBWS Pemali Juana akan melaksanakan Normalisasi Sungai Piji dan Sungai Wulan, yang akan dimulai di tahun 2023	Dengan adanya Normalisasi Sungai Piji, Sungai Wulan dan sungai-sungai lainnya, diharapkan bisa mengurangi luasan areal yang selama ini terdampak banjir.
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
1.	Satpol PP berfungsi sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat seharusnya bisa menjadi panutan dan bisa menindak tegas bagi pelanggar-pelanggar Perda	<ul style="list-style-type: none"> • Satpol pp dalam Melaksanakan Penindakan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah Berdasarkan Perbup Kudus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penindakan Terhadap Pelanggaran Perda dan Perbup Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pendidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkb Kudus. • melaksanakan koordinasi komunikasi dan sinergitas dengan perangkat daerah teknis terkait agar penegakan Peraturan Daerah dan Bupati lebih maksimal sehingga Pendapatan Asli Daerah bisa meningkat. 	Dalam upaya pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Satpol pp Kabupaten Kudus akan melaksanakan koordinasi komunikasi dan sinergitas dengan perangkat daerah teknis terkait agar lebih maksimal dalam melaksanakan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
2.	Penghitungan anggaran belanja Gaji pada BPBD Kabupaten Kudus tidak sebanding dengan ASN yang ada, sehingga mengakibatkan capaian realisasi anggaran tidak dapat maksimal. Untuk itu penentuan target program/kegiatan/sub kegiatan, agar benar-benar diperhitungkan antara pagu, jadwal dan target pada IKU OPD yang telah ditentukan	Perhitungan gaji sudah di sesuaikan pada anggaran tahun 2024. Pada anggaran tahun 2023 disebabkan karena adanya perubahan tipe PD dari PD tipe B (Kantor Eselon III) menjadi PD tipe A (Badan Eselon II) sehingga terdapat selisih gaji yang menjadi SILPA. Kami sependapat penentuan target/kegiatan/kegiatan diperhitungkan antara pagi, jadwal dan target pada IKU OPD yang telat ditentukan.	Perencanaan anggaran tahunan yang lebih
3.	Adanya perubahan Renstra OPD agar target program/kegiatan/sub kegiatan juga disesuaikan. Perlu dilaksanakan upaya untuk mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah	Perubahan Renstra sudah disesuaikan pada anggaran tahun 2024. Pada anggaran tahun 2023 disebabkan karena adanya perubahan tipe PD dari PD tipe B (Kantor Eselon III) menjadi PD tipe A (Badan Eselon II).	
	Urusan Sosial		
1.	Dinas Sosial agar menyediakan data base yang valid untuk mengatasi kebutuhan tidak terduga	Database sudah tersedia, berupa SIK Jateng, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), P3KE, Data Pekerja Rentan, Data Peserta Jaminan Kesehatan, tetapi aksesibilitas kepada publik tidak diberikan karena kerahasiaan data	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
2.	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja, tidak terserapnya anggaran dikarenakan efisiensi anggaran, terutama untuk kegiatan dibidang yang terdani oleh Ex BAU (dobel) dan perjalanan dinas dalam daerah tidak di SPJ kan karena kegiatan keseharian sudah merupakan tugas dan fungsi masing-masing.	
	Urusan Lingkungan Hidup		
1.	Berkaitan dengan pengelolaan sampah, sampah-sampah terbengkalai dan tidak terurus di beberapa TPA di Kabupaten Kudus, sehingga perlu ada upaya penanganan serius terkait pengelolaan sampah yang dimulai dari hulu, pemilahan sampah plastik, sampah organik dan sampah anorganik	<ul style="list-style-type: none"> - penataan sampah supaya tidak terjadinya kemacetan antrian dalam pembuangan - Melaksanakan pemilahan secara maksimal setiap harinya - Mengarahkan bentor yang buang ke TPA untuk melakukan pemilahan di gudang pemilahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Seringkali alat berat (exavator dan bulldoser) rusak sehingga penataan sampah di TPA kurang maksimal - Pemilahan yang ada di TPA kurangnya tenaga sehingga hasilnya kurang maksimal
2.	Dinas PKPLH Kabupaten Kudus perlu mengadakan dan menekankan program Pelatihan Pengelolaan Sampah, karena banyak sampah-sampah yang terbengkalai dan tidak terurus. Sehingga perlu dilakukan pembinaan pengelolaan sampah kepada petugas sampah yang ada di setiap desa	Terlaksananya penanganan Sampah melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R,	Telah dilakukan sosialisasi dan pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di desa kedungdowo sebagai percontohan pengolahan sampah di TPS3R
3.	Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017	PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank	Telah dilakukan sosialisasi dan pelaksanaan peningkatan kapasitas

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	tentang Pengelolaan Sampah, terkait masalah persampahan di desa-desa segera ditindaklanjuti, mengingat jumlah per hari timbunan sampah mencapai 4000 kubik per hari. Sehingga perlu penanganan khusus mengingat pihak swasta yang membantu Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pengelolaan sampah hanya bisa menampung sampah 20-40 ton per hari. Mengingat hal tersebut, untuk tahun-tahun ke depan, perlu adanya anggaran untuk pengadaan mesin-mesin pengolahan sampah di desa-desa	Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	pengelolaan sampah di desa kedungdowo sebagai percontohan pengolahan sampah di TPS3R
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih proaktif dalam rangka pembuatan KIA terhadap kendala pemesanan blanko dari pusat sehingga pelayanan tidak terhambat	<p>Optimalisasi Peningkatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dengan PAUD, TK, SD/MI, SMP dan MTS melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus dan Kantor Kementerian Agama Kab. Kudus, guna pelayanan penerbitan KIA; - Pengiriman Delivery Order dokumen KIA yang sudah jadi ke sekolah; - Kerja sama pemanfaatan dokumen KIA dalam pelayanan publik dengan 	Peningkatan kepemilikan KIA yang dilakukan secara berkesinambungan telah menunjukkan hasil yang mencapai dan bahkan melebihi target nasional administrasi kependudukan pada tahun 2023.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		<p>pemberian diskon harga di toko sepatu, makanan, minuman, dan tempat wisata;</p> <p>- Pelayanan terintegrasi penerbitan dokumen administrasi kependudukan atas peristiwa kelahiran dengan Paket 3in1 yaitu Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak, sehingga mendongkrak cepatnya penambahan kepemilikan KIA di Kab. Kudus.</p>	
2.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jangan berhenti dalam melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan didukung dengan sarana dan prasarana yang lebih mutakhir	1. Pengembangan/Pengembangan Aplikasi PAK SEMMOK (Pelayanan Administrasi Kependudukan Sepenuh Hati Melayani Masyarakat Secara Online di Kudus), dimana telah lolos uji ITSA (IT Security Assessment) oleh Direktorat PIAK Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan BSSN. Pelayanan PAK SEMMOK melayani penerbitan 7 dokumen administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kedatangan Antar Kabupaten/Kota, Kartu Identitas Anak, KTP, dan Perpindahan Keluar Kabupaten/Kota), Update Data/	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan melakukan upgrade inovasi pelayanan online “PAK SEMMOK” telah lolos sertifikasi di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri serta telah dilakukan uji keamanan data dan informasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga mendapatkan ijin pelayanan online yang aman yang sesuai dengan tata kelola Sistem Manajemen Informasi (SMKI) sebagaimana Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Sinkronisasi Data Lintas Sektoral, Layanan Konsultasi, dan Layanan Pengaduan; 2. Inovasi KIOS PAKDE (Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa) di 132 Desa/Kelurahan dengan melayani penerbitan 7 (tujuh) dokumen kependudukan meliputi Biodata WNI, Surat Pindah/Datang, KTP, KIA, Kartu Keluarga, Akta Kematian dan Akta Kelahiran.	
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1.	Terkait pengisian perangkat Desa, untuk desa yang sudah melakukan test pengisian perangkat desa dan sesuai dengan Keputusan Bupati mohon untuk segera dilakukan pelantikan dan yang belum sesuai untuk dilakukan test ulang	untuk perkembangan tahapan pengisian perangkat desa telah dilakukan inventarisasi terhadap desa yang sudah melaksanakan pelantikan dan belum melakukan pelantikan termasuk permasalahan permasalahan yang mendasarinya	Agar desa segera melaksanakan tahapan pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah perangkat desa sesuai kewenangannya
Urusan Perhubungan			
1.	Terkait lalu lintas, seharusnya sebuah kota sudah memikirkan konsep Smart City. Jumlah kendaraan semakin bertambah karena tidak ada pembatasan, sehingga lalu lintas jalan semakin semrawut. Kemacetan yang terjadi karena traffic light, contohnya di daerah Rendeng ada perubahan dari sisi waktu durasi	Dinas Perhubungan sependapat dengan rekomendasi yang diberikan, hal ini telah menjadi perhatian dalam penataan rekayasa lalu lintas khususnya pada persimpangan bersinyal (traffic light) di wilayah Kabupaten Kudus. Dinas Perhubungan juga telah menyusun dokumen	Pada tahun 2024 dinas Perhubungan telah menganggarkan penyediaan ATCS (Area Traffic Control System) Simpang Tipe 421 pada jalan Kabupaten

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	<p>traffic light, dan hal tersebut justru menambah masalah kemacetan. Oleh karena itu, perlu memikirkan konsep smart traffic light, seperti di Kota Bandung. Jadi, lampu hijau menyala sesuai dengan jumlah kepadatan, maksudnya, ketika kendaraan mengalami kepadatan, maka durasi waktu lampu hijaunya lama</p>	<p>Penyusunan DED ITCS (Intelligent Traffic Control System) Kabupaten Kudus melalui APBD Tahun Anggaran 2022. Dinas Perhubungan juga telah mengirimkan proposal pembangunan ITCS (khusus jalan nasional) kepada BPTD Wilayah X Jateng dan DI Yogyakarta Kementerian Perhubungan. Sedangkan untuk penanganan Simpang Bersinyal pada Jalan Kabupaten, Dinas Perhubungan sedang berkoordinasi dengan Dinas Kominfo terkait Jaringan Komunikasi Data dengan penyediaan Fiber Optic sebagai penunjang utama pembangunan ITCS.</p>	
2	<p>Terkait LPJU juga harus memikirkan konsep smart light, jadi ketika waktu sudah mulai petang, secara otomatis LPJU menyala semua, tidak hanya beberapa LPJU yang menyala. Sehingga perlu adanya penambahan anggaran untuk peningkatan daya dan perawatan, agar LPJU tidak sering padam</p>	<p>Saat ini dalam pengelolaan LPJU, Dinas Oinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kudus membuka Perhubungan sudah menggunakan Fotocel nomor layanan aduan seputar lampu penerangan jalan untuk otomatisasi LPJU ketika sudah mulai umum (LPJU) yang diberi nama SIP Terang SIP Terang petang. Adapun jika terdapat lampu yang sendiri merupakan akronim dari Sistem Pengaduan Tim belum menyala terjadi</p>	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		<p>ketika ada Perbaikan Penerangan. Di mana nomor aduannya adalah kerusakan komponen LPJU, kerusakan di 081272008154. Adapun isinya adalah berisikan data lampu, kerusakan jaringan, dan daya lebih nama pelapor, alamat pelapor, share locat(on LPJU mati akibat penggunaan token. Hal ini kemudian dan disertai foto keadaan lampu yang mati. ditindaklanjuti dengan program migrasi prabayar (token) ke pasca bayar yang akan diajukan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023. Konsep smart light yang diusulkan memang mengusung teknologi untuk memudahkan dalam percepatan penanganan, tetapi juga dipikirkan harganya yang lebih tinggi, kemungkinan besarnya anggaran perawatan (bahan material), dan keberlanjutan penggunaan</p>	
3.	<p>Terkait Meterisasi LPJU juga harus segera diprogramkan dan direalisasikan supaya ada penghematan APBD</p>	<p>Program Meterisasi (yang semula Program meterisasi (abonemen beralih ke meterisasi) abonemen beralih ke meterisasi) saat ini memang dianggap dapat menghemat besarnya tagihan listrik dalam pengelolaan LPJU. Perlu</p>	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		diketahui bahwa dalam program meterisasi khususnya di desa ini termasuk juga didalamnya adalah pembangunan jaringan LPJU baru (beserta tiang dan box app) di jalan desa yang sebenarnya adalah kewenangan Pemerintah yang penganggarannya dapat diajukan melalui Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	
4	Retribusi parkir di jalan umum supaya lebih ditingkatkan lagi meskipun target pendapatan retribusi dari parkir sudah memenuhi, tetapi untuk pendapatan parkir di tepi-tepi jalan umum supaya lebih ditingkatkan lagi	Program Meterisasi (yang semula Program meterisasi (abonemen beralih ke meterisasi) abonemen beralih ke meterisasi) saat ini memang dianggap dapat menghemat besarnya tagihan listrik dalam pengelolaan LPJU Perlu diketahui bahwa dalam program meterisasi khususnya di desa ini termasuk juga didalamnya adalah pembangunan jaringan LPJU baru (beserta tiang dan box app) di jalan desa yang sebenarnya adalah kewenangan Pemerintah Desa yang penganggarannya dapat diajukan melalui Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	
5.	Terkait keberadaan 'Pak Ogah' agar dialihkan menjadi outsourcing dengan	Kalau yang terkait pak ogah itu perlu ada Melakukan koordinasi dengan	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	diberikan bekal pembinaan terkait lalu lintas supaya peran dari petugas lalu lintas bisa berfungsi dengan optimal	Satlantas Polres Kudus koordinasi dengan pihak Satlantas Polres terkait pak Ogah Kudus karena kewenangan pembinaan terhadap pak ogah dalam pengaturan lalu lintas ada di pihak Satlantas Polres Kudus sedangkan dishub hanya terkait sarana prasarannya yang berkaitan dengan ketertiban berlalu lintas nya.	
6.	Terkait lahan parkir, perlu untuk ditingkatkan lagi atau kalau bisa disediakan lahan parkir khusus yang tertata dan profesional mengingat jumlah kendaraan semakin bertambah namun lahan parkir masih sempit sehingga untuk mengurangi kepadatan lalu lintas	Kami sependapat, dengan penambahan Membuat usulan untuk membuat Kawasan parkir. terpusat tempat-tempat parkir diharapkan mampu di sekitar Simpang Tujuh dengan membuat lokasi parkir mengurangi kepadatan lalu lintas. Dalam dibelakang Ramayana di bangun bertingkat hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus mempunyai usulan untuk membuat Kawasan parkir terpusat di sekitar simpang tujuh dengan membuat parkir dibelakang Ramayana di bangun bertingkat .	
	Urusan Komunikasi dan Informatika		
1.	Sosialisasi Cukai merupakan anggaran terbesar di Dinas Kominfo, dengan anggaran hampir 20 Milyar dengan	Penyusunan rencana kegiatan yang matang dan pelaksanaan yang sesuai dengan rencana, termasuk di dalamnya	Pelaksanaan subkegiatan sosialisasi cukai dengan perencanaan yang matang dan dilaksanakan sesuai rencana

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	realisasi 12,5 Milyar. Hal ini disebabkan adanya selisih harga dengan Satuan Standard Harga (SSH), dan sisa dari selisih harga dikembalikan ke kas Daerah	pengusulan SSH sehingga anggaran dapat terserap secara optimal. Pelaksanaan subkegiatan sosialisasi cukai telah berjalan dengan lebih efisien dengan hasil penyerapan realisasi 96,3% (realisasi sebesar 13,7M dari anggaran 14,25 M) pada tahun anggaran 2023	bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara lebih efektif dan efisien sehingga penyerapan anggaran dapat meningkat
2.	Untuk inovasi - inovasi dari Dinas Kominfo sudah banyak mengajukan tapi masih belum disetujui oleh TIM Aksistor Provinsi dan Pusat	Dinas Kominfo telah mengajukan usulan pembangunan jaringan FO. Untuk pembangunan FO tidak disetujui Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 memberikan bantuan internet desa dan jaringan metro ke Dinas Kominfo sebesar 50 mbps. Yang mendapat bantuan internet desa yaitu Desa Bakalan Krapyak, Setrokalangan dan Dukuh Waringin	Pada tahun 2024 tahap I yang mendapat internet desa yaitu Desa Menawan
		Dinas Kominfo pada tahun 2023 mengikuti proses pemetaan kegiatan peningkatan kompetensi masyarakat / pegawai ASN melalui program pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM Kementerian Kominfo. Pada tahun 2024, BPSDM Kementerian Kominfo akan memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM (Digital Entrepreneur	Meningkatkan literasi digital masyarakat dan ASN di Kabupaten Kudus

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Academy), ASN (GTA), ekonomi kreatif, pondok pesantren dan madrasah swasta (Thematic Academy) dengan total peserta sebanyak 410 orang peserta. Pelatihan akan dilaksanakan pada tanggal 4-8 Maret dan 6-8 Mei 2024	
3.	Sebagai bahan pembandingan penciptaan inovasi, Dinas Kominfo menimba ilmu terkait ATM SPBE dari Jogjakarta sehingga SPBE di Kabupaten Kudus meningkat, dalam peningkatan nilai SPBE Dinas Kominfo didampingi oleh pihak ketiga	<p>Pada tahun 2022 nilai indeks SPBE mencapai 3,38 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 4,23. Pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 lebih banyak difokuskan kepada penyusunan dokumen manajemen SPBE diantaranya manajemen risiko dan manajemen keamanan informasi sebagai dasar implementasi ISO 27001. Yang masih belum dilakukan yaitu pelaksanaan audit aplikasi dan infrastruktur SPBE</p> <p>Pada tahun 2024 akan melakukan implementasi ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan informasi sebagai bagian dari pengamanan SPBE. Pada implementasi ISO akan dilaksanakan audit penyelenggaraan keamanan informasi khusus dalam pengelolaan data center pada Dinas Kominfo yang akan dilakukan oleh</p>	Meningkatkan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		auditor eksternal yang telah tersertifikasi dalam pelaksanaan audit.	
4.	Dengan adanya CSR anggaran CCTV, tidak dibebankan dari APBD tapi dibebankan oleh Perusahaan-perusahaan	<p>Berdasarkan Perbup SPBE Kabupaten Kudus dalam pasal 13 terkait Infrastruktur SPBE, Pemerintah Kabupaten Kudus dapat memanfaatkan infrastruktur tiang komunikasi dan tiang listrik, tiang PJU serta CCTV yang mengarah ke area publik yang berbasis IP untuk kebutuhan Pemerintah Daerah. Dinas Kominfo hanya membangun infrastruktur jaringan FO, sedangkan pengadaan CCTV dibawah Dinas Perhubungan. Dinas Kominfo mendapat CSR sepanjang 21,9 km pada tahun 2022 untuk jaringan fiber optik yang menghubungkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Undaan 2. Kecamatan Jati 3. Sekretariat DPRD 4. Satpol PP 5. Kecamatan Bae 6. Kecamatan Dawe <p>Pada tahun 2023 mendapat CSR sekitar 16 km yang menghubungkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Jekulo 2. Kecamatan Mejobo 3. Desa Kesambi 	Meningkatkan kinerja jaringan komunikasi data antar unit kerja

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
5.	Untuk kegiatan Seni Budaya, ada 8 kali kegiatan tapi sampai saat ini belum diselenggarakan, dalam hal ini kesenian Ketoprak	<p>Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat 12 kegiatan event seni budaya yang terbagi menjadi 6 kali kegiatan kesenian ketoprak dan 6 kali kegiatan, sebagai bentuk sosialisasi tentang peraturan di bidang cukai. Kesenian Ketoprak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senin, 29 Mei 2023, bertempat di Desa Medini Kecamatan Undaan 2. Jumat, 9 Juni 2023, bertempat di Desa Sambung Kecamatan Undaan 3. Sabtu, 17 Juni 2023, bertempat di Desa Tumpangkrasak Kec. Jati 4. Sabtu, 17 Juni 2023, bertempat di Desa Peganjaran Kecamatan Bae 5. Sabtu, 8 Juli 2023, bertempat di Desa Sadang Kecamatan Jekulo 6. Jumat, 18 Agustus 2023, bertempat di Desa Undaan Tengah Kec. Undaan 	Kegiatan Event Seni Budaya dalam bentuk pementasan ketoprak dan wayang kulit merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat umum tentang peraturan di bidang cukai, antara lain memberikan pemahaman kepada masyarakat ciri rokok ilegal dan bahaya peredaran rokok ilegal sehingga merugikan negara, selain itu juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam usaha gempur rokok ilegal dengan ikut melaporkan / menyampaikan informasi terkait dengan peredaran rokok ilegal di masyarakat.
6.	Untuk Komisi A agar dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi sebagai Narasumber di setiap OPD	<p>Anggota Komisi A DPRD telah dijadwalkan untuk menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai. Anggota Komisi A telah menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bpk. Sudjarwo : Sabtu, 11 Maret 2023, Balai Desa Karangmalang 	Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai yang melibatkan para narasumber dari pejabat pemerintah sipil maupun TNI/Polri, anggota DPRD, serta pejabat Bea dan Cukai bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang bahaya dari peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Para narasumber

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Kec.Gebog 2.Bpk. Ruston Harahap : Sabtu, 11 Maret 2023, Balai Desa Gribig Kec.Gebog 3.Bpk. Budiiyono : Sabtu, 18 Maret 2023, Sport Center Undaan Lor Gang I Kec. Undaan 4.Bpk. Khoirul Badawi : Sabtu, 6 Mei 2023, Balai Desa Honggosoco Kec.Jekulo 5.Bpk. Ali Muklisin : Sabtu, 6 Mei 2023, Eks Kawedanan Jekulo Kec.Jekulo 6.Bpk. Baasith S. Wafa : Sabtu, 10 Juni 2023,Gedung Serbaguna Kandangmas Kec. Dawe 7.Bpk. Mardijanto : Sabtu, 10 Juni 2023, Balai Desa Piji Kec. Dawe 8.Bpk. Sunarto : Sabtu, 15 Juli 2023, Gedung Muslimat NU Loram Kulon Kec. Jati 9.Bpk. Rinduwan : Sabtu, 15 Juli 2023, Aula Gedung DPRD Kec. Jati	memberikan paparan dari sudut pandang sesuai peran, tugas dan fungsi masing-masing.
7.	DPRD Kabupaten Kudus merekomendasikan agar Dinas Kominfo lebih proaktif dalam mencari terobosan-terobosan demi kemajuan Kudus tercinta	Dinas Kominfo merencanakan pembuatan program podcast untuk turut menyebarkan informasi, kebijakan, dan diskusi berbagai bidang	Dengan adanya program talkshow / podcast tersebut diharapkan sebagai sarana diskusi dan penyebaran informasi kepada masyarakat luas

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		<p>permasalahan yang uptodate, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan narasumber yang kompeten di bidangnya .</p> <p>Sarana dan prasarana pendukung kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dan akan program akan segera dijalankan pada tahun 2024.</p>	<p>melalui media online menyesuaikan dengan trend milenial saat ini dan diharapkan dengan program ini penyampaian informasi dapat lebih mudah tersampaikan kepada masyarakat.</p>
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
1.	Penyerapan anggaran sebesar 34,15% adalah sangat rendah	- Melakukan koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang khususnya pekerjaan konstruksi akan dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan mendasar pada peraturan yang berlaku	Diperoleh data laporan perkembangan kegiatan per bulan.
2.	Besarnya Silpa yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Capaian data realisasi dan kegiatan dan anggaran sangat baik (berdasarkan Evaluasi Renja Triwulan IV)
3.	Pengadaan tanah dan pengadaan alat pelinting rokok adalah anggaran murni namun tidak terserap, mohon ada penjelasan yang komprehensif	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan penentu kebijakan. Kementerian/Lembaga terkait dan Tim Teknis Bidang Pelaksana agar	Anggaran Pengadaan tanah dan Pengadaan Mesin Pelinting dialihkan untuk Pembangunan SIHT Kudus (Tahap 1) dengan penyerapan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan optimal, bermanfaat, sesuai prosedur dan tahapan, dan dapat terserap maksimal	mencapai 85,56%
4.	Silpa di Dinas Naker Perinkop UKM, sebagai tanggung jawab bersama antara Pemkab. dengan DPRD	Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Capaian data realisasi dan kegiatan dan anggaran sangat baik (berdasarkan Evaluasi Renja Triwulan IV)
	Urusan Penanaman Modal		
1.	Realisasi investasi di Kabupaten Kudus sebesar Rp 1,09 triliun dari target sebesar Rp 3,3 triliun, sehingga perlu dibentuk semacam Tim Percepatan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Tahun 2018 telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Kudus dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 570/057/2018. Tujuan dibentuknya Tim tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan, pengawasan, penyederhanaan dan penyelesaian perizinan berusaha dalam percepatan perizinan berusaha. Pada saat terjadi covid-19, Tim ini dibubarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional - Setelah pandemi Covid-Iv, Pemerintah guna mendorong 	<p>Tujuan: Sebagai upaya untuk memfasilitasi permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha dalam proses investasinya (pra dan pasca investasi), sehingga diharapkan permasalahan terselesaikan secara end to end</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		<p>pemulihan perekonomian agar bangkit kembali, maka perlu adanya percepatan perekonomian melalui deregulasi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan peningkatan ekosistem investasi. Untuk itu pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK Bupati Kudus Nomor 570/057/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Kudus belum dicabut, dan guna menindaklanjutinya perlu dibentuk Tim pengganti sebagai harmonisasi dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi. - Saat ini tindak lanjut Pembentukan Tim Percepatan Investasi masih dalam proses penyusunan. 	
2.	Ada beberapa produk perizinan dari Dinas PMPTSP menjadi obyek gugatan di pengadilan, perlu ketelitian dan pendalaman regulasi	<ul style="list-style-type: none"> • Produk perizinan yang dikeluarkan akan lebih dicermati kelengkapan dan kebenarannya serta dirapatkan terlebih dahulu dengan Tim Teknis Perizinan. 	<p>Tujuan: Agar produk perizinan dapat digunakan sebagai bukti legalitas usaha/non usaha dan tidak menimbulkan permasalahan/sengketa dengan pihak lain.</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi intensif dengan Tim Teknis Perizinan terhadap produk perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kab. Kudus 	
3.	Kurangnya personil tim teknis perizinan di Dinas PMPTSP yang menyebabkan ketergantungan pada personil di beberapa OPD, juga kehadiran instansi vertikal di gerai MPP	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan Tim Teknis Perizinan apabila petugas tidak berada di gerai MPP. • Melaksanakan Evaluasi MPP setiap triwulan untuk mengevaluasi kinerja masing-masing gerai dan mengkoordinasikan penjadwalan kehadiran petugas gerai sehingga gerai tetap adajadwal pelayanan. 	Tujuan: Mengefektifkan pelayanan di gerai MPP agar mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan satu pintu di MPP
4.	Realisasi pendapatan sebesar 66,09% belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan surat pemberitahuan untuk melakukan pembayaran perizinan yang sudah diajukan • Menginformasikan melalui aplikasi bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan beralih ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga IMB yang sudah diajukan agar diselesaikan pembavaran retribusinya, 	Tujuan: Meningkatkan pendapatan Retribusi Daerah dan meningkatkan realisasi pendapatan DPMPTSP Kab. Kudus melalui Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
	Persandian		
1.	Dalam usaha kelancaran penyelenggaraan pemerintah di butuhkan koordinasi yang cepat antar pihak DPRD	Aplikasi Srikandi telah dilaunching Bupati Kudus dan telah dimanfaatkan oleh perangkat daerah dalam	Meningkatkan kecepatan dalam proses pengiriman surat menyurat

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	merekomendasikan agar koordinasi dapat di lakukan baik secara fisik maupun secara online	pengelolaan arsip dan surat menyurat. Leading sector pemanfaatan aplikasi srikandi merupakan wewenang dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sedangkan Dinas Kominfo bertugas dalam memfasilitasi pendaftaran sertifikat elektronik.Sampai saat ini pendaftaran tanda tangan elektronik telah dilaksanakan oleh OPD, Kelurahan, Puskesmas, Dokter pada RSUD dr Lukmonohadi dan beberapa Desa.	
2.	Kedepannya untuk koordinasi dan surat menyurat sudah menggunakan aplikasi SRIKANDI yang telah memanfaatkan tanda tangan elektronik, aplikasi tersebut merupakan aplikasi umum yang di tetapkan oleh MENPAN RB	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sedangkan Dinas Kominfo bertugas dalam memfasilitasi pendaftaran sertifikat elektronik.	
	Kearsipan		
1.	Dalam penataan kearsipan sudah dibuatkan Program Nasional yaitu dengan adanya Aplikasi sistem berbasis Srikandi, sehingga untuk peningkatan pelayanan harus didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana/ gedung		
	Urusan Pangan, Urusan Pertanian, Urusan Kelautan dan Perikanan		
1.	Produk pertanian saat panen raya tidak terserap secara maksimal di pasar	Terkait dengan dinamika fluktuasi harga produk hortikultura (cabai)	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	berakibat pada turunnya kualitas terutama produk hortikultura (cabai), harus ada solusi Penanganan Pasca Panen	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus mengambil Langkah kebijakan salah satunya dengan mengadakan pelatihan pengolahan pasca panen khususnya cabai pada tahun anggaran 2024	
2.	Distribusi bantuan benih padi tidak sesuai musim tanam mohon menjadi perhatian	Tidak tepatnya waktu distribusi bantuan benih dengan masa tanam, dapat diupayakan dengan melakukan koordinasi aktif ke para penangkar benih terdekat untuk diusulkan ke pemerintah pusat, agar komunikasi bisa lebih efektif terkait kesiapan dan ketersediaan benih pada saat masa tanam, dan juga mendorong para poktan atau pelaku usaha pertanian untuk menjadi penangkar benih padi, dengan harapan dapat diusulkan menjadi bagian dari proses pengadaan benih oleh pemerintah pusat, sehingga komposisi kebutuhan dan ketersediaan benih dapat terkondisikan	
3.	Pendapatan RPH sebesar Rp 51 juta, agar ada upaya lebih maksimal seperti RPH daerah lain	Dinas Pertanian dan pangan akan bekerja sama dengan pihak Satpol PP untuk mentertibkan perda No. 4 tahun 2018 tentang Perubahan Perda 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, karena selama	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		ini masih banyak proses pemotongan hewan diluar RPH.	
4.	Terkait dengan aset di Dinas Pertanian dan Pangan agar disiapkan kajian pemanfaatan aset agar bisa dimaksimalkan	Dinas Pertanian dan Pangan Kab Kudus saat ini mempunyai Aset tanah yang disewakan antara lain Balal Benih Ikan di Desa Margorejo, Aset tanah di Desa Honggosoco dan desa Dukuhwaringin.Untuk memaksimalkan potensi lahan kedepan akan kami susun kaftan potensi untuk memaksimalkan PAD.	
5.	Adanya aduan tidak terbayarnya klaim puso petani dan terindikasi ada unsur perbuatan melawan hukum karena tidak terinputnya klaim puso oleh OPD, hal ini agar diselesaikan sehingga hak petani terpenuhi	Dinas Pertanian dan Pangan kab Kudus sudah memfasilitasi penyelesaian klaim AUTP (APBN dan APBD) Tahun Anggaran 2020 dan 2021 di Kab. Kudus. Namun demikian dari pihak Jasindo menyatakan bahwa klaim tidak dapat diproses karena keterlambatan proses input data. Koordinasi telah kami lakukan semaksimal munqkln namun sampal sekarangq belum terpenuhi	
	Urusan Pariwisata		
1.	Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Kawasan Colo dan sekitarnya, perlu Masterplan Pengembangan Kawasan Wisata Colo di luar segmen wisata ziarah	Pemerintah Kabupaten Kudus telah Menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) dan telah ditetapkan	Pengembangan Pariwisata Kab Kudus, Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Makam Sunan Muria	<p>melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020 – 2025.</p> <p>Dalam RIPPARKAB tersebut, perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten terbagi menjadi 4 Destinasi Pariwisata Kabupaten, 5 Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, dan 6 Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten. Adapun Colo termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dalam Destinasi Pariwisata Kabupaten Gunung Muria dan Sekitarnya.</p> <p>Terkait Pengembangan Kawawan Wisata Colo, pada tahun 2022 kami telah Menyusun masterplan pengembangan pariwisata colo yang meliputi : Kawasan Wisata Taman Ria, Kawasan Wisata Ex Taman Buah, Kawasan Terminal Wisata</p>	
2.	Terobosan OPD untuk menghasilkan program-program unggulan dimulai dari perencanaan, kajian potensi wisata yang komprehensif, dan DPRD akan mendukung terobosan tersebut sebagai konsep Program Strategis Daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan menyusun kajian potensi wisata Kabupaten Kudus dengan bekerja sama dengan Institusi Pendidikan yang terakreditasi.	Pengembangan Pariwisata Kab Kudus, Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
3.	Diupayakan ada PAD dari sektor retribusi peziarah Makam Sunan Kudus yaitu dengan tiketing masuk kawasan Makam Sunan Kudus, sebagaimana pendapatan retribusi dari peziarah Makam Sunan Muria tanpa mengurangi pendapatan dari YM3SK	Terkait Upaya PAD dari sektor retribusi peziarah Makam Sunan Kudus akan kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata
	Urusan Perdagangan		
1.	Harus ada kiat-kiat untuk meningkatkan PAD pada bidang-bidang dinas	Sudah terbentuk Perda no 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (PDRD) Perbup mengenai PDRD sedang disusun	Kenaikan hasil pungutan retribusi
2.	Ketertiban administrasi perizinan, kajian ekonomi pasar modern lebih diperhatikan	Terdapat 2 dokumen legalitas pasar modern Melakukan verifikasi terhadap permohonan perizinan melalui OSS	Tertibnya administrasi perizinan pasar modern
3.	Proyeksi kenaikan pendapatan dari los pasar	Sudah terbentuk Perda no 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (PDRD) Perbup mengenai PDRD sedang disusun	Kenaikan hasil pungutan retribusi los pasar sebanyak + 30%
4.	Sinergitas antar OPD dalam even dandangan sebagai momen tahunan yang besar dengan penyediaan tempat/hall bagi UMKM	Terdapat 6 stand yang terisi	Mempomosisikan produk lokal hasil binaan
5.	Kurangnya petugas pemungut retribusi di pasar-pasar, dan sudah tidak diperkenankan pengadaan pegawai sebagai petugas pemungut retribusi	Sudah terlaksana di 2 pasar (Pasar Kliwon dan Pasar Bitingan) Tahun 2024 direncanakan dilaksanaka di Pasar Baru	Optimalisasi pemungut retribusi yang ada di pasar-pasar dengan memanfaatkan teknologi informasi

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		
	Administrasi Pemerintahan		
1.	Dalam usaha kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di butuhkan koordinasi yang cepat antar pihak. DPRD merekomendasikan agar dirintis kedepannya koordinasi di lakukan secara online	Pelaksanaan digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Kudus sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan saat ini beberapa sektor koordinasi sudah dilaksanakan secara online diantaranya dalam penyusunan anggaran, usulan pokir, maupun surat menyurat. Ke depan akan dikembangkan lagi lebih pada bidang-bidang yang lebih luas	Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kudus dan DPRD Kabupaten Kudus berjalan lebih baik dan harmonis
2.	DPRD merekomendasikan agar eksekutif bisa mengimbangi dalam pelaksanaan regulasi tersebut sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal	Upaya akselerasi dalam penyusunan regulasi di daerah akan terus diupayakan sebagaimana ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal.
	Urusan Pengawasan		
1.	Syarat Pelaksanaan Audit adalah harus ada laporan/aduan yang diajukan kepada Bupati dan bukti bukti yang jelas dari aduan tersebut, setelah 2 syarat tersebut	Telah disusun laporan hasil audit	Meningkatnya pengendalian intern dan pengembalian kelebihan pembayaran

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	terpenuhi Inspektorat baru bekerja Inspektorat harus berani dan tegas dalam pelaksanaan Audit		
	Urusan Keuangan		
1.	Realisasi pendapatan daerah sebesar 103,03% ada kemungkinan target pendapatan daerah yang terlalu rendah	Penetapan target dilakukan berdasarkan kajian potensi yang disusun akademisi, dievaluasi pemerintah provinsi dan disepakati dengan DPRD. Selain itu, target perubahan yang ditetapkan pada bulan September tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif di lapangan (realisasi, pertumbuhan dan prognosis tahun 2022	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.	Penaan Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) di Pasar Bitingan dan Pasar Jember yang masih dalam sengketa segera diselesaikan	Pasar Bitingan sampai saat ini masih menunggu putusan Kasasi, sehingga kami belum menarik Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKO). Sedangkan tanah dan bangunan Pasar Jember telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus pada tanggal 4 Februari 2022 Nomor 873/AAA/SKHll/2022 dan Nomor 030/1013/2500/2022. Terkait penaan Retribusi PKO akan kami koordinasikan dengan Dinas Perdagangan selaku Pengguna Barang	Peningkatan Kualitas Pengelolaan BMD

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
3.	Target investasi untuk pemanfaatan aset maupun barang-barang milik daerah tidak maksimal perlu dikaji untuk pembentukan Tim Percepatan Investasi	Guna pemanfaatan aset maupun BMD yang tidak maksimal perlu membentuk Tim Percepatan Investasi, Pemerintah Kabupaten Kudus telah membentuk Tim Percepatan Investasi dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 570/057/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksana Berusaha Kabupaten Kudus	Peningkatan Kualitas Pengelolaan BMD
4.	Perlunya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan dan penyetoran pajak daerah, misal tapping box untuk pengambilan ABT	Penempatan alat pemantau secara (tapping box) senantiasa dikaji untuk melihat daya ungkit yang paling signifikan untuk menambah pendapatan daerah. Hal ini karena keterbatasan dukungan Bank Jateng dalam menyediakan alat pemantau. Sampai dengan tahun 2023, sudah dipasang sebanyak 110 alat dibanding 50 alat pada tahun sebelumnya. Adapun sebaran pemanfaatan alat tersebut sampai saat ini digunakan pada obyek pajak hotel, restoran, parkir dan hiburan. Kedepan, jika terdapat penambahan dukungan alat, akan dikaji pemanfaatannya untuk obyek pajak air tanah.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
5.	Mendasarkan pada Visi-Misi Bupati Kudus Tahun 2018-2023, bahwa bantuan untuk takmir masjid diberikan setiap bulan, namun pada pelaksanaannya bantuan diberikan setahun satu kali	Bahwa Visi Misi Bupati Kudus Periode 2018-2023 yang dijabarkan dalam salah satu Program yaitu bantuan sosial per bulan untuk khotib dan imam masjid/mushola serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bantuan Sosial harus memenuhi syarat Resiko Sosial bagi penerimanya. Sedangkan penerima bantuan Imam, Marbot dan Khotib tidak semuanya memenuhi syarat resiko social. Sehingga dalam realisasi pelaksanaannya tidak diberikan dalam bentuk bantuan social namun diberikan dalam bentuk Hibah kepada Dewan Masjid Indonesia (DMI) atau Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Berdasarkan kemampuan anggaran, diberikan bantuan kesejahteraan bagi Imam, Khotib dan Marbot Masjid dan Imam Musholla sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 tahun	Tersalurkannya bantuan untuk takmmir masjid sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan
	Urusan Kepegawaian		
1	Untuk pengadaan tenaga kontrak menunggu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen	Sesuai ketentuan pasal 96 peraturan pemerintah No.49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK disebutkan bahwa	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain dilingkungan pemerintah dilarang mengangkat pegawai Non PNS atau Non PPPK	
2	Syarat PPPK untuk pendidikan, sesuai dengan kebijakan dari pusat diambil dari formasi Tahun 2021 yang masuk passing grade	Telah di laksanakan	
3	Kekurangan tenaga ASN di Kudus banyak sekali sekitar 340 orang. Rencana mau ditambah 411 tapi masih ada kekurangan 600 orang. DPRD merekomendasikan agar pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja lebih diperhatikan untuk menyesuaikan antara beban kerja dengan pegawai sehingga di pastikan bahwa setiap pegawai mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas atas apa yang di tugaskan	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sudah sesuai dengan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, bahwa penyusunan dokumen Anjab dan ABK telah memperhitungkan beban kerja unit dan ABK jabatan individu yang dibutuhkan organisasi. - Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus telah menetapkan Perbup Kudus Nomor 49 tahun 2020 tentang Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten kudus dan Keputusan Bupati Kudus Nomor 069/233/2020 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ASN di 	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	
4	Pengembalian ASN ke daerah asal (putra Daerah) agar difasilitasi, termasuk mutasi ASN Kudus yang ingin mengikuti suami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap permohonan mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Kudus selalu difasilitasi dengan mengkaji hal-hal sebagai berikut: a. Sisi kemanusiaan; dan b. Sisi aturan. 2. Mendekatkan diri tempat kerja dengan tempat tinggal dan atau mengikuti suami merupakan salah satu alasan mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Kudus yang sangat dipertimbangkan oleh Tim Penilai Kinerja PNS Kabupaten Kudus untuk disetujui permohonan mutasi masuknya. 3. Namun, pertimbangan dimaksud akan berlaku selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan PNS yang bersangkutan tidak terikat dengan surat pernyataan tidak mengajukan pindah tugas sebagaimana ketentuan dalam Lampiran I huruf L angka 2.j dan 2.k Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 tentang Kriteria 	Pengembalian ASN ke daerah asal (putra daerah) dan mutasi ASN Kudus yang ingin mengikuti suami dapat dipertimbangan untuk disetujui selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan bagi pemohon yang belum dapat disetujui permohonan mutasi masuknya diberikan pemberitahuan secara resmi dengan disertai penjelasan alasannya.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019. Mengingat apabila hal tersebut dilanggar, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai PNS	
5	Kondisi Sekolah Negeri di Kabupaten Kudus saat ini sangat memprihatinkan karena jumlah guru di Sekolah Negeri sangat berkurang, sehingga banyak orang tua yang lebih percaya mendaftarkan anaknya di Sekolah Swasta	Pemerintah saat ini sedang mengupayakan dengan memenuhi kebutuhan guru melalui seleksi Kompetensi PPPK bagi tenaga honorer (TH K2 dan non ASN)	
	Kewilayahan Admnistrasi Pemerintahan		
1.	Lebih mendalami tatacara perencanaan dalam penganggaran supaya anggaran yang telah direncanakan bisa terealisasi dan terserap secara optimal	Penyusunan perencanaan kegiatan di Kecamatan dibahas sebelumnya melalui Musrenbang tingkat kecamatan dengan mengundang seluruh <i>stakeholder</i> sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya nantinya dapat lebih optimal dengan didukung seluruh elemen.	Untuk mendapatkan perencanaan kegiatan di Kecamatan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan sesuai target waktu sehingga lebih tepat sasaran.
2.	Disarankan membuat inovasi-inovasi supaya bisa mendongkrak anggaran	Inovasi terus dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan layanan publik di Kecamatan terus dikembangkan dalam rangka memberikan pelayanan prima dan untuk pemberdayaan kepada masyarakat.	Untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
3.	Disarankan agar kecamatan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis terhadap Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan sosialisasi dan dalam perumusan kebijakan sudah dilaksanakan, sebagian pelaksanaannya dibiayai APBDes dari Pemdes, ke depan akan diupayakan peningkatan dukungan anggaran dari APBD Kab. Kudus	Aparatur Pemerintah Desa dapat menguasai penyusunan regulasi di tingkat desa lebih baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4.	Diharapkan lebih gigih lagi dalam menarik wistawan lokal dengan desa-desa wisata dan dengan jamuan makanan khas kudus	Telah dilaksanakan koordinasi secara intens dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan rintisan Desa Wisata di Kabupaten Kudus, baik secara kualitas maupun kuantitas. penyediaan etalase produk UKM dan unggulan desa	Penambahan destinasi wisata batu yang lebih menarik, dan dapat menarik lebih banyak wisatawan sehingga dapat mendorong penguatan ekonomi masyarakat.
Kesatuan Bangsa dan Politik			
1.	Anggaran dari APBD hanya untuk pelaksanaan PILKADA sedang untuk Pilpres atau Pemilu menggunakan dana APBN, untuk itu DPRD Kabupaten Kudus merekomendasikan agar penganggaran lebih selektif	Penyusunan rencana anggaran untuk kegiatan PILKADA diupayakan sesuai dengan kebutuhan yang ada melalui mekanisme pengusulan anggaran dari masing-masing instansi, proses verifikasi dan validasi oleh tim, dan pembahasan oleh TAPD.	Tercukupinya kebutuhan pendanaan Pilkada Tahun 2024 tanpa mengorbankan kegiatan Pemerintah Daerah yang telah direncanakan.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-
PEMBANTUAN

Prinsip Keuangan Negara menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Tugas Pembantuan mempunyai peran strategis untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi Pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari APBN yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga. Pada umumnya dipertanyakan adanya kegiatan yang bersumber dari APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hal ini disebabkan penulisan nomenklatur Dekonsentrasi selalu dibarengi dengan Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kudus tidak mendapatkan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat (Kementerian) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (NIHIL), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Diterima
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023

NO	K/L	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- NIHIL -											

4.2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Informasi adanya anggaran/DIPA tugas pembantuan dari kementerian teknis baru diperoleh pada saat tahun anggaran telah berjalan sehingga jika terdapat pelaksanaan tugas pembantuan maka tidak ada anggaran pendampingan dari APBD.
2. Selama ini kegiatan yang dilaksanakan pada tugas pembantuan belum sinkron dengan prioritas kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
3. Adanya pandemi Covid-19 pada Tahun-tahun sebelumnya, menjadikan program dan kegiatan oleh Kementerian lebih difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi, sehingga tugas pembantuan yang diberikan ke daerah berkurang, termasuk untuk Kabupaten Kudus tidak diberikan tugas pembantuan.

BAB V PENUTUP

Penyusunan dokumen LKPJ adalah upaya Pemerintah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kualitas evaluasi atas capaian pembangunan daerah. Dokumen LKPJ Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023 menjadi cerminan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun. Laporan hasil pembangunan daerah tersebut dapat diukur melalui kontribusi sejumlah program dan kegiatan pembangunan dalam melaksanakan arah kebijakan dan atau urusan yang telah ditetapkan.

Kontribusi program dan kegiatan yang berkualitas diharapkan dapat memiliki daya ungkit terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah sebagai bukti keberhasilan pembangunan daerah berkelanjutan yang berorientasi pada pencapaian hasil. Hasil kinerja Kepala Daerah disajikan secara transparan dan terukur, dalam bentuk capaian indikator makro pembangunan daerah dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen- dokumen perencanaan pembangunan setahun sebelumnya. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berikutnya.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan *Good Governance* yang bersih, transparan dan bertanggung jawab serta mampu memenuhi tantangan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, sebagai lembaga perwakilan dan representasi rakyat di daerah.

Sebagai penutup, penyampaian LKPJ Tahun 2023 ini menjadi laporan pelaksanaan tahun kelima atau tahun terakhir dalam rentang waktu periode RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023. Capaian tahun kelima ini menjadi evaluasi penting terhadap pelaksanaan tahun-tahun selanjutnya agar pencapaian daerah menjadi lebih optimal. Pemerintah Kabupaten Kudus akan terus berbenah diri meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.